



**KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

FEBRUARI 2019

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
Provinsi Kalimantan Timur**

Publikasi ini dapat diakses secara *online* pada:
www.bi.go.id/web/id/publikasi

Salinan publikasi dalam bentuk hardcopy dapat diperoleh di:
Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Gajah Mada No. 1
Samarinda 75122, Kalimantan Timur
Telp: 0542 – 741 022, 741 023
Fax: 0542 – 732 644

KATA PENGANTAR

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kajian ini berisi tentang informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian kedepan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi *stakeholders* di wilayah Kaltim dalam melakukan perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh 5,14% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kinerja positif lapangan usaha pertambangan seiring dengan optimalisasi produksi dan level harga komoditas yang masih tinggi menjadi pendorong utama ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Lebih lanjut, percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah pada akhir tahun 2018 turut mendukung peningkatan ekonomi Kaltim. Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltim tahun 2018 tetap tumbuh positif pada level 2,67% (yoy). Walaupun tidak sekuat tahun 2017 yang tumbuh 3,13% (yoy). Ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas permintaan batubara dari negara mitra dagang serta penurunan input bahan baku industri migas menjadi penyebab deselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2018.

Analisa pada kajian ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari kegiatan survei dan *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari pihak eksternal, baik dari kalangan Pemerintah maupun swasta. Atas seluruh bantuan tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan kajian ini. Besar harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas kajian ini sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Samarinda, Februari 2019
**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ttd.

Muhamad Nur
Kepala Perwakilan

VISI BANK INDONESIA

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.

MISI BANK INDONESIA

- a. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- b. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- d. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- e. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- f. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- g. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
VISI BANK INDONESIA	3
MISI BANK INDONESIA	3
NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GRAFIK.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	11
TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI.....	12
RINGKASAN EKSEKUTIF	15
I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	2
1.1 Gambaran Umum.....	2
1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha.....	4
1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	18
BOKS I.1 Potensi India, Pasar Batubara terbesar Kaltim	32
BOKS I.2 Pengembangan Pariwisata Kaltim melalui Integrated Tourism	35
II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	40
2.1 APBD Pemerintah Provinsi	40
2.2 APBD Kabupaten/Kota	45
2.3 Alokasi APBN di Wilayah Kalimantan Timur.....	48
III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	50
3.1 Gambaran Umum.....	50
3.2 Inflasi Bulanan (mtm).....	53
3.3 Inflasi Tahunan (yoy).....	58
3.4 Inflasi Menurut Kota IHK.....	60
3.5 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.....	62
BOKS II.1 Kenaikan Tarif Angkutan Udara di Kaltim Tahun 2018.....	66
IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM .	71
4.1 Asesmen Sektor Korporasi	71
4.1.1 Kinerja Keuangan Korporasi	74
4.1.2 Eksposur Sektor Korporasi pada Sektor Perbankan.....	76
4.2 Asesmen Sektor Rumah Tangga.....	78
4.2.1 Kinerja Rumah Tangga.....	78
4.2.2 Eksposur Sektor Rumah Tangga pada Sektor Perbankan	79
4.3 Asesmen Sektor Perbankan	81
4.3.1 Asesmen Kondisi Intermediasi Perbankan.....	81
4.3.2 Asesmen Risiko Perbankan	84
4.4 Asesmen Sektor UMKM	86
V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	88

5.1	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	88
5.2	Perkembangan Aliran Uang Kartal	90
5.3	Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Keuangan.....	93
VI.	KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	97
6.1	Ketenagakerjaan	97
6.2	Kesejahteraan	100
VII.	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	105
7.1	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	105
7.2	Prospek Inflasi Kaltim	109
	DAFTAR ISTILAH	112

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy).....	5
Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy).....	19
Tabel I.3 Komoditas Utama Ekspor Kaltim Tahun 2018.....	27
Tabel I.4 Negara Tujuan Utama Ekspor Kaltim Tahun 2018	27
Tabel I.5 Komoditas Utama Impor Kaltim Tahun 2018.....	30
Tabel I.6 Negara Asal Utama Impor Kaltim Tahun 2018	31
Tabel I.7 Zona Kawasan Wisata Kabupaten Berau Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah	36
Tabel I.8 Arus Penumpang Bandara APT Pranoto.....	37
Tabel II.1 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)	40
Tabel II.2 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)	44
Tabel II.3 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)	46
Tabel II.4 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)	47
Tabel II.5 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBN Tahun 2019 (Rp Juta)	48
Tabel II.6 Transfer Dana Desa Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan Alokasi Tahun 2019 (Rp Juta)	49
Tabel III.1 Harga Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Kaltim.....	53
Tabel III.2 Perbandingan Rata-Rata Inflasi Bulanan Kaltim Triwulan III dan IV 2018 (mtm).....	54
Tabel III.3 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan Kaltim Triwulan IV 2018 (mtm).....	57
Tabel III.4 Inflasi Tahunan Kaltim (yoy)	59
Tabel III.5 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan III 2018 (yoy)	60
Tabel III.6 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy)	61
Tabel III.7 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan IV 2018.....	64
Tabel III.8 Struktur Biaya Maskapai Penerbangan	67
Tabel III.9 Tarif Batas Atas-Bawah Angkutan Udara Balikpapan.....	70
Tabel V.1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Untuk BPNT di Kalimantan Timur.....	94
Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltim	97
Tabel VI.2 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Kaltim.....	98
Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Status Usaha Provinsi Kaltim.....	99
Tabel VI.4 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltim	100
Tabel VI.5 Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur	101
Tabel VI.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Ribu Jiwa).....	102
Tabel VII.1 <i>Outlook</i> Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kalimantan Timur.....	107
Tabel VII.2 <i>Outlook</i> Harga Komoditas Ekspor Utama Kalimantan Timur	109

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim & Nasional	2
Grafik I.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional 2018	2
Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Non-Tambang.....	4
Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Pertambangan.....	5
Grafik I.5 Produksi Batubara Kaltim	7
Grafik I.6 DMO Batubara Kaltim.....	7
Grafik I.7 <i>Lifting</i> Minyak Kaltim.....	7
Grafik I.8 <i>Lifting</i> Gas Kaltim.....	7
Grafik I.9 Kredit dan NPL Industri Pertambangan Kaltim.....	8
Grafik I.10 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Industri Pengolahan	9
Grafik I.11 Sub-Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun 2017.....	9
Grafik I.12 Indeks LNG Kaltim.....	9
Grafik I.13 Volume Ekspor CPO Kaltim.....	10
Grafik I.14 Harga CPO Kaltim	10
Grafik I.15 Volume Ekspor Bahan Kimia Kaltim	11
Grafik I.16 Volume Ekspor Pupuk Kaltim	11
Grafik I.17 Kredit dan NPL Industri Pengolahan Kaltim	11
Grafik I.18 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konstruksi.....	13
Grafik I.19 Impor Besi/Baja Kaltim	13
Grafik I.20 Kredit KPR Kaltim.....	13
Grafik I.21 Kredit Konstruksi	13
Grafik I.22 NPL Kredit Konstruksi dan KPR.....	14
Grafik I.23 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Pertanian.....	15
Grafik I.24 Harga TBS Kaltim	15
Grafik I.25 Kredit dan NPL Pertanian Kaltim	15
Grafik I.26 Kredit dan NPL Perikanan Kaltim.....	15
Grafik I.27 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Perdagangan Besar dan Eceran.....	17
Grafik I.28 Kredit Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran	17
Grafik I.29 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Jasa Keuangan	18
Grafik I.30 Kredit Lapangan Usaha Jasa Keuangan	18
Grafik I.31 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - PMTB.....	19
Grafik I.32 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim	20
Grafik I.33 Penanaman Modal Asing Kaltim.....	20
Grafik I.34 Kredit dan NPL Investasi Kaltim.....	21
Grafik I.35 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Rumah Tangga	22
Grafik I.36 Optimisme Konsumen Rumah Tangga Kaltim	22
Grafik I.37 Indeks Tendensi Konsumen Kaltim.....	22
Grafik I.38 Kredit Konsumsi Kaltim.....	23
Grafik I.39 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Pemerintah	24
Grafik I.40 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor Luar Negeri	25
Grafik I.41 Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltim.....	25

Grafik I.42 Neraca Migas Kaltim.....	26
Grafik I.43 Perkembangan Ekspor Nonmigas Kaltim	26
Grafik I.44 Harga Batubara Acuan.....	27
Grafik I.45 Ekspor Batubara Kaltim	27
Grafik I.46 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor Luar Negeri	29
Grafik I.47 Perkembangan Impor Migas Kaltim	29
Grafik I.48 Perkembangan Harga Minyak Dunia.....	29
Grafik I.49 Perkembangan Impor Nonmigas Kaltim.....	30
Grafik I.50 Impor Barang Modal dan Bahan Baku Kaltim	30
Grafik I.51 Pangsa Pasar Ekspor Batubara Kaltim	32
Grafik I.52 Pertumbuhan Ekspor Batubara Kaltim	32
Grafik I.53 Target dan Realisasi Kunjungan Wisata Kabupaten Berau.....	35
Grafik I.54 Pangsa Akomodasi Kepulauan Derawan Berdasarkan Jenisnya	35
Grafik I.55 Profil Responden Berdasarkan Umur	38
Grafik I.56 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	38
Grafik I.57 Profil Responden Berdasarkan Tujuan	39
Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim	41
Grafik II.2 Komponen Realisasi PAD APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2017	42
Grafik II.3 Komponen Realisasi PAD APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2018	42
Grafik II.4 Derajat Otonomi Fiskal Kalimantan Timur (Berdasarkan Anggaran s.d Tahun 2019).....	42
Grafik II.5 Derajat Otonomi Fiskal Kalimantan Timur (Berdasarkan Realisasi s.d. Tahun 2018).....	42
Grafik II.6 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wialyah Kalimantan Timur (Berdasarkan Realisasi s.d. Tahun 2018)	43
Grafik II.7 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wialyah Kalimantan Timur (Berdasarkan Anggaran Tahun 2019)	43
Grafik II.8 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim	45
Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional.....	50
Grafik III.2 Perbandingan Inflasi di Kalimantan.....	50
Grafik III.3 Kenaikan Harga BBM Kaltim per Okt 2018.....	52
Grafik III.4 Arus Penumpang Bandara Sepinggian Balikpapan.....	55
Grafik III.5 Pergerakan Tekanan Inflasi IHK Kaltim dan Inflasi Angkutan Udara 2016-2018 (%yoy).....	67
Grafik III.6 Pergerakan Harga Avtur Internasional 2016-2018 (%yoy).....	67
Grafik III.7 Pergerakan Rata-Rata Harga Minyak Dunia	68
Grafik III.8 Pergerakan Kurs Rupiah terhadap USD	68
Grafik III.9 Load Factor Indonesia	69
Grafik III.10 Load Factor Global-Indonesia.....	69
Grafik III.11 Arus Penumpang di Bandara Sepinggian Balikpapan.....	70
Grafik III.12 Jumlah Pesawat dan Rata-Rata Penumpang per Pesawat Keberangkatan di Bandara Sepinggian Balikpapan	70
Grafik III.13 Harga Tiket Maskapai Rute BPN-JKT dan BPN-SBY.....	70
Grafik IV.1 Perkembangan Harga Komoditas Batubara	72
Grafik IV.2 Perkembangan Harga Komoditas CPO	72

Grafik IV.3 Nilai Ekspor Batubara Kaltim.....	73
Grafik IV.4 Nilai Ekspor CPO Kaltim.....	73
Grafik IV.5 Pangsa Impor Kaltim Triwulan IV 2018	73
Grafik IV.6 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah, Impor Bahan Baku dan Barang Modal Triwulan IV 2018.....	73
Grafik IV.7 Tren <i>Asset Turnover</i>	75
Grafik IV.8 Tren <i>Inventory Turnover</i>	75
Grafik IV.9 Tren <i>Return on Asset (ROA)</i> dan <i>Return on Equity (ROE)</i>	75
Grafik IV.10 <i>Debt to Service Ratio</i> dan <i>Solvability</i> Korporasi Sektor Pertambangan	75
Grafik IV.11 <i>Current Ratio</i> dan <i>Quick Ratio</i> Korporasi Sektor Pertambangan	76
Grafik IV.12 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim	77
Grafik IV.13 Komposisi DPK Korporasi Kaltim	77
Grafik IV.14 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim	78
Grafik IV.15 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	78
Grafik IV.16 Indeks Tendensi Konsumen.....	78
Grafik IV.17 Proporsi Belanja Rumah Tangga	78
Grafik IV.18 Indeks Keyakinan Konsumen.....	79
Grafik IV.19 Indeks Kondisi Ekonomi	79
Grafik IV.20 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim.....	80
Grafik IV.21 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenisnya.....	80
Grafik IV.22 Perkembangan DPK RT Kaltim.....	80
Grafik IV.23 Komposisi DPK RT Kaltim.....	80
Grafik IV.24 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional.....	81
Grafik IV.25 Komposisi DPK Kaltim.....	81
Grafik IV.26 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Debitur.....	82
Grafik IV.27 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional.....	82
Grafik IV.28 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	82
Grafik IV.29 Komposisi Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaan	83
Grafik IV.30 Komposisi Kredit Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	83
Grafik IV.31 Perkembangan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	83
Grafik IV.32 Komposisi Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	83
Grafik IV.33 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim	84
Grafik IV.34 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim.....	84
Grafik IV.35 Perkembangan Risiko Kredit	85
Grafik IV.36 Risiko Kredit per Jenis Penggunaan.....	85
Grafik IV.37 Risiko Kredit per Sektor Ekonomi.....	85
Grafik IV.38 Risiko Kredit Spasial.....	85
Grafik IV.39 Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Syariah	86
Grafik IV.40 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim	86
Grafik IV.41 Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltim	86
Grafik IV.42 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan	87
Grafik IV.43 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	87
Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Non Tunai Kalimantan Timur.....	89

Grafik V.2 Transaksi Non Tunai Kalimantan Timur Triwulan IV 2018 Berdasarkan Instrumennya	89
Grafik V.3 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kalimantan Timur	89
Grafik V.4 Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kalimantan Timur	89
Grafik V.5 Pengedaran Uang Kartal Kalimantan Timur	91
Grafik V.6 Uang Kartal Kalimantan Timur – Spasial	91
Grafik V.7 Penarikan Uang Tidak Layak Edar Kalimantan Timur	91
Grafik V.8 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap <i>Inflow</i> Kalimantan Timur	91
Grafik VI.1 Perbandingan TPT Berdasarkan Provinsi.....	98
Grafik VI.2 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur.....	100
Grafik VI.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim.....	103
Grafik VI.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim Berdasarkan Komponen	103
Grafik VI.5 Gini Rasio Kalimantan.....	103
Grafik VI.6 Upah Minimum Provinsi Kaltim	104
Grafik VI.7 Upah Minimum Kaltim	104
Grafik VII.1 Ekspektasi Harga 3 dan 6 bulan ke depan.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Regional.....	3
Gambar I.2 Profil Industri Batubara India	33
Gambar III.1 Sebaran Inflasi Kawasan Timur Indonesia Triwulan IV 2018 Berdasarkan Provinsi (% yoy).....	51
Gambar III.2 Global Flight Price Ranking.....	69

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Komponen PDRB	2015	2016	2017					2018				
	TOTAL %yoy	TOTAL %yoy	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy	TOTAL %yoy	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy	TOTAL %yoy
PDRB TOTAL	-1.20	-0.38	3.87	3.60	3.47	1.62	3.13	1.77	1.92	1.83	5.14	2.67
Berdasarkan Lapangan Usaha												
Pertanian	4.55	0.46	6.89	4.99	4.97	6.40	5.81	5.83	6.39	7.11	5.74	6.27
Pertambangan	-4.89	-3.52	2.49	2.81	1.41	-1.81	1.21	-1.28	-0.56	-0.49	6.84	1.11
Industri Pengolahan	2.66	5.46	6.79	2.56	3.97	0.72	3.47	1.44	0.40	0.16	0.10	0.52
Listrik dan Gas	30.43	8.32	5.33	3.62	8.01	10.02	6.78	12.38	11.31	9.19	6.51	9.76
Air	2.56	6.57	9.11	8.92	8.83	9.34	9.05	5.68	2.96	2.30	3.83	3.67
Konstruksi	-0.94	-3.86	2.46	7.13	6.51	9.45	6.42	4.52	4.46	10.09	10.01	7.37
Perdagangan	1.42	3.20	5.39	8.04	8.53	9.55	7.90	9.88	9.90	5.13	5.06	7.44
Transportasi dan Pergudangan	2.76	3.05	4.18	6.97	7.54	9.47	7.06	9.31	9.57	4.33	2.47	6.34
Akomodasi dan Makan Minum	7.74	6.79	8.11	8.97	9.96	9.59	9.17	9.97	12.13	7.45	7.20	9.14
Informasi dan Komunikasi	7.66	7.45	7.61	8.95	9.09	9.23	8.73	7.88	4.39	4.27	3.78	5.04
Jasa Keuangan	2.05	1.84	-1.29	-0.45	-0.02	-0.74	-0.62	2.98	2.99	4.61	6.93	4.37
Real Estate	3.59	-0.83	0.04	3.01	4.29	6.10	3.35	6.96	6.59	3.53	2.35	4.83
Jasa Perusahaan	-3.75	-4.25	0.74	3.92	5.07	4.45	3.54	7.51	9.56	1.32	1.64	4.96
Adm. Pemerintahan	3.64	-3.27	-5.54	-5.67	4.22	6.04	-0.37	6.84	2.56	0.37	1.44	2.70
Jasa Pendidikan	9.88	7.06	6.49	6.85	7.35	8.34	7.27	8.88	9.15	6.06	5.93	7.47
Jasa Kesehatan dan Sosial	10.53	9.31	8.43	6.41	6.97	6.90	7.16	7.97	8.87	7.90	7.48	8.05
Jasa lainnya	8.81	7.81	6.54	7.50	6.23	5.52	6.44	6.76	9.84	9.69	9.73	9.02
Berdasarkan Pengeluaran												
Konsumsi Rumah Tangga	1.46	1.56	1.83	2.49	2.83	2.73	2.47	2.34	2.77	2.71	3.42	2.81
Konsumsi LNPRT	8.30	-4.04	6.32	4.26	4.55	4.49	4.89	9.51	7.23	12.47	8.56	9.41
Konsumsi Pemerintah	-4.93	-13.03	17.38	-0.56	-9.50	-28.07	-12.14	3.04	-1.23	17.60	11.76	8.21
PMTB	-1.47	-6.04	2.28	-0.14	-0.37	9.18	2.75	5.07	16.64	2.19	6.83	7.54
Perubahan Inventori	-35.89	-65.19	-1.74	-5.14	-19.84	-37.96	-15.85	-32.30	-27.06	-8.53	24.06	-15.13
Ekspor Luar Negeri	-16.07	-9.88	3.31	1.74	3.81	1.38	2.55	-6.03	-4.35	-3.01	-1.39	-3.71
Impor Luar Negeri	3.49	-12.70	-0.95	4.60	0.10	6.21	2.51	19.67	2.27	8.23	8.03	9.39
Net Ekspor Antar Daerah	222.87	32.54	3.80	14.81	6.88	4.75	7.51	29.76	1.33	13.83	21.04	16.15

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

EKSPOR DAN IMPOR

Ekspor dan Impor	2015	2016	2017					2018				
	TOTAL %yoy	TOTAL %yoy	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy	TOTAL %yoy	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy	TOTAL %yoy
EKSPOR TOTAL	-32.31	-20.50	29.24	26.28	31.63	19.50	26.31	6.16	9.11	3.73	1.52	4.98
Ekspor Migas	-40.65	-41.37	1.87	6.98	23.10	20.05	12.45	-24.79	-13.88	-29.41	-18.74	-21.81
Ekspor Nonmigas	-26.21	-8.23	42.08	33.94	34.64	19.33	31.53	16.56	16.39	14.40	7.83	13.59
TOTAL IMPOR	-34.99	-32.59	-23.53	-19.24	-15.25	4.82	-12.98	72.35	26.37	49.82	31.38	43.06
Impor Migas	-40.16	-36.83	-22.79	-13.75	-16.10	22.45	-8.05	76.18	13.81	46.45	19.11	35.95
Impor Nonmigas	-12.06	-19.79	-25.39	-31.72	-12.53	-26.88	-24.68	62.52	62.40	60.19	68.75	63.74

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

INFLASI

Inflasi	2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
IHK UMUM	4.94	4.37	3.69	3.39	3.89	4.54	3.65	3.15	2.59	2.60	3.61	3.24
Bahan Makanan	8.00	5.60	2.51	1.50	0.61	1.38	1.10	-0.24	2.34	5.46	4.53	3.31
Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau	8.00	8.31	7.00	5.31	4.17	2.86	3.30	3.11	2.68	3.19	2.47	2.93
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BB	1.70	1.46	1.77	2.18	4.01	6.09	6.11	5.51	3.97	2.08	2.81	2.64
Sandang	2.07	2.61	2.70	2.63	2.12	2.01	2.18	2.77	3.48	2.59	2.72	2.78
Kesehatan	4.93	5.31	4.83	5.10	4.85	3.81	3.34	2.74	2.43	3.49	2.94	3.24
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3.82	3.79	3.42	2.71	2.41	2.40	2.43	2.24	2.28	2.17	3.81	3.97
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	4.35	3.58	4.52	5.29	8.14	9.82	4.51	4.12	0.57	-0.63	5.44	4.28
IHK Samarinda	5.09	4.24	3.53	2.83	3.27	4.30	4.31	3.69	2.85	2.63	3.35	3.32
IHK Balikpapan	4.75	4.55	3.90	4.13	4.69	4.86	2.79	2.45	2.24	2.55	3.94	3.13

**)Sejak tahun 2016, inflasi Kaltim tidak lagi memperhitungkan inflasi Kota Tarakan*

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran	2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
DPK dan ASET												
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	-3.10	-5.47	-11.08	0.85	3.46	0.76	6.21	5.33	4.91	5.26	8.94	13.88
Giro	-11.83	-11.47	-22.84	-0.97	4.97	-12.62	6.28	8.22	2.92	0.26	12.19	17.60
Tabungan	4.13	9.34	4.23	2.39	2.81	0.43	4.22	6.17	10.92	10.55	12.89	10.00
Deposito	-6.04	-17.33	-19.62	-0.25	3.40	10.87	8.80	2.36	-1.62	1.29	2.14	17.42
Aset	-5.46	-10.78	-14.81	-0.97	1.29	2.25	8.69	4.11	5.99	4.18	5.53	11.74
KREDIT												
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	0.01	2.97	1.24	2.05	3.82	-0.35	-2.46	-5.44	-0.02	5.67	9.80	16.72
Non Performing Loans (Lokasi Proyek)	5.18	6.46	7.01	6.54	7.04	8.01	7.80	5.89	5.61	5.14	5.49	4.61
Berdasarkan Jenis Penggunaan												
Modal Kerja	-3.24	0.99	-0.10	6.92	7.58	1.06	2.19	2.95	12.24	16.00	17.57	21.99
Investasi	0.94	4.50	2.18	-1.60	1.36	-3.58	-9.27	-16.85	-11.36	-1.88	5.65	19.12
Konsumsi	2.69	2.83	1.28	3.16	3.89	4.17	4.82	5.80	5.93	5.42	6.21	5.67
Berdasarkan Sektor Ekonomi												
Pertanian dan Kehutanan	6.18	8.75	13.16	9.90	20.75	19.91	14.99	-0.12	-9.30	-7.99	-11.22	9.98
Perikanan	-10.13	-4.87	-3.13	28.37	11.85	26.44	36.41	11.60	51.20	35.25	28.23	14.97
Pertambangan	-23.89	-12.38	-14.90	-2.58	-14.32	-25.11	-25.16	-33.82	19.34	48.06	71.91	83.55
Industri Pengolahan	17.39	16.45	15.18	-1.22	3.62	-0.86	-11.81	-14.20	-16.65	-13.87	-3.30	10.32
Listrik, Gas dan Air	53.09	11.97	6.34	-8.16	3.36	-9.03	-27.36	-19.62	32.86	72.31	129.82	130.08
Konstruksi	5.99	6.82	2.69	0.55	0.82	-5.73	-2.70	11.60	9.94	18.90	22.57	22.78
Perdagangan Besar dan Eceran	2.37	6.96	1.11	5.02	7.94	-1.92	-0.16	2.93	-0.75	5.84	4.55	-0.09
Akomodasi dan Makan Minum	47.59	40.33	25.41	-5.59	-11.65	-14.98	-12.40	1.11	-3.71	-0.49	-2.32	0.58
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	-9.76	-2.42	-3.90	-3.77	-4.93	-4.53	-11.69	-15.74	-1.10	2.41	8.13	12.54
Jasa Keuangan	4.73	-29.71	-31.88	-26.99	-39.83	-28.75	-23.39	-24.47	-3.71	0.66	21.03	36.44
Real Estate dan Jasa Perusahaan	-21.08	-12.13	-17.00	1.71	2.88	-3.51	-3.93	-4.76	-6.41	-0.14	5.76	6.89
Administrasi Pemerintahan	9.77	-6.38	-12.68	-10.59	5.43	12.24	20.23	24.98	3.59	7.09	79.84	168.86
Jasa Pendidikan	90.10	63.52	56.77	42.01	28.67	22.63	27.67	26.98	7.96	-1.69	-10.33	-12.22
Jasa Kesehatan dan Sosial	-11.99	-4.63	-10.83	3.54	9.32	8.27	20.42	18.43	17.88	16.44	22.16	23.82
Jasa Kemasyarakatan	-11.39	-12.21	-5.64	19.28	14.46	-0.69	5.88	-26.89	-13.73	2.58	-4.21	14.26
Jasa Perorangan	43.39	35.38	21.44	6.95	4.81	2.46	2.60	5.37	-0.89	-9.45	-14.04	-18.31
Badan Internasional	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lainnya	-54.18	-44.24	-71.37	-65.15	-59.01	10.17	220.13	205.54	330.51	-16.22	-35.33	-38.01
Rumah Tangga	2.69	2.83	1.28	3.16	3.89	4.17	4.82	5.80	5.93	5.42	6.21	5.67
SISTEM PEMBAYARAN												
Inflow	-3.42	16.37	27.07	32.05	-6.71	-5.99	7.82	6.20	-6.83	117.56	-26.22	18.62
Outflow	-2.18	39.05	-32.22	-20.36	54.76	12.53	-14.81	2.03	-4.09	6.24	17.71	11.75
RTGS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-7.65	41.59	15.76	-22.39	-0.54	-33.96	-19.80	37.61
Kliring	73.72	90.38	41.55	6.76	-21.98	-33.16	-3.52	-3.65	-1.07	10.03	10.60	3.67

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FEBRUARI 2019

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh positif, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi lapangan usaha tambang sejalan dengan upaya pemenuhan target produksi oleh produsen batubara menjadi pendorong utama ekonomi Kaltim periode ini. Di sisi lapangan usaha, percepatan kinerja investasi bersumber dari ekspansi perusahaan tambang untuk pemenuhan target produksi dan peningkatan kuota produksi oleh beberapa pelaku usaha.

Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2018 tumbuh 5,14% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% (yoy). Di sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh akselerasi lapangan usaha tambang. Optimalisasi produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang batubara untuk mencapai target 2018 menjadi pendorong pertumbuhan utama lapangan usaha ini. Kinerja lapangan usaha lainnya, konstruksi tercatat sedikit melambat sejalan dengan mulai berakhirnya pengerjaan proyek infrastruktur daerah. Di sisi pengeluaran, investasi (PMTB) menjadi penggerak utama ekonomi Kaltim. Peningkatan investasi terjadi pada investasi dalam negeri, khususnya sektor tambang. Kondisi tersebut sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan perusahaan tambang untuk meningkatkan produksi. Disamping itu, terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan kuota produksi, semakin mendorong investasi tambang.

Secara tahunan, selama 2018 ekonomi Kaltim tumbuh positif tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Tercatat perekonomian Kaltim tahun 2018 tumbuh sebesar 2,67% (yoy), searah dengan proyeksi Bank Indonesia tetapi lebih rendah dibandingkan 3,13% (yoy) tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding 2017 dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha pertambangan yang mengalami kontraksi pada triwulan I, II dan III 2018 akibat tingginya curah hujan sehingga menghambat aktivitas pertambangan.

Pada triwulan I 2019, ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh dalam rentang 2,15%-3,15% (yoy). Lapangan usaha perdagangan dan akomodasi makan-minum diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan masuknya periode pileg dan pilpres. Namun demikian, kinerja lapangan usaha utama, pertambangan diperkirakan melambat sejalan dengan cuaca yang berisiko mengganggu aktivitas tambang dan *barging*. Industri pengolahan juga diperkirakan masih tumbuh rendah sejalan belum berdampak investasi di lapangan hulu gas. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih lambat karena masuknya periode normalisasi paska HBKN. Investasi dan konsumsi pemerintah juga diperkirakan lebih lambat sejalan dengan belum optimalnya pengerjaan proyek fisik pemerintah pada triwulan I 2019.

Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penyerapan APBD didorong oleh naiknya belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di sepanjang tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp10,24 triliun atau 106,77% dari target penerimaan tahun 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan meningkat 37,40% (yoy). Faktor utama meningkatnya pendapatan daerah Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2018 adalah kenaikan pendapatan transfer yang tercatat meningkat sebesar 61,73% (yoy). Di sisi lain, Realisasi belanja Pemprov Kaltim tahun 2018 tercatat Rp9,09 triliun atau 89,84% dari pagu anggaran tahun 2018. Pada tahun 2017, realisasi belanja Pemprov Kaltim tercatat lebih rendah, sebesar Rp8,24 triliun atau 93,26% dari total pagu anggaran tahun 2017.

Sementara itu, realisasi belanja di 10 kabupaten/kota di wilayah Kaltim sepanjang 2018 mencapai Rp20,96 triliun atau 82,58% dari pagu belanja tahun 2018. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar Rp3,64 triliun dibandingkan tahun 2017 yang tercatat Rp 17,32 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kaltim sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,02% (yoy). Peningkatan realisasi belanja tertinggi dialami oleh Pemkab PPU yang meningkat sebesar 45,92% (yoy). Peningkatan tersebut disusul oleh Pemkab Kutim sebesar 38,04% (yoy), Pemkab Mahulu sebesar 34,64% (yoy) dan Pemkab Kubar sebesar 29,98% (yoy). Kab. Kukar adalah daerah yang realisasi belanja terendah pada triwulan IV 2018 sebesar 6,30% (yoy).

Pada tahun 2019, kemampuan fiskal Kaltim yang tercermin dari APBD mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Tercatat pagu belanja Pemprov Kaltim tahun 2019 sebesar Rp10,67 triliun atau meningkat 5,34% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, pagu belanja pemkot/pemkab di wilayah Kaltim tahun 2019 tercatat Rp25,93 triliun atau tumbuh 2,14% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Kalimantan Timur triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan besaran yang relatif terkendali, sesuai dengan sasaran inflasi Nasional tahun 2018.

Tekanan inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap stabil dan terkendali. Inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat 3,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 3,61% (yoy). Di sisi lain, capaian inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang mengalami peningkatan dari 2,88% (yoy) di triwulan III 2018 menjadi 3,13% (yoy). Secara regional, inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 3,47% (yoy) dan inflasi Kawasan Timur Indonesia

(KTI) sebesar 3,58% (yoy). Inflasi Kaltim triwulan IV 2018 merupakan termasuk kedalam 8 provinsi dengan inflasi terendah dari 18 provinsi di wilayah KTI setelah Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat

Penurunan tekanan inflasi Kaltim triwulan IV 2018 utamanya dipengaruhi oleh kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan triwulan IV 2018 tercatat sebesar 4,28% (yoy), cenderung lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang mencapai 5,44% (yoy). Adapun penurunan tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan didorong oleh normalisasi tarif angkutan udara setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan banyaknya penambahan tenaga kerja sementara yang berasal di luar Kaltim yang bertujuan untuk memenuhi target produksi di semester II 2018 serta kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan oleh beberapa maskapai untuk mengkompensasi kerugian biaya operasional di beberapa bulan sebelumnya. Namun penurunan yang lebih dalam mampu tertahan oleh meningkatnya inflasi bensin dikarenakan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamina Series, Dex Series, serta Solar dan Minyak Tanah non subsidi pada bulan Oktober 2018.

Sepanjang tahun 2018, inflasi Kaltim tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi Kaltim tahun 2018 tercatat sebesar 3,24% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi Kaltim tahun 2017 sebesar 3,15% (yoy), dimana hal tersebut utamanya disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan setelah pada tahun 2017 mengalami deflasi. Lebih lanjut, peningkatan tekanan inflasi bahan makanan Kaltim 2018 umumnya didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras yang mengalami inflasi sebesar 12,06% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,16% (yoy) terhadap pembentukan inflasi Kaltim.

Tekanan inflasi Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan kembali mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada pada rentang 3,40%-3,60% (yoy). Pada Januari 2019, Kaltim tercatat mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2018 sebesar 0,54% (mtm). Sampai dengan Januari 2018, inflasi Kaltim tercatat 0,56% (ytd) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,50% (yoy). Risiko inflasi Kaltim triwulan I 2019 utamanya bersumber dari kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh beberapa komoditas pangan yang mulai mengalami peningkatan harga semenjak Januari 2019 seiring dengan meningkatnya permintaan ditengah mulai masuknya periode tanam beberapa komoditas pangan.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang meningkat pada triwulan IV 2018 memberi dampak positif terhadap stabilitas keuangan daerah dengan level risiko yang masih terjaga. Secara sektoral, hampir semua sektor menunjukkan kinerja positif. Sektor rumah tangga mengalami peningkatan kinerja tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang meningkat. Sementara sektor perbankan menunjukkan perbaikan kinerja seiring dengan peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Namun sektor korporasi sedikit mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kinerja komoditas batubara Kaltim.

Kinerja korporasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2018 cenderung mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh perkembangan eksternal. Risiko pelemahan nilai tukar rupiah akibat dari ketidakpastian ekonomi global, terutama kebijakan Amerika Serikat untuk meningkatkan *Fed Funding Rate* (FFR) serta harga komoditas yang mengalami perlambatan cukup memberi tekanan pada kinerja korporasi. Lebih lanjut, intensitas tingkat kerentanan eksternal pada triwulan IV 2018 cenderung meningkat seiring dengan masih tingginya tensi dagang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak terhadap pelemahan nilai tukar di sejumlah negara *emerging market*.

Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada debitur Rumah Tangga (RT) mengalami perlambatan pada triwulan IV 2018. Laju pertumbuhan di triwulan IV 2018 tercatat sebesar 5,67% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,21%. Perlambatan laju pertumbuhan kredit RT Kaltim triwulan IV 2018 lebih disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit properti dan multiguna yang masing-masing melambat dari 5,05% (yoy) menjadi 3,64% (yoy) dan 9,03% (yoy) menjadi 7,95% (yoy).

Kinerja DPK Kaltim di triwulan IV 2018 mengalami pertumbuhan positif. Pada periode laporan, DPK tumbuh sebesar 13,88% (yoy), meningkat dari 8,94% (yoy) di triwulan sebelumnya. Arah pertumbuhan DPK Kaltim pada periode laporan ini berbeda dengan arah pertumbuhan DPK nasional yang cenderung melambat dari triwulan sebelumnya dimana pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 6,50%. Berdasarkan jenis simpanan, peningkatan kinerja DPK disebabkan oleh peningkatan pangsa DPK dalam bentuk tabungan dari 46,34% pada triwulan III 2018 menjadi 46,59% pada triwulan IV 2018 dan Giro dari 20,46% pada triwulan III 2018 menjadi 20,76% pada triwulan IV 2018. Sementara itu, kredit tumbuh positif pada triwulan IV 2018 sebesar 16,72% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 9,80% (yoy). Tren pertumbuhan kredit Kaltim pada periode pelaporan ini berbeda arah dengan pertumbuhan kredit nasional yang tumbuh sebesar 11,75% (yoy). Kinerja kredit Kaltim yang tumbuh positif pada triwulan IV 2018 ini dipengaruhi oleh kredit investasi dan modal kerja yang mendominasi penyaluran kredit Kaltim dengan peningkatan masing-masing sebesar 5,65% (yoy) dan 17,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 19,12% (yoy) dan 21,99% (yoy) pada periode pelaporan.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit umum, kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kaltim masih menunjukkan pertumbuhan positif. Kredit UMKM Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 8,23% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,14% (yoy). Kredit UMKM memiliki pangsa sebesar 21,19% dari

total kredit Kaltim pada triwulan IV 2018, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang memiliki pangsa 20,55%. Namun demikian, pergerakan pangsa kredit UMKM di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan IV 2018 aliran uang di Kalimantan Timur mencatatkan transaksi net outflow sebesar Rp5,06 triliun atau turun 11,75% (yoy), sedangkan transaksi non tunai mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sesuai dengan pola seasonal-nya. Sementara itu, elektronifikasi transaksi keuangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai terus mengalami perkembangan positif.

Secara nominal, transaksi non tunai Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mengalami kenaikan apabila dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, jumlah transaksi non tunai Kalimantan Timur mencapai Rp 20,46 triliun dengan volume sebesar 299,8 ribu transaksi. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III 2018 yang mencapai Rp 17,57 triliun dengan volume sebesar 297,49 ribu transaksi. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi non tunai Kalimantan Timur triwulan IV 2018 tumbuh positif sebesar 18,29% (yoy). Berdasarkan jenis instrumennya, transaksi non tunai Kalimantan Timur triwulan IV 2018 didominasi oleh transaksi yang menggunakan SKNBI senilai Rp10,2 triliun. Selanjutnya, transaksi RTGS Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan selama triwulan IV 2018, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Transaksi RTGS Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mengalami kenaikan dengan nominal sebesar Rp10,25 triliun, meningkat signifikan sebesar 37,61% (yoy), dibandingkan triwulan III 2018 dengan nominal sebesar Rp7,41 triliun atau terkontraksi -19,8% (yoy).

Sementara itu, pada triwulan IV 2018, Kalimantan Timur mengalami *net outflow*. Sesuai pola *seasonal-nya*, jumlah transaksi tunai di wilayah Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. Secara nominal, nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) di wilayah Kalimantan Timur mencapai Rp5,06 triliun pada triwulan IV 2018 atau turun 11,75% (yoy). Sementara itu, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) sebesar Rp2,36 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 18,62% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik V.5). Dengan demikian, pada triwulan IV 2018 transaksi tunai di Kalimantan Timur berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp2,7 triliun.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mengalami perbaikan yang tercermin dari naiknya beberapa indikator ketenagakerjaan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan Kaltim yang tercermin perkembangan

Jumlah angkatan kerja Kaltim tahun 2018 tercatat sebanyak 1,73 juta jiwa, mengalami kenaikan sebesar 4,69% (yoy) atau terjadi penambahan sebesar 77,63 ribu jiwa dibandingkan jumlah angkatan kerja tahun 2017 yang tercatat sebanyak 1,54 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat sebesar 5,04% (yoy) atau bertambah sebanyak 77,61 ribu jiwa dibandingkan tahun 2017 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 tercatat 64,99% atau naik dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 63,75%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi

nilai tukar petani masih mengalami penurunan.

dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 tercatat 6,60% atau sebanyak 114,31 ribu jiwa, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 6,91%.

Jumlah penduduk miskin di Kaltim tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah perkotaan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, dari 102,39 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 108,34 ribu jiwa atau naik 5,81% (yoy). Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan dari 116,28 ribu jiwa di tahun 2017 menjadi 114,05 ribu jiwa pada tahun 2018 atau turun -1,92% (yoy). Sementara itu, tingkat kemiskinan Kaltim tahun 2018 mengalami penurunan dari 6,08% pada tahun 2017 menjadi 6,06%. Lebih lanjut, Nilai Tukar Pertani (NTP) Kaltim pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 94,81 atau lebih rendah dari pada triwulan sebelumnya yang tercatat 95,91.

Prospek Perekonomian Daerah

Peningkatan kinerja lapangan usaha utama dan pendukungnya diperkirakan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019. Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif dengan kecenderungan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 didorong oleh naiknya kinerja seluruh lapangan usaha utama Kaltim, terutama pertambangan. Produksi pertambangan nonmigas di triwulan II 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang didukung oleh peningkatan produksi seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, tingginya curah hujan akibat anomali cuaca berdampak pada terganggunya aktivitas pertambangan nonmigas Kaltim yang didominasi oleh pertambangan terbuka (*open pit*). Di sisi pengeluaran, kinerja ekspor luar negeri Kaltim diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan II 2019 sejalan dengan naiknya produksi lapangan usaha utama. Peningkatan permintaan batubara triwulan II 2019 diperkirakan bersumber dari India pasca tidak beroperasinya salah satu pembangkit listrik swasta terbesar di India pada periode Januari-April 2018. Lebih lanjut, sejak Desember 2018 batubara Indonesia berhasil melakukan penetrasian ke pasar Eropa. Berdasarkan hasil asesmen terhadap indikator-indikator makroekonomi di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,35-3,75% (yoy).

Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltim 2019 tetap tumbuh pada level positif dengan kecenderungan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim 2019 terutama didorong oleh naiknya aktivitas pada lapangan usaha konstruksi yang dipengaruhi oleh dimulainya pengerjaan konstruksi peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan. Lebih lanjut, penyelesaian proyek infrastruktur MYC pemerintah diperkirakan turut mendukung kinerja lapangan usaha ini. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan diperkirakan tetap tumbuh positif walaupun tidak sekuat tahun

sebelumnya. Kuota produksi batubara Indonesia tahun 2019 ditetapkan sebesar 480 juta mt atau lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2018 yang mencapai 528 juta mt. Selain itu, terdapat rencana pemotongan kuota produksi oleh pemerintah bagi pekausahaan pertambangan batubara jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga menjadi *downside risk* bagi kinerja lapangan usaha ini. Berdasarkan asesmen sampai dengan triwulan I 2019 dan beberapa indikator makro serta perkembangan ekonomi global terkini, ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,55-2,95% (yoy).

Inflasi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan bersumber dari normalisasi harga komoditas kelompok bahan makanan. Kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya diyakini mampu mendorong produksi komoditas pangan di wilayah Kaltim dan sentra produksi lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan peningkatan produktivitas pertanian melalui peningkatan alat mesin pertanian, penggunaan bibit unggul, optimalisasi metode tanam dan peningkatan jumlah irigasi. Berdasarkan asesmen terhadap risiko-risiko selama triwulan II 2019, inflasi Kaltim diperkirakan berada pada kisaran 3,07%-3,47% (yoy).

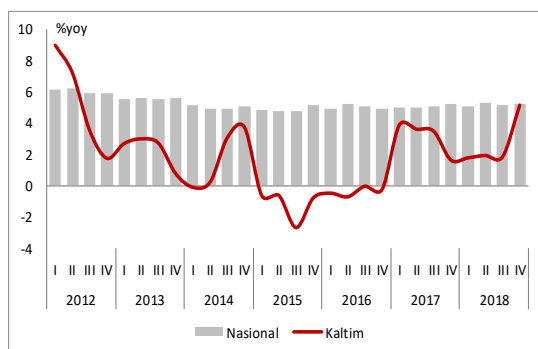
Secara tahunan, tekanan inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan optimisme masyarakat di tengah kondisi ekonomi Kaltim yang terus mengalami perbaikan menjadi *upside risk* bagi pembentukan inflasi Kaltim tahun 2019. Berdasarkan asesmen tersebut, inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,04%-3,44% (yoy), masih berada didalam target inflasi nasional sebesar 3,50±1% (yoy).

I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh akselerasi lapangan usaha pertambangan. Sementara di sisi pengeluaran, akselerasi PMTB khususnya di sektor pertambangan menjadi faktor utama pendorong ekonomi Kaltim.

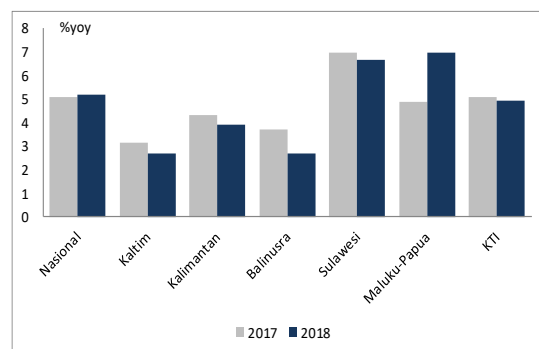
1.1 Gambaran Umum

Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kaltim tercatat tumbuh sebesar 5,14% (yoy), yang sekaligus merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak triwulan II 2012. Capaian ekonomi Kaltim periode ini sedikit lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,18% (yoy) (Grafik I.1).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim & Nasional



Sumber: BPS, diolah

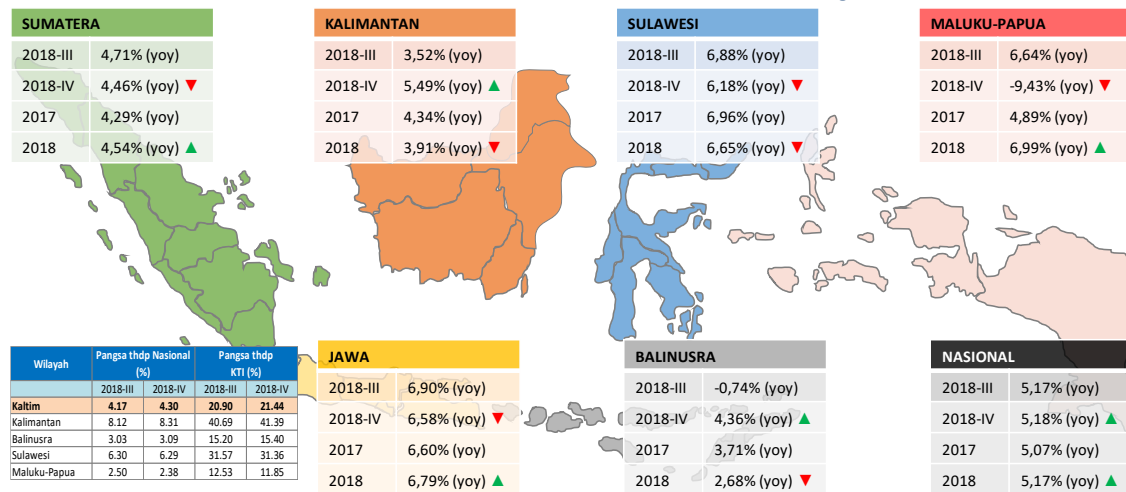
Grafik I.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional 2018

Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI)¹, meskipun masih lebih rendah dibandingkan ekonomi Kalimantan (Grafik I.2). Pada triwulan IV 2018, ekonomi wilayah KTI tumbuh sebesar 3,45% (yoy), lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Deselerasi yang terjadi di KTI bersumber dari kontraksi di wilayah Maluku-Papua yang disebabkan penurunan kinerja lapangan usaha tambang, khususnya tambang tembaga. Di Sulawesi, curah hujan tinggi berimbas pada gagal panen serta dampak gempa di Sulawesi Tengah menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pangasanya di KTI, ekonomi Kalimantan memiliki

¹Kawasan Timur Indonesia terdiri dari 18 (delapan belas provinsi) di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Balinusra dan Mapua

pangsa sebesar 41,39%, disusul oleh Sulawesi sebesar 31,36%, Balinusra sebesar 15,40%, Maluku-Papua sebesar 11,85% (Gambar I.1).

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Regional²



Sumber: BPS, diolah

Secara tahunan, selama 2018 ekonomi Kaltim tumbuh positif tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Tercatat perekonomian Kaltim tahun 2018 tumbuh sebesar 2,67% (yoy), searah dengan proyeksi Bank Indonesia tetapi lebih rendah dibandingkan 3,13% (yoy) tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding 2017 dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha pertambangan yang mengalami kontraksi pada triwulan I, II dan III 2018 akibat tingginya curah hujan sehingga menghambat aktivitas pertambangan.

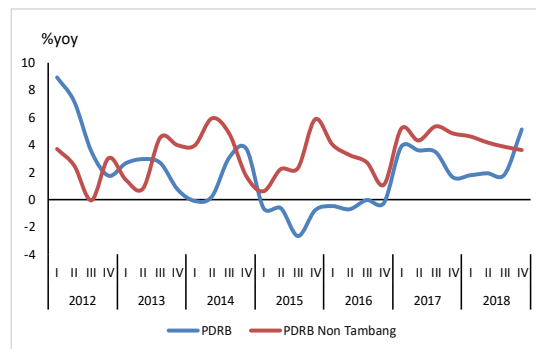
Ekonomi Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan melambat sejalan dengan pola musim hujan pada triwulan I yang berisiko menghambat aktivitas tambang. Di sektor sekunder, lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tumbuh lebih rendah sejalan dengan pasokan gas alam dari hulu migas yang masih terbatas. Lapangan usaha konstruksi juga diperkirakan tumbuh lebih rendah. Umumnya, belanja pemerintah daerah pada triwulan I belum terlalu optimal sehingga pengerjaan infrastruktur akan difokuskan pada proyek berskema tahun jamak (*Multi Years Contract*).

²Gambar I.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan regional, sedangkan tabel menunjukkan pangsa perekonomian regional terhadap ekonomi Nasional dan Kawasan Timur Indonesia.

Di sisi pengeluaran, investasi (PMTB) dan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh lebih lambat karena belanja modal yang belum optimal pada triwulan I 2019. Disamping itu, ekspor luar negeri diperkirakan masih mengalami kontraksi seiring harga komoditas yang melambat, terutama batubara dan Minyak Kelapa Sawit (CPO). Dengan demikian, ekonomi Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh dalam rentang 2,09%-3,09%.

Pertumbuhan ekonomi Non-Tambang

Ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 5,14% (yoy) didorong oleh lapangan usaha tambang. Namun demikian, kinerja lapangan usaha lainnya cukup terbatas sehingga pertumbuhan PDRB non-tambang tercatat hanya sebesar 3,64% (yoy). Capaian ekonomi non-tambang periode ini relatif lebih rendah dibandingkan periode lalu sebesar 3,87% (yoy) (Grafik I.3). Hampir seluruh lapangan usaha utama non-tambang mengalami perlambatan pada triwulan IV 2018 baik sektor sekunder ataupun tersier, terkecuali jasa keuangan.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Non-Tambang

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Ekonomi Kalimantan Timur triwulan IV 2018 didominasi oleh 4 lapangan usaha utama, yaitu pertambangan, industri pengolahan, konstruksi dan pertanian. Masing-masing lapangan usaha memiliki pangsa sebesar 46,73%, 17,91%, 9,05%, dan 7,52% (Tabel I.1). Dalam 5 tahun terakhir, pangsa lapangan usaha dalam ekonomi Kaltim tidak banyak mengalami perubahan terkecuali kontribusi lapangan usaha konstruksi yang menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 bersumber dari akselerasi lapangan usaha pertambangan. Optimisasi produksi batubara yang terkonsentrasi pada triwulan IV 2018 merupakan dampak dari produksi yang relatif terbatas pada tengah tahun pertama 2018. Disamping itu, penambahan kuota produksi batubara yang disetujui pada triwulan III 2018 turut mendorong produksi batubara pada triwulan berikutnya.

Namun demikian, kinerja lapangan usaha utama lainnya cenderung stagnan. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan melambat akibat masih terbatasnya pasokan gas mentah untuk bahan baku industri pengolahan gas. Lapangan usaha konstruksi juga sedikit melambat karena pengerjaan proyek infrastruktur daerah di wilayah Kaltim hampir selesai. Lapangan usaha perdagangan, transportasi, dan akomodasi makan-minum juga menunjukkan penurunan ditengah tingginya konsumsi periode HBKN.

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

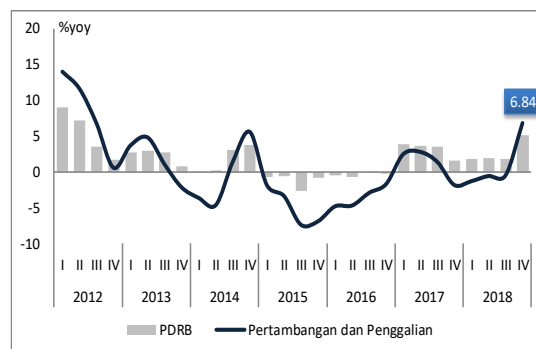
Berdasarkan Lapangan Usaha	2015	2016	2017					2018										
	TOTAL	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	andil	share*	yoy	andil	share*	
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.55	0.46	6.89	4.99	4.97	6.40	5.81	5.83	6.39	7.11	5.74	0.39	7.52	6.27	0.42	7.88		
Pertambangan dan Penggalian	-4.89	-3.52	2.49	2.81	1.41	-1.81	1.21	-1.28	-0.56	-0.49	6.84	3.20	46.73	1.11	0.53	46.35		
Industri Pengolahan	2.66	5.46	6.79	2.56	3.97	0.72	3.47	1.44	0.40	0.16	0.10	0.02	17.91	0.52	0.11	18.27		
Pengadaan Listrik, Gas	30.43	8.32	5.33	3.62	8.01	10.02	6.78	12.38	11.31	9.19	6.51	0.00	0.05	9.76	0.01	0.05		
Pengadaan Air	2.56	6.57	9.11	8.92	8.83	9.34	9.05	5.68	2.96	2.30	3.83	0.00	0.05	3.67	0.00	0.05		
Konstruksi	-0.94	-3.86	2.46	7.13	6.51	9.45	6.42	4.52	4.46	10.09	10.01	0.72	9.05	7.37	0.51	8.50		
Perdagangan Besar & Eceran	1.42	3.20	5.39	8.04	8.53	9.55	7.90	9.88	9.90	5.13	5.06	0.27	5.52	7.44	0.39	5.59		
Transportasi dan Pergudangan	2.76	3.05	4.18	6.97	7.54	9.47	7.06	9.31	9.57	4.33	2.47	0.07	3.61	6.34	0.19	3.69		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.74	6.79	8.11	8.97	9.96	9.59	9.17	9.97	12.13	7.45	7.20	0.06	0.96	9.14	0.08	0.97		
Informasi dan Komunikasi	7.66	7.45	7.61	8.95	9.09	9.23	8.73	7.88	4.39	4.27	3.78	0.06	1.25	5.04	0.08	1.25		
Jasa Keuangan	2.05	1.84	-1.29	-0.45	-0.02	-0.74	-0.62	2.98	2.99	4.61	6.93	0.10	1.52	4.37	0.06	1.53		
Real Estate	3.59	-0.83	0.04	3.01	4.29	6.10	3.35	6.96	6.59	3.53	2.35	0.02	0.86	4.83	0.04	0.88		
Jasa Perusahaan	-3.75	-4.25	0.74	3.92	5.07	4.45	3.54	7.51	9.56	1.32	1.64	0.00	0.20	4.96	0.01	0.20		
Administrasi Pemerintahan	3.64	-3.27	-5.54	-5.67	4.22	6.04	-0.37	6.84	2.56	0.37	1.44	0.03	1.96	2.70	0.05	1.98		
Jasa Pendidikan	9.88	7.06	6.49	6.85	7.35	8.34	7.27	8.88	9.15	6.06	5.93	0.09	1.58	7.47	0.10	1.59		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.53	9.31	8.43	6.41	6.97	6.90	7.16	7.97	8.87	7.90	7.48	0.04	0.61	8.05	0.04	0.61		
Jasa lainnya	8.81	7.81	6.54	7.50	6.23	5.52	6.44	6.76	9.84	9.69	9.73	0.05	0.63	9.02	0.05	0.63		
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.20	-0.38	3.87	3.60	3.47	1.62	3.13	1.77	1.92	1.83	5.14	5.14	100.00	2.67	2.67	100.00		

*pangsa diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber: BPS, diolah

Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kaltim pada triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh sebesar 6,84% (yoy) yang sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 6 tahun terakhir (Grafik I.4). Pangsa lapangan usaha pertambangan mencapai 46,73% sehingga memberikan andil sebesar 3,20% terhadap ekonomi Kaltim triwulan IV 2018.



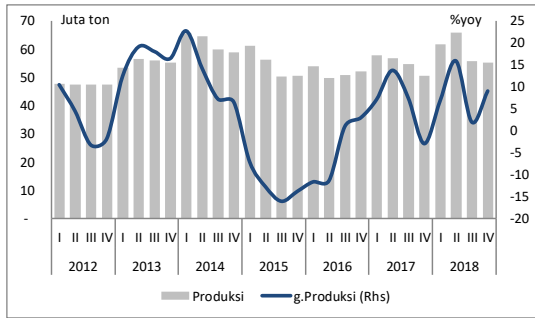
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Pertambangan

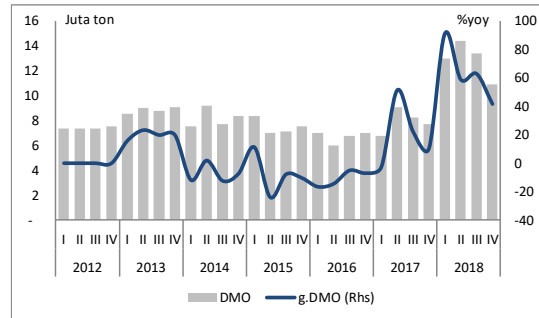
Akselerasi lapangan usaha tambang bersumber dari optimalisasi produksi yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara di Kaltim. Pada semester I 2018, produksi batubara cukup terganggu oleh cuaca. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan proses penggalian tambang ditunda untuk meminimalisir *fatality*. Lebih lanjut, cuaca buruk mengganggu proses distribusi batubara yang umumnya menggunakan *dumpruck* dari lokasi galian. Produksi yang rendah pada Semester I 2018 ditengah target tahunan Indonesia yang lebih tinggi menuntut pelaku usaha pertambangan untuk melakukan peningkatan produksi pada Semester II 2018. Selain faktor cuaca yang lebih mendukung pada Semester II 2018, penambahan kuota ekspor batubara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mendorong peningkatan produksi batubara di Kaltim. Kementerian ESDM menyetujui penambahan kuota produksi oleh 32 perusahaan, di mana 18 perusahaan memiliki *site* di Kalimantan Timur. Izin penambahan kuota produksi yang disetujui pada bulan September 2018 menyebabkan produksi terkonsentrasi pada triwulan IV 2018.

Berdasarkan data IHS Energy periode Februari 2019, produksi batubara Kaltim triwulan IV 2018 mencapai 55,2 juta ton atau meningkat sebesar 9,06% (yoy). Peningkatan produksi tersebut terutama berasal dari perusahaan PKB2B . Volume produksi perusahaan PKP2B pada triwulan IV 2018 tercatat 43,2 juta ton, dan 88,9 juta ton pada semester II 2018. Capaian produksi perusahaan PKP2B semester II 2018 lebih tinggi dibandingkan 83,3 Juta Ton pada semester sebelumnya sehingga optimalisasi produksi terjadi pada pertengahan tahun kedua (Grafik I.5). Di sisi ekspor, volume ekspor batubara triwulan IV 2018 tercatat tumbuh sebesar 10,53% (yoy). Adapun peningkatan pertumbuhan tertinggi adalah ekspor ke Tiongkok di mana pada triwulan IV 2018 ekspor Kaltim ke Tiongkok tumbuh sebesar 26,79% (yoy). Peningkatan ekspor ke Tiongkok disebabkan oleh rencana penutupan impor batubara pada akhir tahun 2018, sehingga *buyers* mendorong impor pada Oktober 2018.

Penguatan lapangan usaha tambang Kaltim juga didukung oleh penjualan domestik (*Domestic Market Obligation*). Berdasarkan data IHS Energy periode Februari 2019, Kaltim menjual sebesar 10,9 juta metrik ton batubara di pasar domestik.. Capaian pasokan DMO periode ini tumbuh sebesar 19,75% (yoy) (Grafik I.6). Kebijakan pemerintah yang mengharuskan sebesar 25% dari produksi dipasok untu kebutuhan domestik, terutama kelistrikan mendorong aktivitas di pasar batubara dalam negeri. Namun demikian, peningkatan pasokan ke pasar domestik berdampak pada pengurangan persentase produksi yang di ekspor ke negara mitra dagang. Padahal, harga batubara internasional masih berada pada level diatas US\$90/mt.

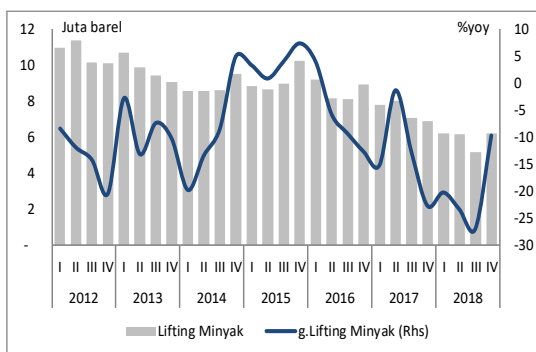


Sumber: Mc Closkey Coal Report, diolah
Grafik I.5 Produksi Batubara Kaltim

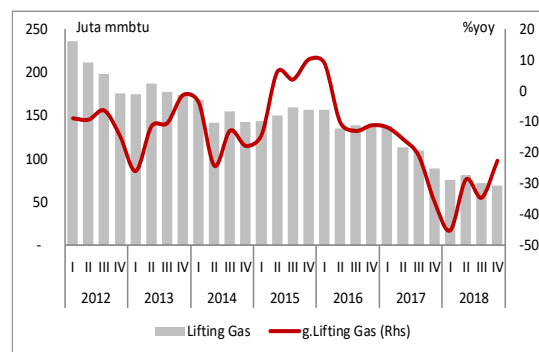


Sumber: Mc Closkey Coal Report, diolah
Grafik I.6 DMO Batubara Kaltim

Kinerja lapangan usaha migas Kaltim triwulan IV 2018 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lifting minyak bumi tercatat masih mengalami kontraksi sebesar -9,72%(yoy), atau sebesar 6,2 juta barel (Grafik I.7). Meskipun lifting minyak bumi lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya tetapi belum signifikan mempengaruhi terhadap kondisi tambang minyak Kaltim. Namun demikian, capaian lifting periode ini relatif lebih baik dibandingkan tiga triwulan sebelumnya. Adapun kinerja lifting gas Kaltim juga masih mengalami kontraksi sebesar -22,66%(yoy). Dengan volume lifting gas triwulan IV 2018 sebesar 68,7 juta mmbtu, maka capaian ini merupakan realisasi terendah paling tidak dalam 10 tahun terakhir (Grafik I.8). Lifting migas yang terus menurun disebabkan oleh umur wilayah kerja di Kaltim yang sudah cukup tua sehingga tidak lagi menghasilkan migas dalam volume seperti keadaan puncaknya (2007).



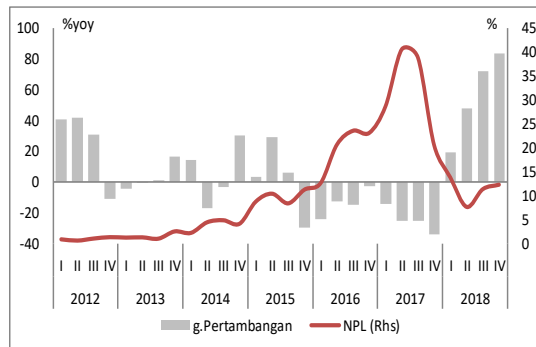
Sumber: Kementerian ESDM, diolah
Grafik I.7 Lifting Minyak Kaltim



Sumber: Kementerian ESDM, diolah
Grafik I.8 Lifting Gas Kaltim

Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke lapangan usaha pertambangan tumbuh tinggi. Tercatat pada triwulan IV 2018, kredit pertambangan Kaltim tumbuh sebesar 83,55% (yoy) dengan nominal kredit *outstanding* sebesar Rp13,7 Triliun (Grafik I.9). Tren peningkatan kredit pertambangan sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha ini dan sektor

pendukungnya. Di sisi risiko, pertumbuhan kredit disertai dengan tren peningkatan NPL di mana pada triwulan IV 2018 NPL lapangan usaha tambang sebesar 12,33%.



Grafik I.9 Kredit dan NPL Industri Pertambangan Kaltim

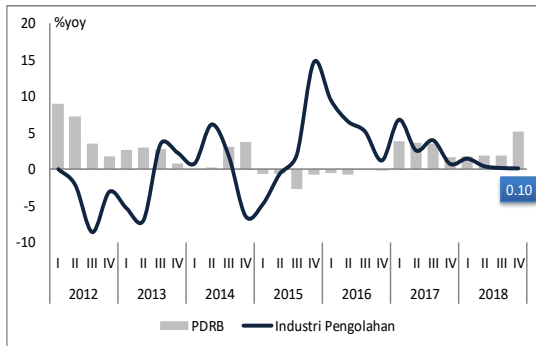
Secara tahunan, lapangan usaha pertambangan tumbuh sebesar 1,11% atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Perlambatan disebabkan oleh kontraksi lapangan usaha tambang pada triwulan I – III 2018 karena kendala produksi. Disamping produksi, permintaan dari Tiongkok beberapa kali terkendala restriksi impor di pelabuhan utama serta devaluasi Renmimbi terhadap Dollar Amerika. Namun demikian, kinerja pertambangan mengalami akselerasi pada triwulan terakhir 2018.

Pada triwulan I 2019, lapangan usaha pertambangan diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Puncak musim hujan yang terjadi pada Januari-Februari 2019 berisiko mengganggu aktivitas pertambangan. Disamping itu, target produksi batubara nasional tahun 2019 ditetapkan sebesar 480 juta ton, lebih rendah dibandingkan capaian produksi pada tahun 2018 sehingga menjadi risiko penurunan kinerja tambang batubara. Di sisi pertambangan migas, *natural declining* blok migas Kaltim diperkirakan masih menjadi penyebab utama perlambatan tambang migas. Rencana investasi besar yang dilakukan oleh pengelola blok migas Kaltim juga diperkirakan belum memberikan dampak signifikan pada lifting migas triwulan I 2019. Namun demikian, permintaan di pasar internasional dan domestik diperkirakan masih cukup tinggi terutama dari pasar India (Boks I.1)

Industri Pengolahan

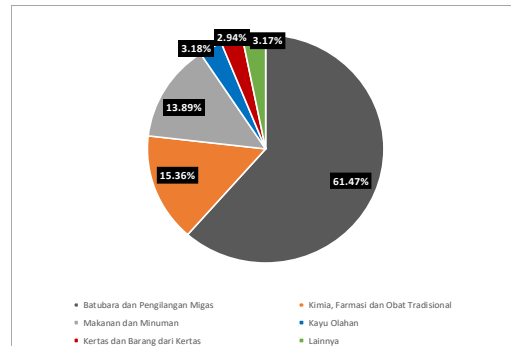
Kinerja lapangan usaha industri pengolahan triwulan IV 2018 tumbuh positif tetapi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, industri pengolahan tumbuh sebesar 0,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan 0,16%(yoy) triwulan sebelumnya (Grafik I.10). Dengan pangsa sebesar 17,91% terhadap ekonomi Kaltim, pertumbuhan industri

pengolahan memberikan andil sebesar 0,02%. Industri pengolahan migas memiliki pangsa sebesar 61,47%, diikuti industri kimia sebesar 15,36% dan industri makanan dan minuman sebesar 13,89% (Grafik I.11)



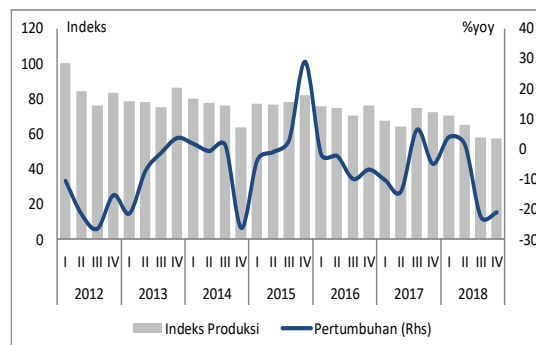
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.10 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Industri Pengolahan



Grafik I.11 Sub-Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun 2017

Kinerja industri pengolahan LNG Triwulan IV 2018 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada triwulan IV 2018, pertumbuhan produksi LNG Kaltim masih mengalami kontraksi sebesar -21,14% (yoy) (Grafik I.12) sejalan dengan kontraksi yang terjadi pada sisi hulu. Produksi LNG Kaltim cukup bergantung dengan kondisi hulu gas karena bahan baku utama berupa gas alam seluruhnya di pasok dari blok gas yang ada di Kaltim. Tanpa sumber migas baru, *natural declining* yang dialami oleh blok migas di wilayah Kaltim akan terus berdampak pada kinerja industri pengolahan. Pada tahun 2018, utilisasi LNG nasional didominasi oleh penjualan ekspor sebesar 28,37%, input industri pengolahan sebesar 25,25% dan kelistrikan sebesar 12,78%. Sementara itu, penggunaan LNG untuk kebutuhan domestik masih relatif rendah yang dipengaruhi oleh keterbatasan *LNG Carrier* di wilayah Indonesia dan adanya tambahan *Value Added Tax* (VAT) sebesar 10% untuk penjualan LNG domestik.

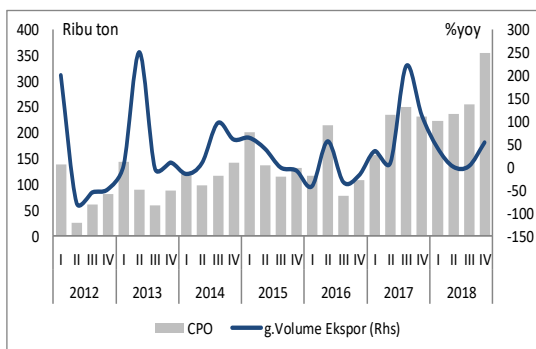


Sumber: BPS, diolah

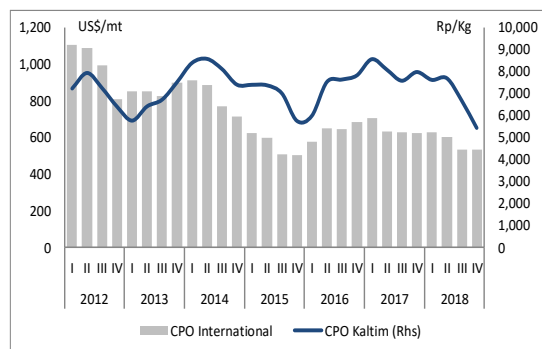
Grafik I.12 Indeks LNG Kaltim

Kinerja industri pengolahan non-migas Kaltim menunjukkan peningkatan. Pada triwulan IV 2018 tercatat volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO) tumbuh sebesar 53,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.13). Berdasarkan negara tujuannya, pasar ekspor ke Tiongkok menunjukkan peningkatan signifikan. Volume ekspor ke Tiongkok tumbuh sebesar 408,87% (yoy) atau 181 ribu ton. Pertumbuhan permintaan CPO Tiongkok bersumber dari keuntungan komparatif CPO dibandingkan minyak kedelai, barang substitusi CPO di sisi harga. Disamping karena harga minyak kedelai, perang dagang antar Tiongkok dengan Amerika Serikat menyebabkan penurunan permintaan minyak kedelai. Perang dagang berdampak pada penerapan cukai kedelai sebesar 25% oleh pemerintah Tiongkok untuk kedelai asal Amerika Serikat. Akibatnya, konsumen kedelai di Tiongkok bergeser membeli kedelai dari pasar Brazil. Tercatat Tiongkok mengimpor 0% kedelai dari Amerika Serikat pada November 2018. Namun demikian, triwulan IV merupakan musim tanam kedelai di Brazil sehingga menyebabkan para konsumen mensubstitusikan kebutuhan minyak kedelai menjadi minyak kelapa sawit.

Ditengah peningkatan permintaan CPO dari Tiongkok, harga CPO internasional masih mengalami kontraksi sebesar -14,38% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan periode sebelumnya (Grafik I.14). Tercatat pada triwulan IV 2018 harga CPO berada di level US\$535,02/ton, lebih tinggi dibandingkan US\$534,03/ton pada triwulan sebelumnya. Harga yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan masih disebabkan oleh *oversupply* pasar oleh CPO asal Indonesia dan Malaysia. Meskipun permintaan dari Tiongkok meningkat tetapi ekspor CPO ke pasar Eropa terkontraksi sebesar -16,17% (yoy) karena belum terdapat kelanjutan tentang *phasing out* biodiesel tahun 2030.

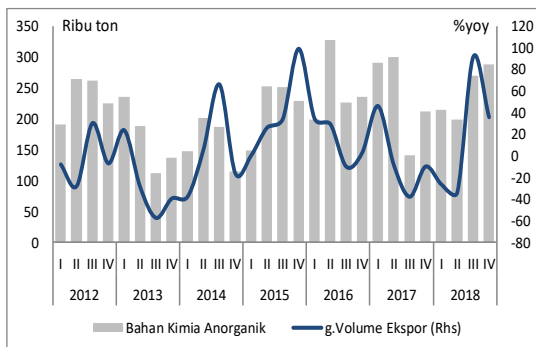


Grafik I.13 Volume Ekspor CPO Kaltim

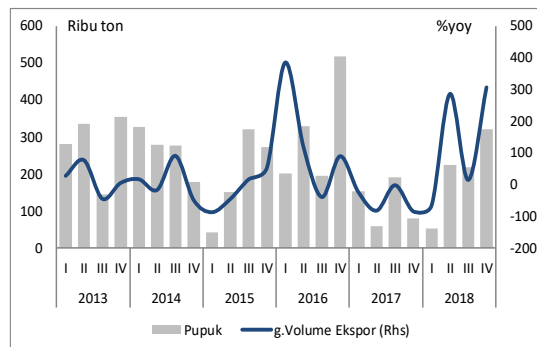


Sumber: Worldbank dan Dinas Perkebunan Kaltim, diolah
Grafik I.14 Harga CPO Kaltim

Kinerja industri pengolahan bahan kimia anorganik pada triwulan IV 2018 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat volume ekspor melambat dari 91,24% (yoy) menjadi 35,77% (yoy) (Grafik I.15). Secara spesifik bahan kimia anorganik yang di ekspor Kaltim adalah amonia yang digunakan sebagai bahan pencampuran pembuatan pupuk. Di sisi lain, ekspor pupuk Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 306,38% (yoy) (Grafik I.16). Pertumbuhan yang signifikan bersumber dari perluasan pasar ekspor pupuk di Asia, terutama India dan Vietnam. Ekspor pupuk Kaltim juga telah memasuki pasar Amerika Serikat dan Meksiko.

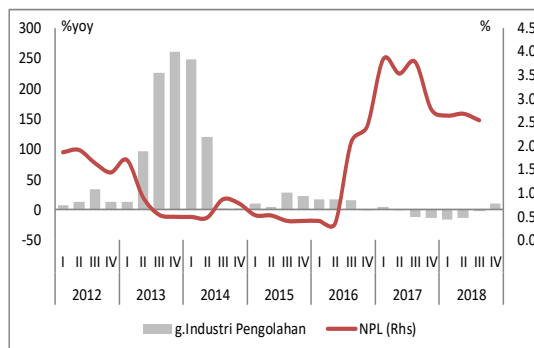


Grafik I.15 Volume Ekspor Bahan Kimia Kaltim



Grafik I.16 Volume Ekspor Pupuk Kaltim

Pertumbuhan positif lapangan usaha industri pengolahan juga tampak pada penyaluran kredit. Tercatat pada triwulan IV 2018 penyaluran kredit industri pengolahan tumbuh sebesar 10,32% (yoy) (Grafik I.17). Faktor yang mendorong penyaluran kredit antara lain permintaan minyak kelapa sawit yang cukup signifikan dari pasar Tiongkok. Peningkatan penyaluran kredit pada lapangan usaha industri pengolahan juga disertai risiko kredit yang masih terjaga dengan tingkat *non-performing loan* sebesar 2,32%. Capaian NPL triwulan ini lebih baik dibandingkan 2,54% pada triwulan sebelumnya.



Grafik I.17 Kredit dan NPL Industri Pengolahan Kaltim

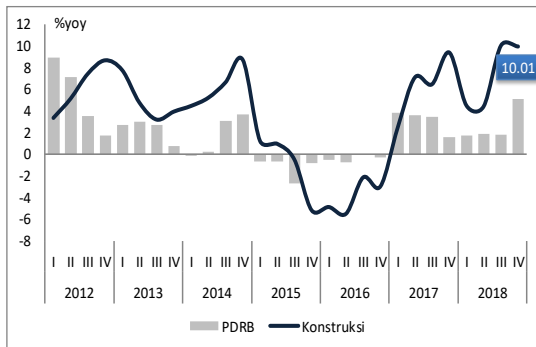
Secara keseluruhan tahun 2018, lapangan usaha industri pengolahan Kaltim tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat pertumbuhan tahun 2018 sebesar 0,52% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 3,47% (yoy). Pasokan bahan baku gas alam dari hulu migas yang terbatas menyebabkan output dari industri pengolahan gas menurun. Di sisi lain, industri pengolahan non migas, utamanya minyak kelapa sawit masih mendapatkan tekanan harga dari pasar internasional. Kampanye negatif terhadap CPO asal Indonesia di beberapa negara maju menyebabkan pasokan komoditas ini berlebih di pasar CPO dunia sehingga memberi pengaruh pada penurunan harga CPO.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan I 2019 diperkirakan lebih lambat. Di sisi industri migas, rencana investasi oleh salah satu pengelola blok migas diperkirakan belum memberikan dampak signifikan. Keputusan investasi berupa pengeboran sumur migas yang lebih banyak baru akan dilaksanakan pada triwulan berjalan sehingga dampaknya akan muncul di triwulan berikutnya. Tren penurunan harga CPO juga diperkirakan masih berlanjut. Disamping itu, panen kedelai Brazil diperkirakan terjadi pada bulan Februari-Mei 2019 sehingga berisiko menurunkan permintaan Tiongkok akan minyak kelapa sawit.

Konstruksi

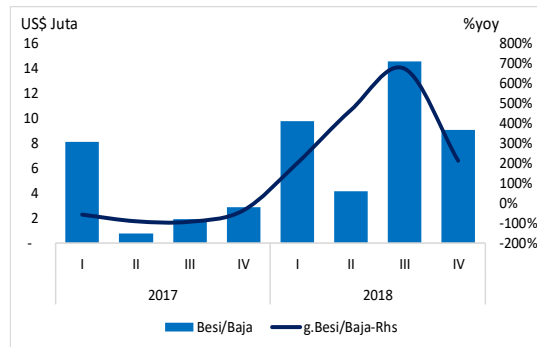
Kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh positif tetapi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat pertumbuhan lapangan usaha konstruksi triwulan IV 2018 sebesar 10,01% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan 10,09% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.18). Lapangan usaha konstruksi memiliki pangsa sebesar 9,05% terhadap ekonomi Kaltim sehingga memberikan andil pertumbuhan triwulan IV 2018 sebesar 0,72%. Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi yang lebih lambat disebabkan proyek infrastruktur daerah baik Proyek Strategis Nasional (PSN) ataupun Proyek Strategis Daerah (PSD) yang telah memasuki tahap penyelesaian sehingga aktivitas pembangunan tidak setinggi triwulan sebelumnya. Proyek dimaksud antara lain adalah pembangunan Jembatan Mahakam IV dan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan. Saat ini, proses pembangunan Jembatan Mahakam IV telah mencapai 90%. Namun demikian, proyek yang awalnya ditargetkan selesai pada bulan Desember 2018 diperkirakan mundur menjadi bulan April 2019. Tingginya curah hujan turut menjadi penghambat dalam tahap penyelesaian karena mengganggu proses pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti pemasangan baut akhir. Terkait pengerjaan proyek Tol Balikpapan-Samarinda hingga Februari 2019, pembangunan fisik mencapai 85,7% dengan Seksi II (Samboja-Muara Jawa) dan Seksi III (Muara Jawa-Palaran) diperkirakan selesai pada Maret

2018. Adapun Seksi I (Balikpapan-Samboja) ditargetkan selesai bulan April 2019, Seksi IV (Palaran-Samarinda) bulan Juli 2019, dan Seksi V (Balikpapan-Bandara Sepinggán) bulan Agustus 2019. Perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga tercermin dari impor barang konstruksi, yaitu besi/baja yang lebih rendah. Tercatat pertumbuhan impor besi/baja melambat dari US\$ 14,6 juta menjadi US\$9,07 juta pada triwulan IV 2018. (Grafik I.19).



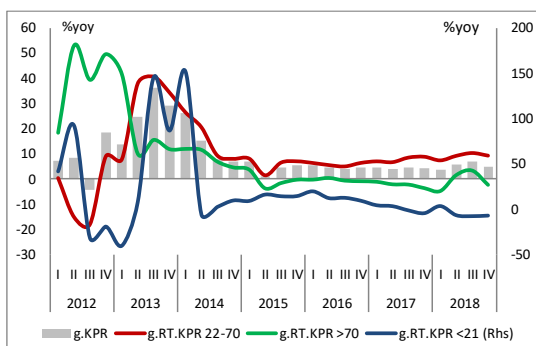
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.18 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konstruksi

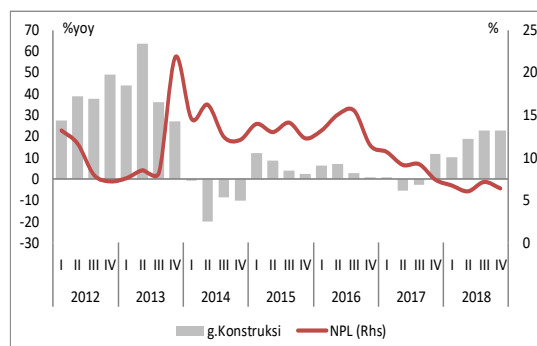


Grafik I.19 Impor Besi/Baja Kaltim

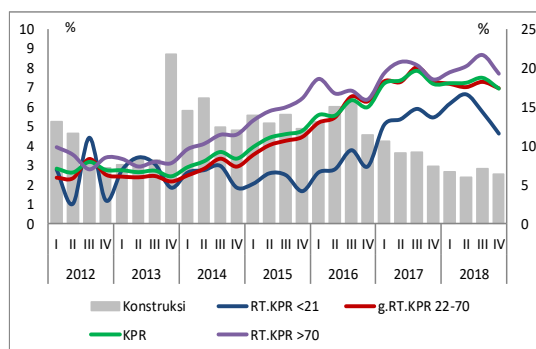
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga mengalami perlambatan. Pada triwulan IV 2018 tercatat KPR tumbuh sebesar 4,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan penyaluran KPR disebabkan oleh penurunan outstanding KPR dengan ukuran rumah diatas 70m² dan dibawah 21 m² (Grafik I.20). Perlambatan lapangan usaha konstruksi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan penyaluran kredit untuk sektor konstruksi. Tercatat pada triwulan IV 2018, nominal penyaluran kredit konstruksi dengan lokasi proyek Kaltim sebesar Rp6,23 triliun atau tumbuh sebesar 22,78% (yoy) (Grafik I.21). Di sisi risiko, *non-performing loan* untuk kredit konstruksi tercatat menurun dari 7,09% menjadi 6,33%. Di sisi lain, sejalan dengan penurunan kredit, risiko kredit KPR juga turun menjadi 6,95% (Grafik I.22).



Grafik I.20 Kredit KPR Kaltim



Grafik I.21 Kredit Konstruksi



Grafik I.22 NPL Kredit Konstruksi dan KPR

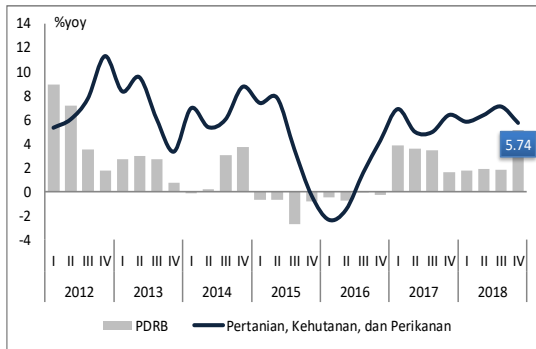
Disepanjang tahun 2018, percepatan penyelesaian proyek pembangunan mendorong pertumbuhan lapangan konstruksi. Tercatat pada tahun 2018, lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 7,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Pembangunan infrastruktur daerah yang terus didorong untuk mencapai target operasional tahun 2019 mendorong aktivitas ekonomi lapangan usaha ini. Di sektor swasta, pembangunan juga terus dilakukan termasuk dalam penambahan infrastruktur migas, pembangunan pabrik kertas, dan kelapa sawit.

Pada triwulan I 2019 diperkirakan lapangan usaha konstruksi tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018. Umumnya, belanja pemerintah daerah belum optimal pada triwulan I karena menunggu penyesuaian terkait dana transfer dari pusat sehingga belanja modal dan fisik masih terbatas. Faktor lain yang juga diperkirakan dapat menahan laju perlambatan konstruksi adalah proses percepatan penyelesaian proyek infrastruktur dengan skema tahun jamak. Anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek ini merupakan anggaran tahun sebelumnya yang direalisasikan pada triwulan berjalan.

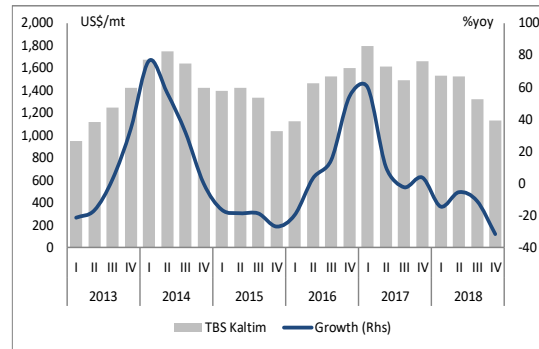
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh lebih rendah dibandingkan periode lalu. Pertanian tercatat tumbuh sebesar 5,74% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I.23). Dengan pangsa sebesar 7,52% terhadap ekonomi Kaltim, lapangan usaha pertanian berkontribusi sebesar 0,39% pada ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Perlambatan lapangan usaha pertanian disebabkan oleh komoditas tabama dan hortikulutra yang sedang dalam musim tanam. Komoditas utama perkebunan, kelapa sawit juga telah melewati masa panen sehingga pasokan tandan buah segar (TBS) tidak setinggi sebelumnya. Cuaca pada triwulan IV 2018 yang cukup

sering terjadi hujan juga mengganggu tumbuh kembang tanaman. Meskipun telah melewati puncak panennya sehingga pasokan mulai turun, harga TBS Kaltim belum menunjukkan peningkatan harga. Pada triwulan IV 2018 tercatat harga rata-rata TBS Kaltim sebesar Rp1.129,86/kg atau -31,76% (yoy) (Grafik I.24). Penurunan harga TBS terjadi ditengah peningkatan permintaan minyak kelapa sawit dari Tiongkok. Harga CPO internasional juga mulai menunjukkan perbaikan tetapi belum berdampak pada harga CPO dan TBS Kaltim.

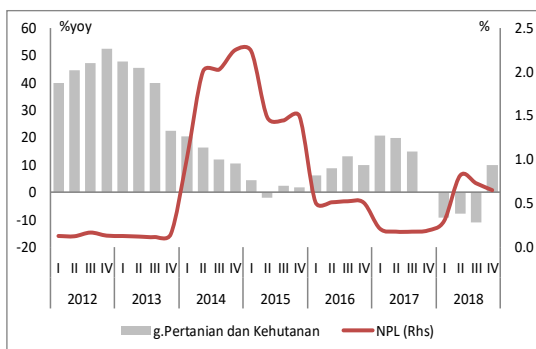


Sumber: BPS, diolah
Grafik I.23 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Pertanian

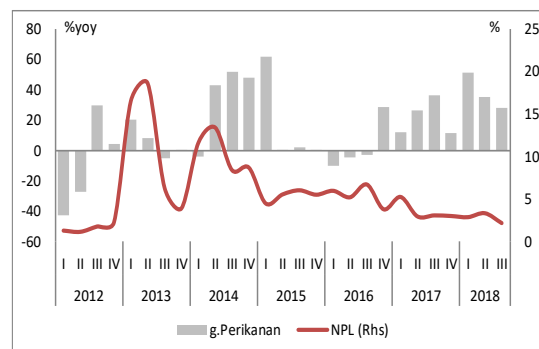


Sumber: Dinas Perkebunan Kaltim, diolah
Grafik I.24 Harga TBS Kaltim

Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke lapangan usaha pertanian menunjukkan perbaikan. Kredit lapangan usaha pertanian tercatat tumbuh sebesar 9,98% (yoy), meningkat dari -11,22% (yoy) pada triwulan lalu (Grafik I.25). Perbaikan kredit pertanian merupakan dampak dari outlook industri minyak kelapa sawit yang lebih baik pada tahun 2019 sejalan dengan implementasi B20. Disamping itu, meskipun harga TBS masih rendah tetapi peningkatan permintaan dari minyak kelapa sawit dari Tiongkok meninsentif produsen sawit untuk berinvestasi. Di sisi lain, penyaluran kredit ke lapangan usaha perikanan mengalami perlambatan. Pada triwulan IV 2018 kredit perikanan tumbuh 14,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I.26).



Grafik I.25 Kredit dan NPL Pertanian Kaltim



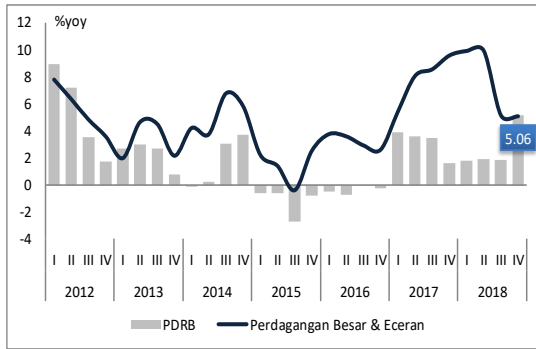
Grafik I.26 Kredit dan NPL Perikanan Kaltim

Disepanjang tahun 2018 lapangan usaha pertanian tumbuh sebesar 6,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 5,81% (yoy) pada tahun 2017. Akselerasi lapangan usaha pertanian terjadi ditengah penurunan harga TBS ataupun CPO di pasar internasional. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi terjadi pada triwulan III 2018 ketika pemerintah mengumumkan kewajiban pemanfaatan biodiesel sehingga memberikan outlook positif untuk industri kelapa sawit ataupun turunannya.

Pada triwulan I 2019, diperkirakan lapangan usaha pertanian tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Panen beras yang diperkirakan dimulai pada akhir februari akan mendorong kinerja lapangan usaha ini. Outlook perkebunan kelapa sawit sejalan dengan keberlanjutan implementasi B20 d juga diperkirakan mendukung pertumbuhan lebih tinggi sub lapangan usaha pertanian.

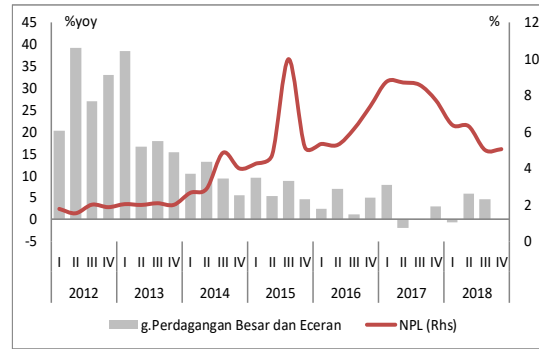
Lapangan Usaha Lainnya

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tumbuh positif pada triwulan IV 2018, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Tercatat lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 5,06% (yoy) (Grafik 1.27). Dengan pangsa sebesar 5,52%, lapangan usaha perdagangan berkontribusi sebesar 0,27% terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Perlambatan perdagangan bersumber dari jual beli *offline* yang umumnya terjadi di pusat perbelanjaan. Ekspansi bisnis online, terutama *e-commerce* melalui promo *flash sale*, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), gratis ongkos kirim, dan integrasi dengan *e-wallet* menawarkan pengalaman belanja baru dan memudahkan konsumen menyebabkan pergeseran cara belanja masyarakat. Tercatat nominal transaksi *e-commerce* di Kalimantan Timur triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 143,51% (yoy). Perlambatan lapangan usaha perdagangan juga tampak dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan komponen pembelian barang tahan lama yang indeksnya masih dibawah 100. Di sisi pedagang, Survei Pedagang Eceran (SPE) Bank Indonesia yang dilaksanakan di Balikpapan menunjukkan perlambatan Indeks Penjualan Riil (IPR) dari 113,7 menjadi 100,9.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.27 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim –
Perdagangan Besar dan Eceran



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.28 Kredit Lapangan Usaha Perdagangan Besar
dan Eceran

Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha perdagangan yang terbatas juga tercermin dalam penyaluran kredit. Tercatat pada triwulan IV 2018, kredit perdagangan sedikit mengalami kontraksi sebesar -0,09% (yoy) dengan peningkatan *non performing loan* menjadi 5,04% (Grafik I.28). Berdasarkan lapangan usahanya, penyaluran kredit ke lapangan usaha perdagangan merupakan yang terbesar dengan pangsa mencapai 16,62% dari seluruh penyaluran kredit di Kalimantan Timur.

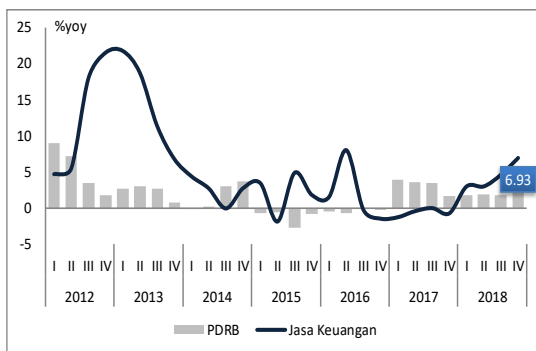
Kinerja lapangan usaha perdagangan sepanjang tahun 2018 sedikit melambat dibandingkan tahun 2017. Pergeseran cara berbelanja dari *offline* menjadi *online* menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan. Semakin mudahnya masyarakat mengakses *online marketplace* memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan perbandingan harga sehingga membentuk *behaviour* yang lebih selektif dalam pembelian barang.

Lapangan usaha perdagangan triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Event Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diperkirakan mampu mendorong perdagangan Kalimantan Timur. Kebijakan pelonggaran DP 0% oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kredit kendaraan bermotor kepada beberapa perusahaan pembiayaan diperkirakan dapat mendorong penjualan. Lebih lanjut, pertumbuhan perdagangan juga diperkirakan bersumber dari mulai meningkatnya aktivitas lapangan usaha ini paska beroperasinya Bandara APT Pranoto (Boks I.2)

Kinerja lapangan usaha jasa keuangan triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi. Jasa keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,93% (yoy) pada triwulan IV 2018, naik dari 4,61% (yoy) periode sebelumnya (Grafik I.29). Dengan pangsa sebesar 1,52%, jasa keuangan

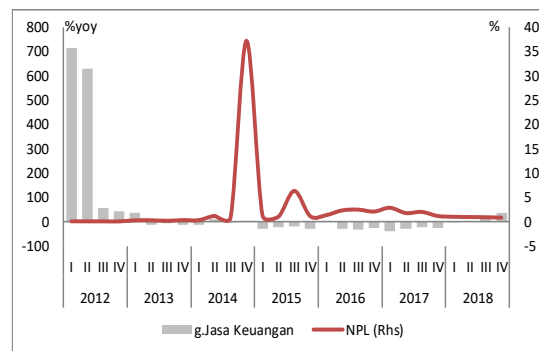
memberikan andil sebesar 0,10% terhadap ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Akselerasi lapangan usaha jasa keuangan sejalan dengan penyaluran kredit ke sektor utama yang juga tumbuh tinggi. Perbaikan kinerja lapangan usaha pertambangan mendorong sektor swasta untuk melakukan investasi yang secara langsung berdampak pada pengajuan kredit di sektor keuangan, khususnya perbankan.

Di sisi pembiayaan penyaluran kredit ke lapangan usaha jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Kredit jasa keuangan tumbuh sebesar 36,44% (yoy) pada triwulan IV 2018, meningkat dari 21,03% (yoy) pada periode sebelumnya. Di sisi risiko, NPL terjaga dalam tingkat yang cukup rendah, sebesar 0,79% (Grafik I.30).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.29 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Jasa Keuangan



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.30 Kredit Lapangan Usaha Jasa Keuangan

1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kaltim didorong akselerasi PMTB (investasi). Peningkatan investasi Kaltim disebabkan oleh kinerja lapangan usaha tambang yang tumbuh tinggi sejalan dengan didorongnya produksi untuk mencapai target tahunan. Disamping itu, kewajiban untuk memasok batubara ke dalam negeri (DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik juga mendorong ekspansi usaha pertambangan. Ditengah akselerasi investasi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tertinggi tertahan oleh kontraksi ekspor luar negeri. Harga komoditas yang mulai melambat pada triwulan IV 2018 menyebabkan penurunan nilai ekspor Kaltim.

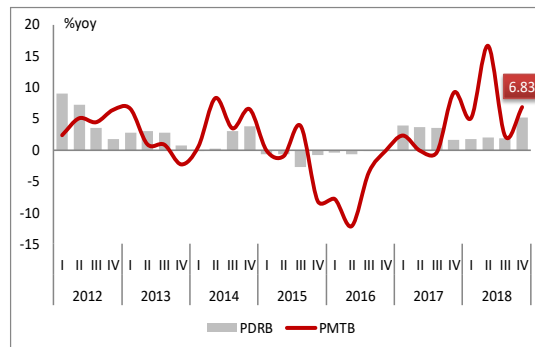
Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2015	2016	2017					2018									
	TOTAL	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	andil (%)	share* (%)	yoy (%)	andil (%)	share* (%)
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)					
Konsumsi RT	1.28	1.56	1.83	2.49	2.83	2.73	2.47	2.34	2.77	2.71	3.42	0.51	16.05	2.81	0.41	16.21	
Konsumsi LNPR	8.30	-4.04	6.32	4.26	4.55	4.49	4.89	9.51	7.23	12.47	8.56	0.03	0.46	9.41	0.04	0.47	
Konsumsi Pemerintah	-7.77	-13.03	17.38	-0.56	-9.50	-28.07	-12.14	3.04	-1.23	17.60	11.76	0.46	5.15	8.21	0.23	3.63	
PMTB	-1.47	-6.04	2.28	-0.14	-0.37	9.18	2.75	5.07	16.64	2.19	6.83	1.81	28.59	7.54	1.85	27.18	
Perubahan Inventori	-35.89	-65.19	-1.74	-5.14	-19.84	-37.96	-15.85	-32.30	-27.06	-8.53	24.06	0.04	0.26	-15.13	-0.04	0.25	
Ekspor LN	-16.07	-9.88	3.31	1.74	3.81	1.38	2.55	-6.03	-4.35	-3.01	-1.39	-0.71	39.02	-3.71	-1.90	39.93	
Impor LN	3.49	-12.70	-0.95	4.60	0.10	6.21	2.51	19.67	2.27	8.23	8.03	1.42	12.75	9.39	1.55	12.44	
Net Ekspor Antar Daerah	225.50	32.54	3.80	14.81	6.88	4.75	7.51	29.76	1.33	13.83	21.04	4.41	23.23	16.15	3.62	24.78	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.21	-0.38	3.87	3.60	3.47	1.62	3.13	1.77	1.92	1.83	5.14	5.14	100.00	2.67	2.67	100.00	

Sumber: BPS, diolah

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Komponen PMTB (investasi) Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Investasi tercatat tumbuh sebesar 6,83% (yoy), meningkat dibandingkan 2,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.31). Dengan pangsa sebesar 28,59%, PMTB berkontribusi sebesar 1,81% terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 (Tabel I.2). Realisasi investasi terbesar terjadi di lapangan usaha pertambangan dan listrik, gas dan air.

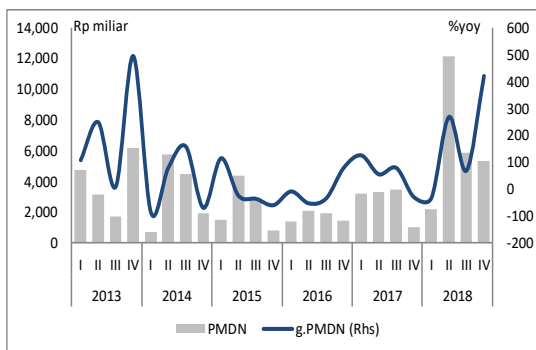


Sumber: BPS, diolah

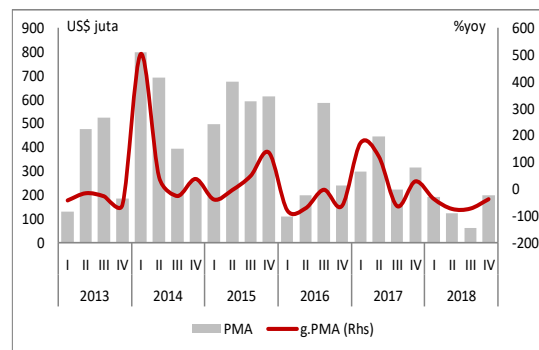
Grafik I.31 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - PMTB

Realisasi investasi swasta Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan investasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat sebesar US\$ 561,3 juta, atau tumbuh sebesar 43,74% (yoy). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) triwulan IV 2018 sebesar Rp 5,34 triliun, tumbuh sebesar 421,99% (yoy) (Grafik I.32). Akselerasi PMDN bersumber dari investasi di lapangan usaha pertambangan. Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan target produksi tahunan perusahaan batubara menjadi pendorong investasi lapangan usaha ini pada triwulan IV 2018. Selain untuk menjaga volume ekspor ditengah harga yang masih cukup baik, perusahaan memiliki kewajiban pasokan batubara DMO. Produsen batubara berisiko terkena sanksi pemotongan kuota produksi di tahun berikutnya jika tidak

memenuhi target memasok 25% produksi ke pasar domestik. Penambahan kuota produksi diajukan oleh beberapa perusahaan di Kaltim juga mendorong investasi lapangan usaha tambang. Pertumbuhan investasi di lapangan usaha listrik, gas dan air tercatat 447,14% (yoy). Dimulainya tahapan sinkronisasi PLTU Mulut Tambang (MT) dengan kapasitas 2 x 27,5 MW di Kecamatan Muara Jawa, Kukar menjadi faktor pendorong tingginya realisasi lapangan usaha ini. Berdasarkan lokasi investasinya, realisasi investasi dalam negeri Kukar triwulan IV 2018 sebesar Rp 2,2 Triliun, Kutai Barat sebesar Rp 1,5 Triliun dan Balikpapan sebesar Rp 1,1 Triliun. Adapun di Kukar sebagian besar realisasi ditujukan untuk lapangan usaha listrik, gas dan air, realisasi investasi Kubar sebagian besar untuk kehutanan dan perkebunan, serta realisasi investasi utama kota Balikpapan adalah konstruksi. Meskipun investasi domestik tumbuh cukup tinggi, investasi asing (PMA) Kaltim masih mengalami kontraksi sebesar -36,39% (yoy). PMA pertambangan berkontraksi sebesar -74,12% (yoy) pada triwulan IV 2018. Namun demikian, kontraksi PMA yang lebih dalam tertahan oleh investasi lapangan usaha transportasi dan telekomunikasi yang tumbuh 702,78% (yoy) (Grafik I.33).

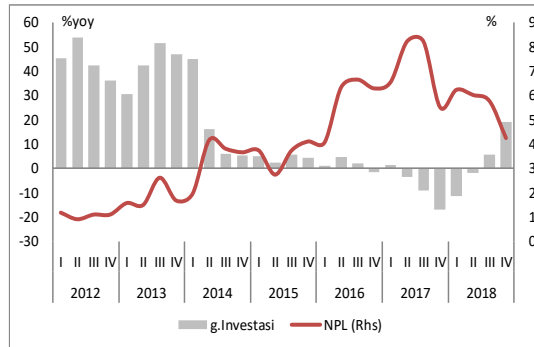


Sumber: DPMPSTSP Kaltim, diolah
Grafik I.32 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim



Sumber: DPMPSTSP Kaltim, diolah
Grafik I.33 Penanaman Modal Asing Kaltim

Penyaluran kredit investasi triwulan IV 2018 tercatat tumbuh lebih tinggi. Kredit investasi tercatat tumbuh sebesar 19,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,65% (yoy) (Grafik I.34). Kredit investasi yang lebih ekspansif sejalan dengan akselerasi lapangan usaha utama. Selain kredit investasi, kredit modal kerja triwulan IV 2018 juga tercatat tumbuh sebesar 21,99% (yoy) sehingga pendanaan usaha yang bersifat jangka pendek (1 tahun) dan menengah (5 tahun) keduanya tumbuh positif menunjukkan sektor swasta yang lebih optimis pada perekonomian Kaltim secara keseluruhan.



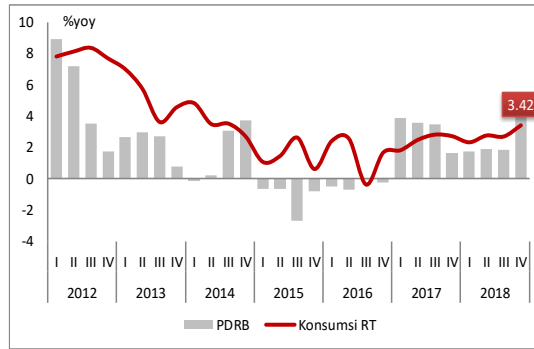
Grafik I.34 Kredit dan NPL Investasi Kaltim

Disepanjang tahun 2018, investasi Kaltim tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2018, pertumbuhan PMTB sebesar 7,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2,75% (yoy). Investasi di pertengahan tahun pertama merupakan dampak dari pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Adapun investasi di pertengahan kedua didorong oleh pertambangan batubara.

Kinerja investasi Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan IV 2018. Perlambatan investasi bersumber dari belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah pada triwulan I 2019. Disamping itu, terdapat kecenderungan untuk *wait and see* untuk *Foreign Direct Investment* (FDI) seiring dengan masuknya tahun Pemilu di Indonesia.

Konsumsi Rumah Tangga

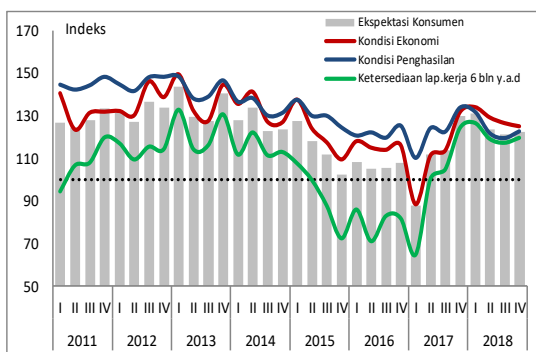
Konsumsi rumah tangga Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Tercatat konsumsi rumah tangga triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 3,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2,71% (yoy) pada periode sebelumnya (Grafik I.35). Dengan pangsa sebesar 16,05%, konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 0,51% terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Peningkatan konsumsi rumah tangga, disebabkan oleh dorongan berkonsumsi pada periode Hari Raya Natal (HBKN) yang didahului dengan libur sekolah.



Sumber: BPS, diolah

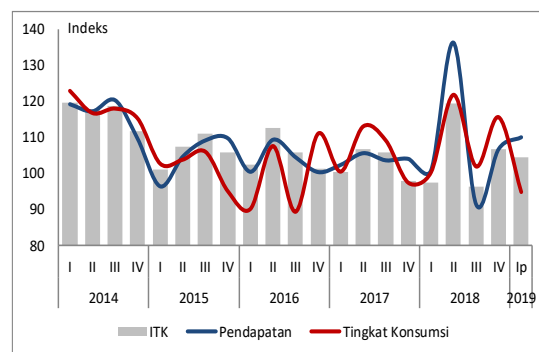
Grafik I.35 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia triwulan IV 2018, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 115,86, lebih tinggi dibandingkan 112,94 pada triwulan sebelumnya. Selain HBKN, perbaikan ekonomi yang masih berlanjut di Kaltim berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat sehingga masyarakat lebih optimis dan meningkatkan *willingness to spend*, tampak indeks penghasilan masyarakat naik dari 110,17 menjadi 123,00 (Grafik I.36). Salah satu faktor yang mendasari optimisme masyarakat pada akhir tahun 2018 adalah kinerja lapangan usaha utama yang cukup tinggi. Konsumsi masyarakat yang lebih baik juga terkonfirmasi melalui Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang mencapai 106,79 (Grafik I.37). ITK yang lebih tinggi didorong oleh komponen pendapatan dan juga konsumsi masyarakat di sepanjang triwulan IV 2018.



Sumber: SK Bank Indonesia

Grafik I.36 Optimisme Konsumen Rumah Tangga Kaltim

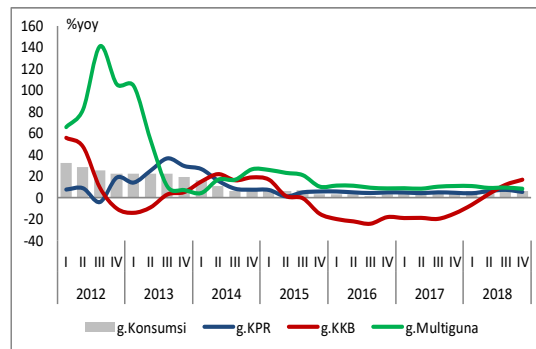


Sumber: SK Bank Indonesia

Grafik I.37 Indeks Tendensi Konsumen Kaltim

Peningkatan konsumsi masyarakat Kaltim tampak dalam peningkatan penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB). Tercatat pada triwulan IV 2018, KKB tumbuh menjadi 16,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 11,45% (yoy) (Grafik I.38). Secara umum kredit konsumsi Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh positif meskipun sedikit lebih rendah

dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,67% (yoy). Penyaluran KPR triwulan IV 2018 sedikit lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya, sebesar 4,96% (yoy). Dengan demikian, perilaku berkonsumsi masyarakat Kaltim masih terbatas pada barang-barang yang tempo penyaluran kredinya relatif lebih singkat. Meskipun penyaluran KPR sedikit melambat, Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan peningkatan indeks dari 118,13 menjadi 118,50, menggambarkan permintaan untuk rumah yang mulai meningkat.



Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.38 Kredit Konsumsi Kaltim

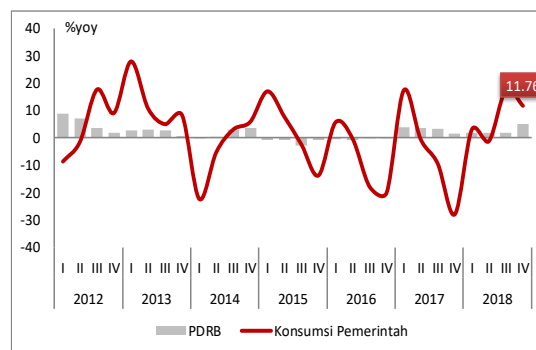
Kinerja konsumsi rumah tangga 2018 tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja lapangan usaha pertambangan yang lebih baik pada tahun 2018 ditengah harga batubara yang juga positif berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Disisi penghasilan masyarakat, produksi batubara yang lebih tinggi berdampak pada peningkatan bonus produksi tenaga kerja sehingga mendorong konsumsi yang lebih tinggi.

Konsumsi rumah tangga triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018. Konsumsi yang lebih lambat berusmber dari normalisasi konsumsi masyarakat paska HBKN. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) memproyeksikan perlambatan pada komponen konsumsi dengan indeks menurun dari 106,79 pada triwulan IV 2018 menjadi 104,41. SK Bank Indonesia Februari 2019 juga menunjukkan penurunan keyakinan konsumen dari 119,50 (Desember 2018) menjadi 113,42 (Februari 2019).

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh positif tetapi lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 11,76% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih rendah dibandingkan 17,60% (yoy) pada periode sebelumnya (Grafik 1.39). Dengan pangsa sebesar 5,15%, konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 0,45% (yoy) terhadap ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Kinerja konsumsi pemerintah sedikit

melambat karena optimalisasi realisasi anggaran untuk proyek infrastruktur yang telah dioptimalkan pada triwulan III 2018, tercermin dari peningkatan impor besi/baja pada periode dimaksud. Meskipun dalam APBD-P, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota terjadi peningkatan anggaran belanja (terkecuali kota Bontang dan Kutai Barat), alokasi pendanaan tersebut diarahkan untuk penyelesaian proyek infrastruktur. Tercatat pada triwulan IV 2018 giro pemerintah tumbuh sebesar 28,05% (yoy), menunjukkan penambahan simpanan pemerintah di perbankan. Namun demikian, terdapat beberapa proyek infrastruktur daerah berskema tahun jamak yang pembangunan fisiknya belum sesuai dengan target menyebabkan penyerapan dana juga sedikit terlambat. Lebih lanjut, kondisi tersebut membuat penyerapan anggaran yang seharusnya terjadi pada triwulan IV 2018 bergeser ke triwulan selanjutnya.



Sumber: BPS, diolah

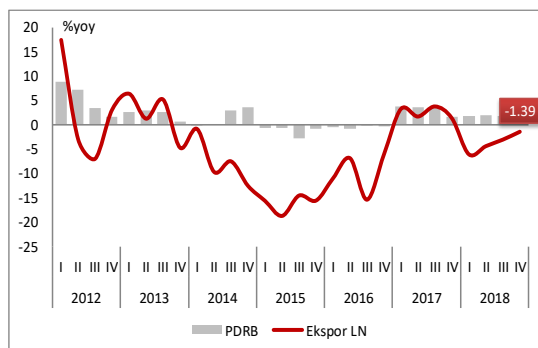
Grafik I.39 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Pemerintah

Pada tahun 2018, konsumsi pemerintah Kaltim tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 8,21% (yoy) dengan pagu belanja dalam APBD-P sebesar Rp 35,5 Triliun, meningkat dari Rp 31,4 Triliun tahun 2017. Peningkatan kemampuan fiskal bersumber dari meningkatnya dana transfer dalam bentuk DBH Minerba sejalan dengan produksi batubara yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Kinerja konsumsi pemerintah Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan tumbuh positif tapi lebih lambat. Pola siklus keuangan daerah yang belum optimal pada awal tahun disebabkan oleh masih disesuaikannya dana transfer dari pusat dan pos anggaran di masing-masing instansi. Namun demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh penyerapan anggaran menggunakan dana SILPA dan penyerapan proyek infrastruktur menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

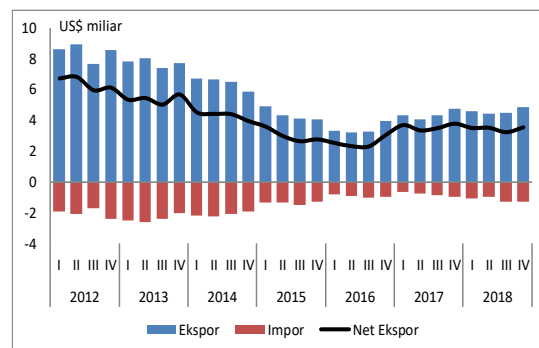
Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri Kaltim triwulan IV 2018 masih mengalami kontraksi tetapi tidak sedalam periode sebelumnya. Kinerja ekspor luar negeri Kaltim triwulan IV 2018 mengalami kontraksi sebesar -1,39% (yoy), lebih baik dibandingkan -3,01% (yoy) triwulan sebelumnya (Grafik I.40). Dengan pangsa ekspor sebesar 39,02%, kontraksi ekspor memberikan kontribusi negatif sebesar -1,39% terhadap ekonomi Kaltim triwulan IV 2018. Kontraksi ekspor juga tergambar dalam hasil Liaison Bank Indonesia yang mencatatkan *likert scale* sebesar -0,7. Kontraksi ekspor minyak mentah yang diikuti dengan perlambatan nilai ekspor non migas menyebabkan secara keseluruhan ekspor luar negeri Kaltim dalam PDRB berkontraksi. Kontraksi kinerja ekspor luar negeri juga tampak dalam pertumbuhan net ekspor Kaltim yang masih mengalami kontraksi sebesar -6,30% (yoy). Secara nominal, ekspor luar negeri Kaltim tercatat sebesar US\$ 4,8 miliar dan impor luar negeri sebesar US\$ 1,2 miliar sehingga net ekspor sebesar US\$ 3,5 miliar (Grafik I.41). Ditinjau berdasarkan nilainya, perlambatan ekspor luar negeri Kaltim disebabkan oleh harga komoditas utama, yaitu batubara dan minyak kelapa sawit yang tumbuh lebih lambat pada triwulan IV 2018. Namun demikian, kontraksi net ekspor yang lebih dalam tertahan oleh menurunnya impor migas Kaltim. Indeks Harga Ekspor (IHEx) Kaltim tercatat melambat dari 23,54% (yoy) menjadi 10,64% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.40 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor Luar Negeri

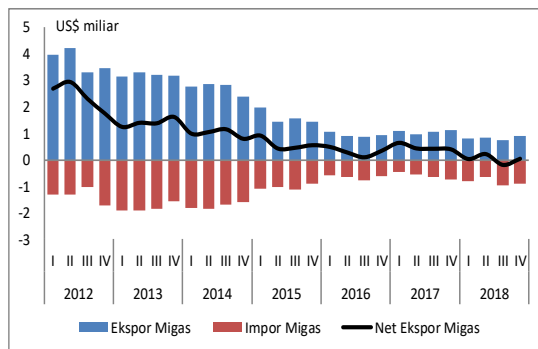


Sumber: BPS, diolah

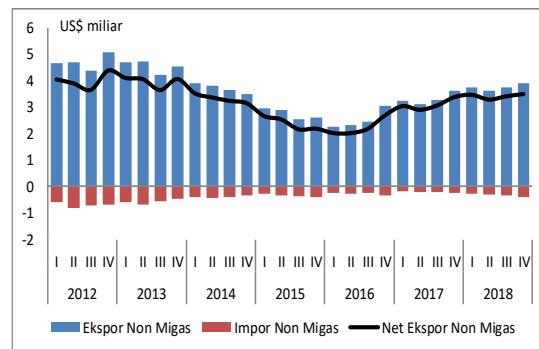
Grafik I.41 Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltim

Neraca migas Kaltim triwulan IV 2018 kembali dalam posisi surplus meskipun dengan nominal yang cukup rendah. Surplus perdagangan neraca migas Kaltim triwulan IV 2018 sebesar US\$ 32,73 juta, lebih baik dibandingkan defisit sebesar US\$ 202,17 juta pada periode sebelumnya (Grafik I.42). Namun demikian, capaian surplus neraca migas periode ini relatif rendah dibandingkan rata-rata triwulan IV dalam 5 tahun terakhir sebesar US\$ 416,54 juta. Natural declining blok migas masih menjadi penyebab utama neraca perdagangan migas Kaltim

sulit untuk tumbuh lebih tinggi. Di sisi neraca non migas, net ekspor Kaltim tumbuh pada tingkat 3,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan 11,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya dengan nominal surplus sebesar US\$ 3,5 miliar (Grafik I.43). Perlambatan ekspor non migas disebabkan oleh harga batubara yang tumbuh lebih lambat dan CPO yang masih menunjukkan tren negatif.



Sumber: BPS, diolah
Grafik I.42 Neraca Migas Kaltim

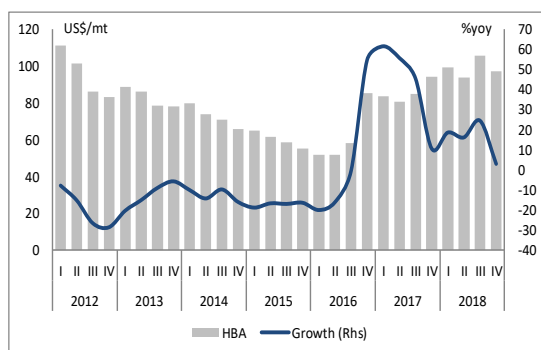


Sumber: BPS, diolah
Grafik I.43 Perkembangan Ekspor Nonmigas Kaltim

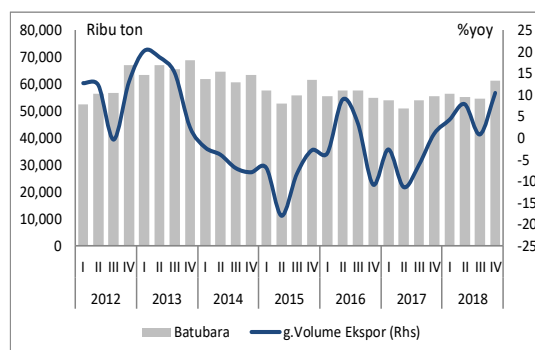
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai³, kinerja ekspor non-migas luar negeri Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, ekspor tercatat tumbuh 8,01% (yoy) lebih rendah dibandingkan 14,51% (yoy) triwulan sebelumnya. Perlambatan ekspor luar negeri triwulan IV 2018 bersumber dari harga komoditas utama yang mulai melambat. Harga batubara acuan (HBA) triwulan IV 2018 sebesar US\$97,10/mt, turun dari US\$105,76/mt sehingga pertumbuhan harga juga melambat dari sebelumnya 24,45% (yoy) menjadi 2,98% (yoy) (Grafik I.44). Meskipun harga melambat, volume ekspor batubara mengalami peningkatan sebesar 10,53% (yoy). Pada triwulan IV 2018 ekspor batubara Kaltim sebesar 61,2 juta ton, meningkat dari sebelumnya 54,5 juta ton sehingga volume ekspor tumbuh dari 0,87% (yoy) menjadi 10,53% (yoy) (Grafik I.45). Peningkatan ekspor batubara yang cukup signifikan tampak untuk tujuan Tiongkok. Dengan perkiraan kuota impor batubara Tiongkok yang akan mencapai 100% pada November 2018 dan restriksi impor yang akan berlanjut setelahnya, maka optimalisasi ekspor terjadi pada Oktober 2018. Selain harga batubara, harga minyak kelapa sawit juga tercatat tumbuh negatif sebesar -22,76% (yoy) pada level US\$ 554,81/ton. Harga minyak kelapa sawit yang lebih rendah masih disebabkan oleh oversuplai yang terjadi di pasar internasional. Meskipun harga turun, tetapi volume ekspor CPO

³Dipublikasikan melalui Berita Resmi Statistik Ekspor dan Impor Kaltim oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim secara bulanan

ke Tiongkok meningkat. Perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat berdampak pada peningkatan permintaan substitusi dari minyak kedelai.



Sumber: ESDM, diolah
Grafik I.44 Harga Batubara Acuan



Grafik I.45 Ekspor Batubara Kaltim

Berdasarkan komoditasnya, ekspor luar negeri Kaltim triwulan IV 2018 masih didominasi oleh bahan bakar mineral dan batubara. Pangsa ekspor komoditas ini mencapai 92,10% dari keseluruhan ekspor Kaltim triwulan IV 2018 (Tabel I.3). Komoditas ekspor Kaltim lainnya adalah CPO sebesar 3,49%, Bahan Kimia Anorganik sebesar 1,69%, Pupuk sebesar 1,29%, dan Kayu sebesar 0,67%. Komoditas ekspor Kaltim sebagian besar bertujuan ke negara-negara Asia. Ekspor ke Tiongkok mencapai 23,25% dari keseluruhan ekspor Kaltim, dengan komoditas utama batubara dan gas (Tabel I.4). Lebih lanjut, sebesar 18,91% komoditas Kaltim di ekspor ke India, diikuti Jepang sebesar 16,68%, Korea Selatan sebesar 7,93%, dan Malaysia sebesar 5,61%.

Tabel I.3 Komoditas Utama Ekspor Kaltim Tahun 2018

No	Komoditas Ekspor Utama	Pangsa (%)
1	Bahan Bakar Mineral dan Batubara (27)	92.10
2	CPO (15)	3.49
3	Bahan Kimia Anorganik (28)	1.69
4	Pupuk (31)	1.29
5	Kayu (44)	0.67
Total 5 Komoditas		99.24

Sumber: BPS, diolah

Tabel I.4 Negara Tujuan Utama Ekspor Kaltim Tahun 2018

No	Negara Tujuan Ekspor Utama	Pangsa (%)
1	Tiongkok	23.25
2	India	18.91
3	Jepang	16.68
4	Korea Selatan	7.93
5	Malaysia	5.61
Total 5 Negara		72.38

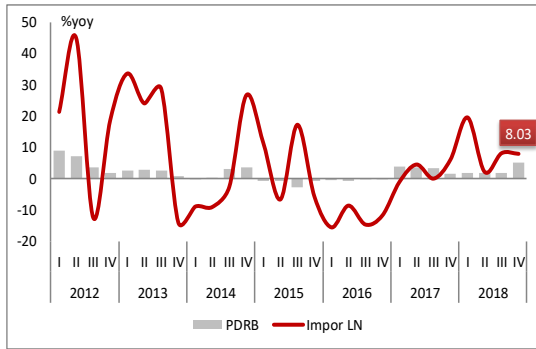
Sumber: BPS, diolah

Kinerja ekspor luar negeri Kaltim tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar -3,71% (yoy). Kontraksi ekspor bersumber dari produksi lapangan usaha tambang yang cukup terbatas pada awal tahun 2018 sehingga volume ekspor pada periode dimaksud terbatas. Disamping itu, peningkatan pasokan untuk domestik juga menyebabkan ekspor batubara tidak tumbuh tinggi. Padahal tingkat harga sepanjang tahun 2018 cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disamping batubara, harga CPO sepanjang tahun 2018 konstan menunjukkan kontraksi akibat oversupply komoditas di pasar internasional dan kampanye negatif CPO. Di sisi ekspor migas, penurunan lifting migas menyebabkan ekspor minyak mentah ataupun LNG cukup rendah.

Pada triwulan I 2019, ekspor luar negeri diperkirakan masih mengalami kontraksi tetapi tidak sedalam triwulan lalu. Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar US\$ 91,80/mt, turun dari rata-rata triwulan IV 2018 sebesar US\$ 92,11/mt. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh pelonggaran restriksi impor batubara di 2 pelabuhan besar Tiongkok. Harga CPO pada Januari 2019 juga telah menunjukkan peningkatan sebesar 9,26% (mtm) sejalan dengan peningkatan permintaan dari Tiongkok.

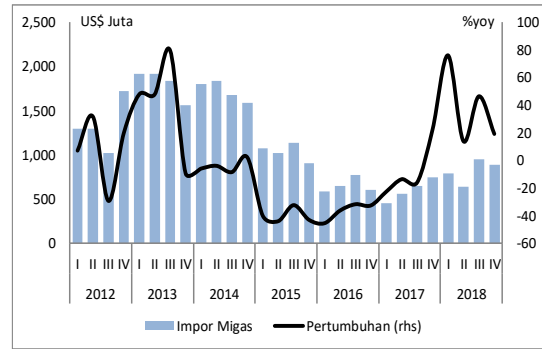
Impor Luar Negeri

Kinerja impor luar negeri Kaltim triwulan IV 2018, tumbuh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, impor LN sebesar 8,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan 8,23% (yoy) triwulan sebelumnya (Grafik I.46) Impor yang lebih rendah disebabkan oleh apresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika sejak awal November 2018 yang terus berlanjut hingga akhir tahun. Disamping penguatan Rupiah, harga minyak dunia juga menunjukkan penurunan harga. Tercatat impor migas Kaltim melambat dari 46,45% (yoy) menjadi 19,11% (yoy) (Grafik I.47). Pada triwulan IV 2018, harga rata-rata minyak dunia triwulan IV 2018 sebesar US\$ 64,33/bbl, lebih rendah dibandingkan US\$ 73,04/bbl triwulan III 2018, melambat dari 45,54% (yoy) menjadi 9,64% (yoy) pada triwulan IV 2018 (Grafik I.48). Turunnya harga minyak dunia disebabkan oleh oversupply minyak mentah paska berproduksinya minyak shale di Amerika Serikat. Produksi minyak shale yang cukup besar menempatkan Amerika Serikat sebagai produsen minyak mentah dunia terbesar diatas Arab Saudi dan Rusia.



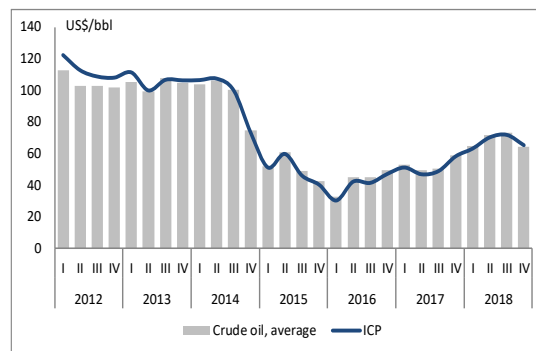
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.46 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor Luar Negeri



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.47 Perkembangan Impor Migas Kaltim

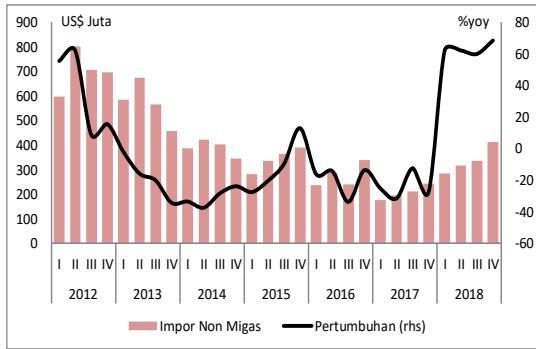


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.48 Perkembangan Harga Minyak Dunia

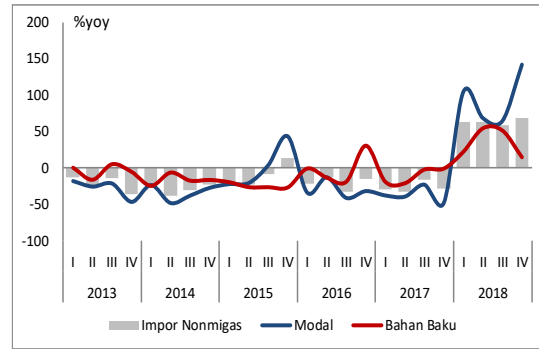
Ditengah perlambatan impor migas, impor non migas Kaltim tumbuh lebih dibandingkan periode lalu. Impor non migas tumbuh sebesar 68,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 60,19% (yoy) (Grafik I.49). Peningkatan impor non migas sejalan dengan investasi Kaltim triwulan IV 2018 yang mengalami akselerasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁴, peningkatan impor non migas disebabkan oleh pertumbuhan impor barang konsumsi dan modal. Impor kedua barang tercatat tumbuh sebesar 100,33% (yoy) dan 141,48% (yoy) (Grafik I.50). Beberapa jenis komoditas impor yang tumbuhnya signifikan antara lain mesin-mesin industri seperti pompa (74) dan peralatan penunjang infrastruktur pembangkit listrik (71). Kedua kelompok SITC tersebut tercatat tumbuh sebesar 88% (yoy) dan 619% (yoy).

⁴Dipublikasikan melalui Berita Resmi Statistik Ekspor dan Impor Kaltim oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim secara bulanan



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.49 Perkembangan Impor Nonmigas Kaltim



Grafik I.50 Impor Barang Modal dan Bahan Baku Kaltim

Berdasarkan komoditasnya, impor luar negeri Kaltim masih didominasi oleh bahan bakar mineral, lebih spesifik minyak mentah. Keberadaan pengolahan kilang minyak di Balikpapan menjadikan kebutuhan untuk minyak mentah tinggi terutama sejalan dengan penurunan lifting migas di wilayah kerja Kaltim. Minyak mentah memiliki pangsa sebesar 70,40 persen dalam keseluruhan impor Kaltim (Tabel I.5) Disamping minyak mentah, Kaltim juga mengimpor reaktor nuklir, kendaraan, dan besi/baja untuk kebutuhan infrastruktur.

Tabel I.5 Komoditas Utama Impor Kaltim Tahun 2018

No	Komoditas Impor Utama	Pangsa (%)
1	Bahan Bakar Mineral dan Batubara (27)	70.40
2	Reaktor Nuklir (84)	15.12
3	Kendaraan Selain Kereta (87)	2.72
4	Barang dari Besi atau Baja (73)	2.55
5	Karet (40)	2.13
Total 5 Komoditas		92.92

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan negara asal, sampai dengan Desember 2018, impor terbesar Kaltim berasal dari Nigeria. Impor terbesar Kaltim dari Nigeria adalah minyak mentah, sesuai dengan posisi Nigeria sebagai produsen minyak mentah dunia terbesar keenam tahun 2018. Adapun pangsa impor Kaltim dari Nigeria mencapai 28,03%. Disamping Nigeria, Kaltim juga mengimpor barang dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, dan Tiongkok yang utamanya adalah barang penunjang industri dalam bentuk barang modal (Tabel I.6).

Tabel I.6 Negara Asal Utama Impor Kaltim Tahun 2018

No	Negara Asal Impor Utama	Pangsa (%)
1	Nigeria	28.03
2	Korea Selatan	8.32
3	Malaysia	8.13
4	Singapura	7.81
5	Tiongkok	7.12
Total 5 Negara		59.42

Sumber: BPS, diolah

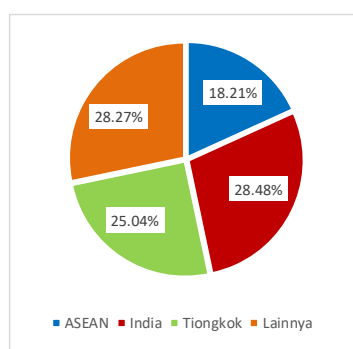
Impor luar negeri Kaltim tahun 2018 tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tingginya impor disebabkan oleh kebutuhan barang konstruksi sejalan dengan tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur di Kaltim. Harga minyak dunia yang sempat meningkat juga menyebabkan tingginya nilai impor Kaltim 2018. Lebih lanjut, perbaikan kinerja lapangan usaha utama mendorong impor barang modal untuk mendukung ekspansi usaha pertambangan.

Kinerja impor luar negeri triwulan I 2019 diperkirakan melambat. Perlambatan impor luar negeri diperkirakan bersumber dari penurunan kebutuhan barang konstruksi sejalan dengan proyek infrastruktur yang mulai selesai. Disamping itu, kebutuhan pemenuhan barang modal untuk investasi swasta juga diperkirakan belum tinggi terutama dengan outlook penurunan harga batubara pada tahun 2018.

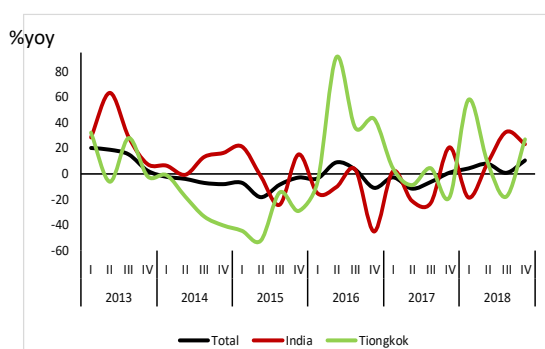
BOKS I.1

“Potensi India, Pasar Batubara terbesar Kaltim”

Di pasar perdagangan dunia, terdapat dua negara berkembang yang berperan sebagai importir terbesar batubara, yaitu Tiongkok dan India. Meskipun Tiongkok adalah importir terbesar tetapi negara ini juga merupakan produsen dengan cadangan batubara terbesar di dunia. Produksi batubara Tiongkok tahun 2017 tercatat sebesar 3,67 miliar mt, relatif besar dibandingkan Indonesia sebesar 485 juta mt. Pertumbuhan permintaan batubara Tiongkok yang masih terus mengalami peningkatan adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi terutama di sisi Industri. Pabrik-pabrik manufaktur di Tiongkok mengandalkan batubara sebagai sumber energi utama. Hal ini tidak terlepas bahwa batubara merupakan energi yang relatif murah dibandingkan energi dalam bentuk liquid ataupun gas lainnya. Di sisi lain India, merupakan pasar batubara yang terus berkembang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,7% (yoy) dan populasi sebesar 1,3 miliar penduduk, India memiliki ruang pemanfaatan batubara yang cukup besar.



Grafik I.51 Pangsa Pasar Ekspor Batubara Kaltim



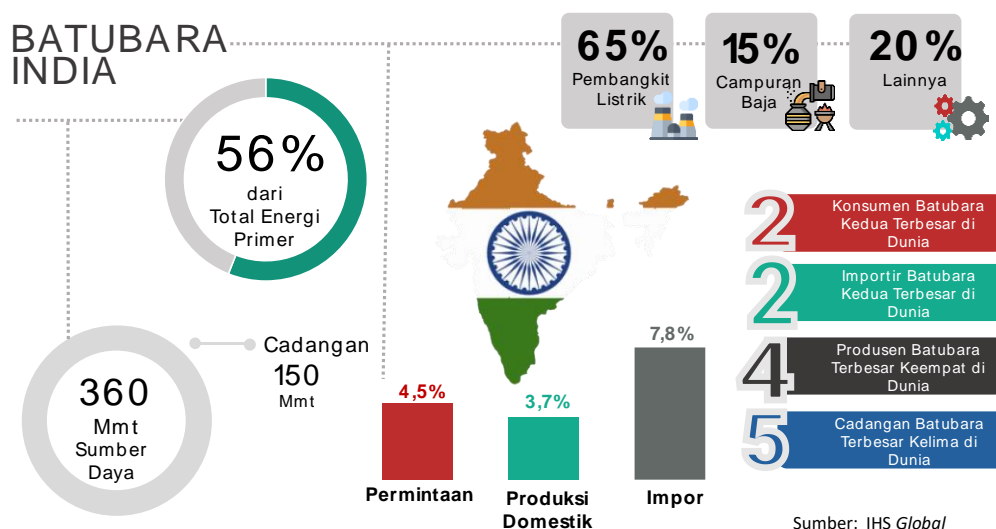
Grafik I.52 Pertumbuhan Ekspor Batubara Kaltim

Berdasarkan negara tujuan, ekspor batubara Kaltim terbesar bertujuan ke India dan Tiongkok yaitu sebesar 28,48% dan 25,04% (Grafik I.1). Pertumbuhan volume ekspor batubara Kaltim mulai kembali menunjukkan tren positif sejak triwulan III 2017. Namun demikian ekspor batubara ke Tiongkok memiliki titik *peak* dan *through* yang cukup tinggi, disebabkan sering berubah-ubahnya kebijakan impor pemerintah Tiongkok. Pada bulan-bulan tertentu pemerintah Tiongkok menerapkan restriksi impor dengan memperketat pengurusan bea cukai di pelabuhan impor batubara utama. Akibatnya, loading *vesse/* menjadi

lambat sehingga ekspor ke Tiongkok turun. Sedikit berbeda, tren ekspor batubara ke India menunjukkan peningkatan sejak triwulan I 2017 (Grafik I.2). Dalam laporan publikasinya, India Ministry of Power menyebutkan bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan tahunan produksi listrik di India sebesar 5,69%. Kapasitas terpasang tercatat sebesar 349 GW (Jan-2019), lebih besar dibandingkan Indonesia sebesar 62,6 GW (Des-2018). Adapun sumber energi utama India bersumber dari tenaga termal (termasuk batubara) sebesar 64,09%. Dengan ekonomi yang diperkirakan tumbuh sebesar 7.5% tahun 2019, India masih menjadi pasar potensial untuk ekspor batubara Kaltim.

Berdasarkan data IHS Global, konsumsi batubara India tahun 2018 diperkirakan 900 juta ton atau mengalami pertumbuhan rata-rata (2011-2018) sebesar 4,5% (yoy). Di sisi lain, produksi batubara domestik India tahun 2018 diperkirakan sekitar 700 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,7% (yoy). Dengan demikian, India masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan batubara domestiknya. Impor batubara India tahun 2018 diperkirakan sebesar 200 juta ton atau tumbuh rata-rata sebesar 7,8% (yoy). Berdasarkan volumenya, impor batubara India sebagian besar berasal dari Indonesia dengan pangsa 47%, disusul oleh Australia sebesar 22% dan Afrika Selatan 18%. Batubara asal Indonesia digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik sehingga batubara yang dibutuhkan adalah yang berkalori 4.000-5.000 kcal/kg. Kondisi ini sesuai dengan spesifikasi produksi batubara asal Indonesia yang sebesar 43,85% berkalori 4200-5000 kcal/kg.

Gambar I.2 Profil Industri Batubara India



Hingga saat ini India masih belum mampu memenuhi kebutuhan domestiknya disebabkan oleh jaringan infrastruktur untuk distribusi batubara yang belum mengakomodir keperluan pembangkit listrik atau industri lainnya. Sebagian besar cadangan batubara terletak di bagian Timur India dan berada di *remote area* (beberapa lokasi terletak di area pegunungan). Perbedaan mendasar transportasi di India dengan Indonesia, khususnya Kalimantan adalah media transportasi yang digunakan. Pengangkutan batubara di Kalimantan memanfaatkan aliran sungai sebagai media utama pengangkutan dari *pit* ke pelabuhan lautnya (*port*). Di India, pengangkutan batubara dari pit ke PLTU atau industri menggunakan kereta api batubara. Saat ini, kondisi infrastruktur pengangkutan batubara di India baik kereta dan relnya kurang memadai sehingga mempersulit peningkatan produksi oleh perusahaan. Pembangunan terkait infrastruktur dimaksud terus berjalan tetapi pertumbuhan kebutuhan batubara lebih cepat dibandingkan perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh sebab itu, India cukup bergantung pada batubara impor untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Pada tahun 2019, kenaikan impor batubara India diperkirakan sebesar 10% untuk menutupi gap pasokan batubara dan peningkatan kebutuhan pembangkit listrik. Peningkatan impor batubara India tersebut menjadi peluang bagi sektor pertambangan di Kaltim untuk meningkatkan volume penjualan ekspor ke negara tersebut.

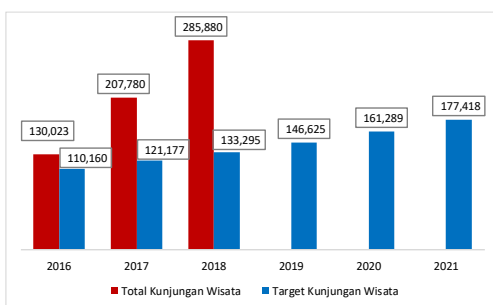
“Pengembangan Pariwisata Kaltim melalui *Integrated Tourism*”

Kabupaten Berau

Berau

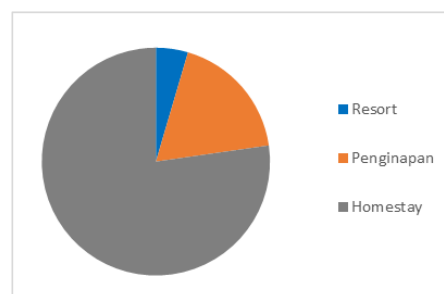
Obyek wisata di Kalimantan Timur yang telah dikenal luas pada lingkup nasional dan internasional adalah Kepulauan Derawan, di kabupaten Berau (Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki, dan Kakaban). Pada tahun 2018 total kunjungan wisata kabupaten Berau baik mancanegara dan domestik tercatat sebanyak 285.880 kunjungan, atau 214,47% dari target 2018 (Grafik I.53). Namun demikian, sebagian besar kunjungan masih dilakukan oleh turis domestik. Pangsa kunjungan domestik Berau tahun 2018 tercatat sebesar 99% dari keseluruhan kunjungan wisata.

Di sisi atraksi, keberadaan *stingless jellyfish* (ubur-ubur tidak menyengat) dan *whale shark* menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan wisata di kepulauan ini. Kepulauan Derawan juga memiliki kekayaan bawah laut yang bersaing dengan Raja Ampat, Wakatobi, dan Perairan Pulau Komodo dengan 26 diving spot. Dengan demikian, di sisi atraksi pariwisata bahari, Kepulauan Derawan telah memiliki keunggulan yang cukup lengkap bagi para wisatawan.



Sumber: Disbudpar Kab. Berau

Grafik I.53 Target dan Realisasi Kunjungan Wisata Kabupaten Berau



Sumber: Disbudpar Kab. Berau

Grafik I.54 Pangsa Akomodasi Kepulauan Derawan Berdasarkan Jenisnya

Meskipun telah menunjang di sisi atraksi, tetapi diperlukan pengembangan di sisi amenities dan aksesibilitas untuk dapat meningkatkan kunjungan wisata. Sampai saat ini,

kepulauan Derawan belum memiliki hotel dan hanya 9 resort, relatif sedikit untuk menunjang upaya *quality tourism* tetapi cukup bila target wisatawan adalah *mid-low budget tourist* (Grafik. 1.54). Ketersediaan restoran dan rumah makan yang menunjang untuk *luxury tourism* juga masih terbatas. Demikian juga dengan *coverage* jaringan internet yang saat ini menjadi kebutuhan utama dalam berwisata, baik di Pulau Derawan maupun beberapa wilayah di Pulau Maratua dan Sangalaki.

Namun demikian, sasaran wisatawan *mid-low budget* kurang sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk berwisata ke kepulauan Derawan. Di sisi aksesibilitas, penerbangan dengan tujuan Bandara Kalimantan (BEJ) saat ini hanya dapat ditempuh dengan transit di kota Balikpapan dan Samarinda. Hal ini menjadikan biaya transportasi ke kepulauan Derawan menjadi kurang kompetitif dibandingkan daerah wisata lainnya seperti Bali, Lombok, dan Bangka Belitung terutama ditengah harga tiket pesawat yang cukup tinggi seperti saat ini. Lebih lanjut, berwisata ke kepulauan Derawan belum mengakomodir kehadiran para *backpacker* dengan belum tersedianya kapal reguler (diluar pengangkutan barang dan *chartered*) yang dapat melayani turis perseorangan dari Tanjung Batu ke Pulau Derawan. Selain itu, berwisata ke kepulauan Derawan juga belum mengakomodir *solo traveler/traveler independent* karena belum banyak tersedia paket wisata *hoping island on the spot* sehingga seluruh rangkaian harus menggunakan jasa *tour*.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Berau akan mengembangkan potensi pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Berau dengan mengintegrasikan 4 (empat) kawasan wisata sebagai berikut:

Tabel 1.7 Zona Kawasan Wisata Kabupaten Berau Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Kawasan Wisata	Kecamatan
Perkotaan	Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur
Pesisir dan Perbatasan Kabupaten	Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-biduk
Pesisir Kepulauan dan Perbatasan Negara	Derawan dan Maratua
Sedang Berkembang	Segah dan Kelay

Pengembangan Pariwisata Kota Samarinda

Sejak 20 November 2018, Bandara APT Pranoto, Samarinda telah beroperasi untuk penerbangan ke sejumlah kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, dan Banjarmasin. Terbukanya akses melalui udara ke kota Samarinda merupakan sebuah *breakthrough* yang telah lama dinantikan oleh masyarakat kota Samarinda dan sekitarnya. Sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki berbagai keunikan di geografis ataupun budaya. Dilalui oleh sungai terpanjang kedua di Indonesia, Sungai Mahakam, menjadikan potensi wisata susur sungai cukup besar. Samarinda juga memiliki Islamic center terbesar kedua di Indonesia setelah mesjid Istiqlal di Jakarta. Disamping kedua obyek wisata tersebut, kota Samarinda juga memiliki wisata lokal dengan keberadaan wisata kuliner kampung nasi kuning, kampung tenun, dan desa adat Pampang.

Sejak 20 November 2018, Bandara APT Pranoto, Samarinda telah beroperasi untuk penerbangan ke sejumlah kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, dan Banjarmasin. Terbukanya akses melalui udara ke kota Samarinda merupakan sebuah *breakthrough* yang telah lama dinantikan oleh masyarakat kota Samarinda dan sekitarnya *karena* memotong waktu perjalanan luar kota cukup signifikan. Tidak hanya penerbangan *outbound* yang dinantikan tetapi penerbangan *inbound* menjadi harapan bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di Samarinda dan sekitarnya. Pada bulan Desember 2018 (bulan pertama operasional penuh Bandara APT Pranoto), tercatat *inbound* sebanyak 22.009 penumpang (Tabel I.8).

Tabel I.8 Arus Penumpang Bandara APT Pranoto

	<i>Inbound</i>	<i>Outbound</i>
Desember 2018	22,009	24,125
Januari 2019	35,494	31,477

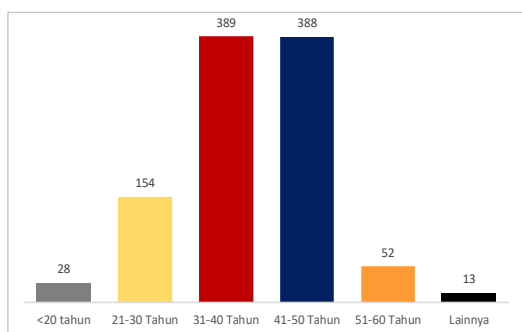
Sumber: Dinas Perhubungan Kalimantan Timur

Selama ini, kunjungan wisata ke Samarinda selalu terkendala aksesibilitas sehingga perkembangan pariwisata di Kota Tepian relatif berjalan lambat. Terbukanya akses melalui udara juga membuka ruang untuk pelaksanaan kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE) di Samarinda. Dengan demikian berpotensi mendorong peningkatan lapangan usaha akomodasi dan makan minum serta perdagangan di kota Samarinda. Lebih lanjut, terlaksananya MICE juga membuka ruang peningkatan kunjungan wisata ke beberapa obyek wisata di kota Samarinda melalui integrasi MICE-Wisata. Skema MICE-Wisata dapat

dilakukan dengan memasukkan paket *half day tour* atau *one day trip* ke dalam setiap kegiatan MICE yang ada di Samarinda. Kedua paket dimaksud akan dilaksanakan satu hari setelah kegiatan berakhir sehingga para peserta MICE memperoleh kesempatan untuk menjelajah dan berbelanja di kota Samarinda.

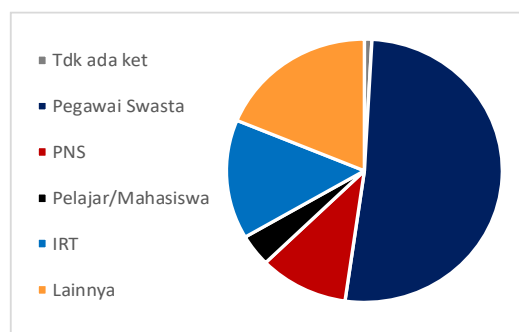
Momentum peningkatan kedatangan pengunjung melalui MICE harus dioptimalkan. Amenitas dan jasa di masing-masing obyek wisata harus dipersiapkan dengan baik untuk melayani segala kebutuhan wisatawan. Sebagai contoh, keberadaan wisata susur sungai Mahakam di Samarinda harus dipersiapkan dari sisi dermaga yang mengakomodir untuk tujuan wisata, kebersihan kapal, serta waktu trip yang sesuai dengan waktu selesainya kegiatan *meeting*. Samarinda sebagai ibukota dari provinsi dengan ekonomi terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi di sisi kegiatan MICE.

Guna mengidentifikasi profil pengunjung yang datang melalui Bandara APT Pranoto, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur melakukan *Passenger Entry Survey* tanggal 17-23 Februari 2019 dengan jumlah responden sebanyak 1.024 penumpang yang datang di Samarinda. Selama periode survei, sebesar 76% responden berumur 31-50 tahun (produktif) (Grafik I.55). Berdasarkan pekerjaannya, sebesar 51% responden bekerja di sektor swasta (Grafik I.56). Spesifik pada responden dengan rentang umur 31-50 tahun, sebesar 59% merupakan pekerja di sektor swasta



Sumber: *Passenger Entry Survey*

Grafik I.55 Profil Responden Berdasarkan Umur

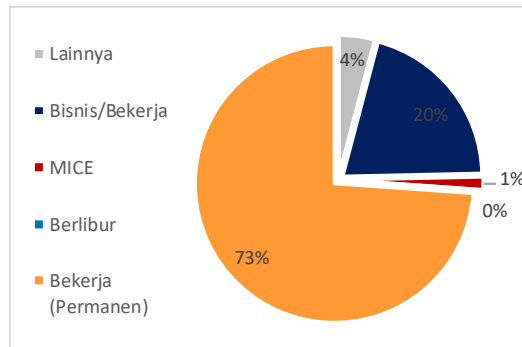


Sumber: *Passenger Entry Survey*

Grafik I.56 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil survey, sebagian besar penumpang yang datang melalui Bandara APT Pranoto adalah penduduk kota Samarinda (bermukim lebih dari 1 tahun) dengan pangsa sebesar 74%. Keberadaan bandara saat ini belum banyak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan MICE, tampak dari pangsa responden yang hanya 1% (Grafik I.57).

Kedepannya, potensi MICE masih cukup tinggi sejalan dengan rencana penambahan jumlah penerbangan baik dari rute penerbangan yang sudah ada ataupun dari kota besar lainnya.



Sumber: Passenger Entry Survey

Grafik I.57 Profil Responden Berdasarkan Tujuan

II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja keuangan Pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penyerapan APBD didorong oleh naiknya belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.

2.1 APBD Pemerintah Provinsi

Realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)

di sepanjang tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp10,24 triliun atau 106,77% dari target penerimaan tahun 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan meningkat 37,40% (yoy). Faktor utama meningkatnya pendapatan daerah Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2018 adalah kenaikan pendapatan transfer yang tercatat meningkat sebesar 61,73% (yoy) (Tabel II.1).

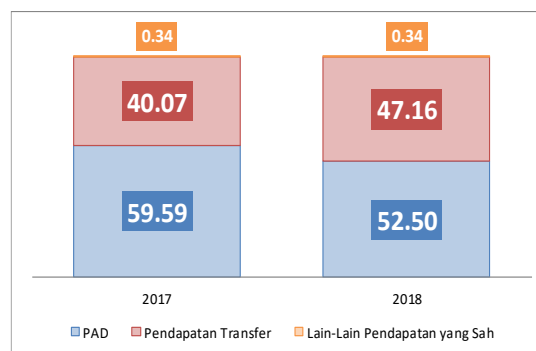
Tabel II.1 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)

	2017			2018			Selisih Realisasi 2017-2018	Growth Realisasi 2017-2018	2019 APBD Rp Juta
	APBD-P Rp juta	Realisasi s.d. Tw-IV Rp juta	%	APBD-P Rp juta	Realisasi s.d. Tw-IV Rp juta	%			
PENDAPATAN (I+II+III)	8,223,731	7,453,350	90.63	9,591,235	10,240,900	106.77	2,787,550	37.40	10,549,624
I. PAD	4,167,590	4,441,795	106.58	5,129,057	5,376,751	104.83	934,956	21.05	5,452,964
Pajak daerah	3,275,137	3,433,754	104.84	4,020,200	4,713,431	117.24	1,279,678	37.27	4,420,000
Retribusi daerah	19,565	16,617	84.94	19,956	18,920	94.81	2,302	13.86	28,617
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	212,334	217,807	102.58	195,941	177,594	90.64	(40,213)	-18.46	224,524
Lain-lain PAD yang sah	660,553	773,617	117.12	892,960	466,806	52.28	(306,811)	-39.66	779,824
II. Pendapatan Transfer (a+b)	4,032,147	2,986,271	74.06	4,424,922	4,829,781	109.15	1,843,509	61.73	5,069,716
a. Dana Perimbangan	4,024,647	2,978,771	74.01	4,424,922	4,829,781	109.15	1,851,009	62.14	5,059,833
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	2,166,182	1,710,695	78.97	2,539,449	2,991,231	117.79	1,280,536	74.85	3,038,477
Dana alokasi umum	714,907	714,907	100.00	767,682	767,682	100.00	52,776	7.38	815,694
Dana alokasi khusus	1,143,559	553,170	48.37	1,117,791	1,070,867	95.80	517,698	93.59	1,205,662
b. Transfer Pemerintah Pusat	7,500	7,500	100	-	-	-	(7,500)	-100.00	9,883
Dana Penyesuaian	7,500	7,500	100	-	-	-	(7,500)	-100.00	9,883
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	23,994	25,284	105.37	37,256	34,368	92.25	9,084	35.93	26,944
Pendapatan Hibah	8,630	10,235	118.60	3,072	3,072	100.00	(7,163)	-69.99	12,272
Pendapatan Lainnya	15,365	15,049	97.94	34,184	31,296	91.55	16,247	107.97	14,672

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

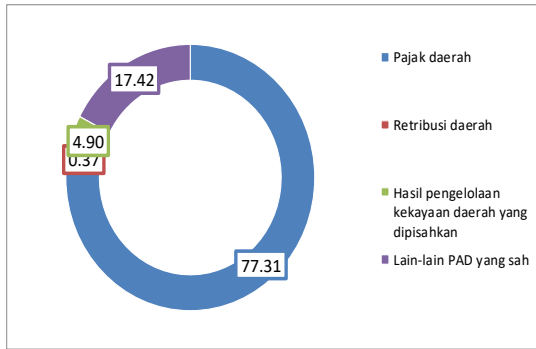
Secara kumulatif tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan pencapaian sebesar 104,83% dari target tahun 2018 atau senilai Rp5,38 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp4,44 triliun (Tabel II.1). Kontributor utama peningkatan realisasi PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan masing-masing peningkatan sebesar Rp1,28 triliun dan Rp2,3 miliar. Sementara itu, sub-komponen hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan realisasi lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar

Rp177,6 miliar dan Rp466,81 miliar pada tahun 2018, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp217,81 miliar dan Rp773,62 miliar. Sumber PAD terbesar bagi Pemprov Kaltim berasal dari pajak daerah. Adapun pajak daerah masih dapat dioptimalisasi melalui pajak air permukaan, mengingat kondisi geografis Kaltim sehingga mayoritas distribusi barang menggunakan angkutan sungai. Realisasi pendapatan transfer Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, dengan pencapaian sebesar 109,15% dari target tahun 2018. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 93,59% (yoy), diikuti oleh Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 74,85% (yoy). Kontributor utama pendapatan APBD Pemprov Kaltim tahun 2018 masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 52,50%, relatif sama dibandingkan dengan tahun 2017 (Grafik II.1).



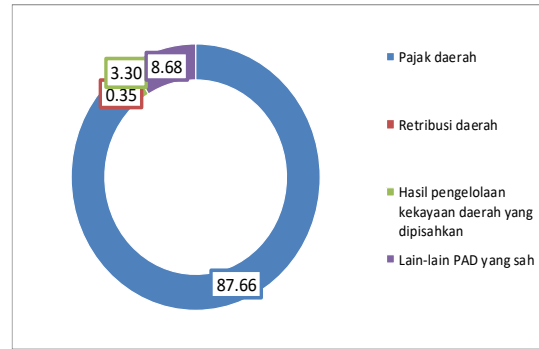
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim
 Tahun 2017 dan 2018

Realisasi PAD Kaltim sampai dengan tahun 2018 didominasi oleh pajak daerah sebesar 88%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77% (Grafik II.2-3). Peningkatan pajak daerah tahun 2018 bersumber dari pajak kendaraan pasca kebijakan keringanan pajak kendaraan di tahun 2017 lalu. Pemprov Kaltim terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dengan cara menggali potensi penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka Samsat Payment Point dan meningkatkan status Samsat Pembantu menjadi Samsat Penuh sehingga cek fisik kendaraan untuk penggantian STNK bisa langsung dilakukan di Samsat tersebut. Selain itu, Pemprov Kaltim juga bekerjasama dengan beberapa perbankan terkait pembayaran pajak melalui ATM untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

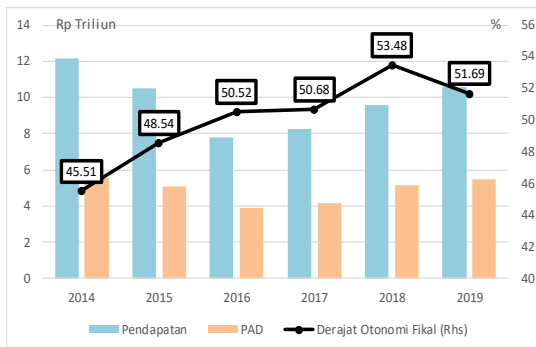
Grafik II.2 Komponen Realisasi PAD APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2017



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

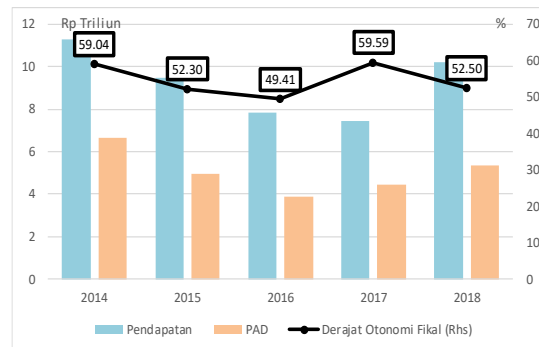
Grafik II.3 Komponen Realisasi PAD APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2018

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Kaltim sampai dengan tahun 2018 tercatat sebesar 52,50%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 51,69% (Grafik II.4-5). Pencapaian realisasi DOF yang lebih baik bersumber dari peningkatan kontribusi penghasilan melalui pajak daerah tahun 2018. Namun demikian, pencapaian DOF tahun 2018, masih lebih rendah dibandingkan realisasi DOF pada tahun 2017 sebesar 59,59%. Dalam 4 tahun terakhir, realisasi DOF Kaltim selalu lebih tinggi dibandingkan targetnya terkecuali pada tahun 2017. DOF merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencari pendapatan yang bersumber dari daerahnya masing-masing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Grafik II.4 Derajat Otonomi Fiskal Kalimantan Timur (Berdasarkan Anggaran s.d Tahun 2019)

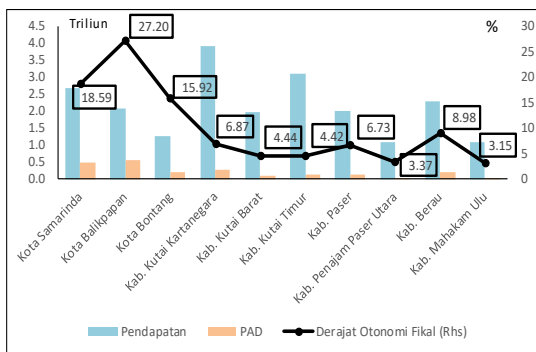


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Grafik II.5 Derajat Otonomi Fiskal Kalimantan Timur (Berdasarkan Realisasi s.d. Tahun 2018)

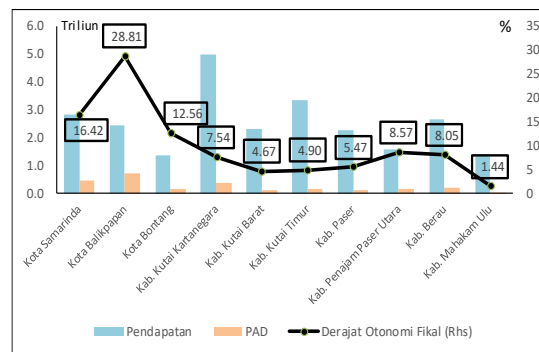
Secara spasial, Kota Balikpapan memiliki DOF tertinggi sementara Kabupaten Mahulu memiliki DOF yang paling rendah. Realisasi DOF hingga tahun 2018 menunjukkan Kota Balikpapan memiliki DOF terbesar dengan nilai 27,20% diikuti dengan Kota Samarinda sebesar 18,59% dan Kota Bontang sebesar 15,92% (Grafik II.6). Realisasi DOF terendah masih terjadi di

Kabupaten Mahulu sebesar 3,15%. Sebagai kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2013, Mahulu masih bergantung pada dana transfer sebagai sumber utama pendapatannya. Disamping itu, aktivitas ekonomi di kabupaten tersebut masih relatif kecil sehingga belum dapat mengandalkan pendapatan dari PAD. DOF Kota Balikpapan tahun 2019 sebesar 28,81% diikuti Kota Samarinda sebesar 16,42% dan Kota Bontang sebesar 12,56% (Grafik II.7). Kontribusi PAD terhadap pendapatan di wilayah perkotaan relatif tinggi dibandingkan kabupaten penghasil sumber daya alam besar seperti Kukar dan Kutim. Konsentrasi aktivitas keuangan, perdagangan, dan jasa lainnya yang terjadi di wilayah perkotaan berdampak pada kontribusi pajak dan retribusi daerah lebih tinggi. Adapun nominal pendapatan yang besar bagi Kutim dan Kukar bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba yang berada dalam kategori pendapatan transfer.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Grafik II.6 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur (Berdasarkan Realisasi s.d. Tahun 2018)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Grafik II.7 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur (Berdasarkan Anggaran Tahun 2019)

Pada tahun 2019, APBD Pemprov Kaltim (sisi pendapatan) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan APBD Pemprov Kaltim tahun 2019 tercatat Rp10,55 triliun atau meningkat 9,99% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,59 triliun. Peningkatan pendapatan Pemprov Kaltim tahun 2019 dipengaruhi oleh naiknya komponen pendapatan transfer dan PAD yang masing-masing tumbuh 14,57% (yoy) dan 6,32% (yoy). Sementara itu, pendapatan lainnya yang sah menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2019.

Realisasi Belanja

Penyerapan anggaran Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemprov Kaltim tahun 2018 tercatat Rp9,09 triliun atau 89,84% dari pagu anggaran tahun 2018. Pada tahun 2017, realiasi belanja Pemprov

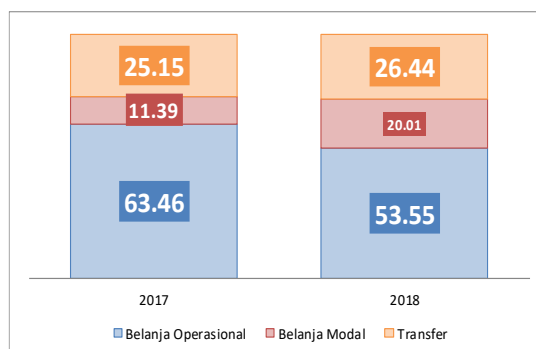
Kaltim tercatat lebih rendah, sebesar Rp8,24 triliun atau 93,26% dari total pagu anggaran tahun 2017 (Tabel II.2).

Tabel II.2 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)

	2017			2018			Selisih Realisasi 2017-2018	Growth Realisasi 2017-2018	2019 APBD Rp Juta
	APBD-P	Realisasi s.d. Tw-IV		APBD-P	Realisasi s.d. Tw-IV				
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	2017-2018	2017-2018	Rp Juta
BELANJA (I+II+III+IV)	8,834,897	8,239,373	93.26	10,128,810	9,099,922	89.84	860,548	10.44	10,669,670
I. Belanja Operasional	5,705,336	5,228,647	91.64	5,639,965	4,872,752	86.40	(355,895)	-6.81	6,634,966
Belanja Pegawai	1,942,639	1,674,524	86.20	1,707,144	1,509,100	88.40	(165,424)	-9.88	2,067,437
Belanja Barang	2,001,135	1,893,270	94.61	2,155,013	1,640,708	76.13	(252,563)	-13.34	2,419,924
Belanja Hibah	1,035,432	947,493	91.51	1,077,644	1,029,946	95.57	82,454	8.70	765,271
Belanja Bantuan sosial	5,010	4,188	83.58	5,809	4,775	82.19	587	14.02	9,775
Belanja Bantuan Keuangan	721,121	709,172	98.34	694,354	688,223	99.12	(20,949)	-2.95	1,372,559
II. Belanja Modal	1,019,251	938,335	92.06	2,071,097	1,820,494	87.90	882,159	94.01	1,430,451
Belanja Tanah	730	575	78.76	1,449	1,311	90.51	736	127.99	
Belanja Peralatan Mesin	220,471	186,435	84.56	336,129	221,411	65.87	34,976	18.76	
Belanja Bangunan dan Gedung	133,550	107,332	80.37	148,253	101,506	68.47	(5,826)	-5.43	
Belanja Jalan, Irigasi dan	658,767	639,851	97.13	1,552,959	1,489,315	95.90	849,464	132.76	
Belanja Aset Tetap Lainnya	5,732	4,142	72.26	32,307	6,951	21.52	2,809	67.82	
Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
III. Belanja tidak terduga	6,300	17	0.27	6,334	394	6.22	377	2,226.15	25,000
Belanja tidak terduga	6,300	17	0.27	6,334	394	6.22	377	2,226.15	25,000
IV. Transfer	2,104,010	2,072,374	98.50	2,411,414	2,406,281	99.79	333,907	16.11	2,579,253
Bagi Hasil Pajak ke	2,104,010	2,072,374	98.50	2,411,414	2,406,281	99.79	333,907	16.11	2,579,253

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi belanja operasional sepanjang tahun 2018 sebesar Rp4,87 triliun atau sebesar 86,40% dari pagu anggaran belanja operasional tahun 2018. Peningkatan belanja operasional disebabkan oleh peningkatan realisasi sub-komponen belanja pegawai dan belanja hibah. Komponen belanja bantuan keuangan tercatat mengalami peningkatan dan memiliki porsi terbesar dari sisi pencapaian dari pagu anggaran belanja operasional tahun 2018 yaitu mencapai 99,12%. Realisasi belanja modal di tahun 2018 tercatat Rp1,82 triliun atau 87,90% dari pagu belanja modal tahun 2018. Capaian ini lebih tinggi dari realisasi belanja modal di periode yang sama pada tahun 2017 yang tercatat Rp938,34 miliar. Peningkatan realisasi belanja modal Pemprov Kaltim di tahun 2018 ini disumbang oleh peningkatan yang cukup signifikan pada belanja jalan, irigasi dan jaringan yang tercatat sebesar Rp1,49 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp639,85 miliar. Sementara untuk realisasi belanja aset tetap masih relatif rendah sampai dengan posisi sepanjang tahun 2018. Berdasarkan kontribusinya, belanja operasional masih mendominasi komponen realisasi belanja Pemprov Kaltim tahun 2018 sebesar 53,55%. Komponen terbesar kedua dimiliki oleh belanja transfer dengan pangsa 26,44% dan terakhir belanja modal sebesar 20,01%. Pangsa komponen transfer dan belanja modal mengalami kenaikan pada dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Di sisi lain, pangsa komponen belanja operasional mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 63,46%. (Grafik II.8).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Grafik II.8 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim
 Tahun 2017 dan 2018

Seiring dengan peningkatan pendapatan, APBD Pemprov Kaltim (sisi belanja) tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu belanja APBD Pemprov Kaltim tahun 2019 tercatat Rp10,67 triliun atau meningkat 5,34% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,13 triliun. Peningkatan pagu belanja Pemprov Kaltim tahun 2019 dipengaruhi oleh naiknya komponen belanja operasional, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Di sisi lain, pagu belanja modal mengalami penurunan sebesar -30,93% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya. Hampir selesainya proyek-proyek infrastruktur dengan skema *Multi Years Contract* (MYC) menjadi penyebab utama turunnya pagu belanja Pemprov Kaltim tahun 2019.

2.2 APBD Kabupaten/Kota

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan 10 kabupaten/kota di wilayah Kaltim sepanjang 2018 mencapai Rp21,49 triliun atau 94,32% dari target pendapatan tahun 2018. Capaian realisasi pendapatan hingga tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp17,28 triliun atau 86,53% dari target pendapatan tahun 2017. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadinya peningkatan realisasi pendapatan sebesar 24,35% (yoy) pada tahun 2018 (Tabel II.3).

Adapun peningkatan realisasi pendapatan tertinggi dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang tercatat sebesar 37,04% (yoy) atau meningkat Rp839,80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Paser (Pemkab Paser) menempati urutan kedua dengan tingkat peningkatan sebesar 35,28% (yoy) atau meningkat sebesar Rp524,31 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya peningkatan

juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Berau (Pemkab Berau) sebesar 25,43% (yoy), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sebesar 22,57% (yoy), Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda) sebesar 22,38% (yoy), Pemerintah Kota Balikpapan (Pemkot Balikpapan) sebesar 22,03% (yoy) dan Pemerintah Kota Bontang (Pemkot Bontang) sebesar 19,72% (yoy). Secara keseluruhan kabupaten/kota mengalami peningkatan realisasi pada triwulan IV 2018. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan realisasi pendapatan terendah sepanjang tahun 2018 sebesar 12,58% (yoy) atau tetap meningkat sebesar Rp120,20 miliar. Di sisi lain, jika melihat dari share realisasinya, Pemerintah Kabupaten Berau (Pemkab Berau) menempati urutan pertama dalam hal realisasi anggaran pendapatan tertinggi yaitu Rp2,28 triliun pada sepanjang 2018 atau 107,1% dari target pendapatan tahun 2018.

Pada tahun 2019, APBD kabupaten/kota di wilayah Kaltim (sisi pendapatan) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan APBD kabupaten/kota di wilayah Kaltim tahun 2019 tercatat Rp25,21 triliun atau meningkat 10,65% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,59 triliun. Peningkatan pendapatan kabupaten/kota Kaltim tahun 2019 terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kutai Timur yang mengalami penurunan sebesar -10,54% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel II.3 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019
	APBD-P	Realisasi s.d. Tw-IV		APBD-P	Realisasi s.d. Tw-IV		APBD
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp Juta
PENDAPATAN							
Kota Samarinda	2,363.20	2,193.65	92.83	2,542.66	2,684.57	105.58	2,815.80
Kota Balikpapan	1,938.31	1,705.21	87.97	2,227.83	2,080.94	93.41	2,464.40
Kota Bontang	1,021.58	1,046.83	102.47	1,190.84	1,253.26	105.24	1,351.23
Kab. Kutai Kartanegara	4,035.14	3,207.18	79.48	4,165.97	3,931.19	94.36	5,002.31
Kab. Kutai Barat	1,878.15	1,650.51	87.88	2,170.31	1,974.77	90.99	2,310.67
Kab. Kutai Timur	2,763.78	2,267.52	82.04	3,755.85	3,107.32	82.73	3,359.94
Kab. Paser	1,652.77	1,486.31	89.93	1,977.35	2,010.61	101.68	2,256.07
Kab. Penajam Paser Utara	1,222.41	948.01	77.55	1,295.85	1,087.21	83.90	1,598.14
Kab. Berau	1,945.60	1,818.93	93.49	2,130.95	2,281.46	107.06	2,649.84
Kab. Mahakam Ulu	1,149.88	955.84	83.13	1,324.76	1,076.04	81.23	1,401.17
Total Kab/Kota Kaltim	19,970.81	17,279.97	86.53	22,782.37	21,487.37	94.32	25,209.56

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi Belanja

Realisasi belanja di 10 kabupaten/kota di wilayah Kaltim sepanjang 2018 mencapai Rp20,96 triliun atau 82,58% dari pagu belanja tahun 2018. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar Rp3,64 triliun dibandingkan tahun 2017 yang tercatat Rp 17,32 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kaltim sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,02% (yoy). Peningkatan realisasi belanja tertinggi dialami oleh Pemkab PPU yang meningkat sebesar 45,92% (yoy). Peningkatan tersebut disusul oleh Pemkab Kutim sebesar 38,04% (yoy), Pemkab Mahulu sebesar 34,64% (yoy) dan Pemkab Kubar sebesar 29,98% (yoy). Kab. Kukar adalah daerah yang realisasi belanja terendah pada triwulan IV 2018 sebesar 6,30% (yoy).

Adapun penyerapan anggaran tertinggi sepanjang tahun 2018 dicapai oleh Pemkot Samarinda yaitu Rp2,49 triliun atau 91,69% dari pagu belanja tahun 2018. Penyerapan anggaran tertinggi kedua dicapai oleh Pemkab PPU dengan realisasi belanja sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp1,44 triliun atau 87,02%, Pemkab Paser dengan realisasi belanja sebesar Rp1,85 triliun atau 86,37%. Sementara untuk penyerapan terendah dialami oleh Pemkab Berau dengan realisasi sampai dengan 2018 sebesar Rp2,08 triliun atau 75,96% dari pagu tahun 2018. Tingkat rendahnya penyerapan disusul oleh Pemkab Kutim dengan realisasi sepanjang tahun 2018 sebesar Rp3,11 triliun atau 76,48% dari pagu tahun 2018 (Tabel II.4).

Tabel II.4 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBD Tahun 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019
	APBD-P	Realisasi s.d. Tw-IV		APBD-P	Realisasi s.d. Tw-IV		APBD
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp Juta
BELANJA							
Kota Samarinda	2,541.34	2,190.16	86.18	2,726.53	2,499.91	91.69	2,815.80
Kota Balikpapan	2,022.02	1,649.88	81.60	2,407.57	1,993.75	82.81	2,437.77
Kota Bontang	1,096.22	932.35	85.05	1,380.20	1,185.67	85.91	1,451.23
Kab. Kutai Kartanegara	4,792.73	3,362.60	70.16	4,399.32	3,574.46	81.25	5,105.96
Kab. Kutai Barat	1,967.33	1,518.75	77.20	2,391.97	1,974.01	82.53	2,421.41
Kab. Kutai Timur	2,823.89	2,255.15	79.86	4,070.51	3,112.93	76.48	3,509.23
Kab. Paser	1,980.40	1,638.33	82.73	2,138.94	1,847.45	86.37	2,393.57
Kab. Penajam Paser Utara	1,616.49	990.25	61.26	1,660.54	1,444.98	87.02	1,588.75
Kab. Berau	2,582.03	1,855.99	71.88	2,738.68	2,080.40	75.96	2,642.34
Kab. Mahakam Ulu	1,150.91	927.44	80.58	1,468.68	1,248.68	85.02	1,561.17
Total Kab/Kota Kaltim	22,573.36	17,320.90	76.73	25,382.94	20,962.24	82.58	25,927.22

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Seiring dengan peningkatan pendapatan, APBD kabupaten/kota di wilayah Kaltim (sisi belanja) tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu belanja APBD kabupaten/kota di wilayah Kaltim tahun 2019 tercatat Rp25,93 triliun atau meningkat 2,14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25,38 triliun. Peningkatan

pagu belanja kabupaten/kota di wilayah Kaltim tahun 2019 terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah Kaltim kecuali Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau.

2.3 Alokasi APBN di Wilayah Kalimantan Timur

Belanja Kementerian dan Lembaga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, pagu belanja APBN yang dialokasikan di wilayah Kaltim untuk TA 2018 sebesar Rp8,89 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sebesar Rp8,24 triliun atau 92,70% dari total pagu belanja TA 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7,28 triliun atau 89,68%. Pagu belanja APBD di wilayah Kaltim tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp596,60 miliar dibandingkan tahun 2018.

Di tingkat kabupaten/kota, Kota Samarinda memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp3,66 triliun atau 90,95% dari total pagu belanja TA 2018. Pagu belanja APBN tertinggi kedua adalah Kota Balikpapan dengan realisasi sebesar Rp2,25 triliun atau 97,23% dari total pagu belanja TA 2018 disusul oleh Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp282,73 miliar atau 96,54% dari pagu belanja tahun 2018. Sementara itu, Kab. Mahakam Ulu merupakan daerah dengan realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar 25,33 miliar atau 90,76% dari pagu belanja tahun 2018. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri mencatatkan realisasi belanja APBN lebih rendah dibandingkan semua kab/kota di bawahnya, yaitu sebesar Rp988,38 miliar atau 87,57% dari pagu belanja tahun 2018 (Tabel II.6).

Tabel II.5 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Tahun 2017, 2018 dan APBN Tahun 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019
	PAGU	Realisasi s.d. Tw-IV		PAGU	Realisasi s.d. Tw-IV		PAGU
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta
Kota Samarinda	3,141,397	2,902,907	92.41	4,021,568	3,657,421	90.95	3,242,812
Kota Balikpapan	2,474,181	2,033,588	82.19	2,314,683	2,250,591	97.23	2,578,407
Kota Bontang	162,213	148,858	91.77	174,026	166,372	95.60	158,883
Kab. Kutai Kartanegara	232,238	223,879	96.40	292,863	282,726	96.54	270,124
Kab. Paser	165,275	152,622	92.34	198,465	190,564	96.02	194,376
Kab. Penajam Paser Utara	99,488	88,550	89.00	137,520	125,313	91.12	108,638
Kab. Berau	207,993	184,995	88.94	256,981	243,298	94.68	212,358
Kab. Kutai Barat	170,126	160,293	94.22	144,696	136,993	94.68	133,632
Kab. Kutai Timur	136,080	122,592	90.09	187,997	169,492	90.16	149,170
Kab. Mahakam Ulu	5,080	3,513	69.16	27,901	25,325	90.76	12,603
Prov. Kalimantan Timur	1,322,354	1,256,698	95.03	1,128,711	988,375	87.57	1,227,813
Total Kalimantan Timur	8,116,425	7,278,494	89.68	8,885,411	8,236,471	92.70	8,288,816

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

Transfer Dana Desa

Pada tahun 2018, Provinsi Kaltim memperoleh alokasi anggaran dana desa sebesar Rp731,71 miliar yang tersebar di 841 desa dari total Rp60 triliun anggaran dana desa yang tercantum di APBN 2018. Di tingkat Kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah dengan alokasi dana desa terbesar sebesar Rp159,90 miliar yang tersebar di 193 desa, disusul Kabupaten Kutai Barat di urutan kedua terbesar sebesar Rp148,20 miliar yang tersebar di 190 desa. Di sisi lain, Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi dana desa paling rendah di tahun 2018 sebesar Rp 28,61 miliar yang tersebar di 30 desa. Sampai akhir tahun 2018, realisasi dana desa tahap III yang telah di salurkan RKUN ke RKUD sebesar Rp292,69 miliar atau 40% dari total alokasi dana desa tahun 2018. Dari dana desa tahap III yang telah disalurkan ke RKUD, sebanyak Rp284,06 miliar atau 97,05% telah disalurkan ke ke rekening desa, dimana daerah yang menyalurkan secara penuh dana tersebut ke RKD adalah Pemkab Kubar, Pemkab PPU dan Pemkab Mahulu.

Sementara itu, pada tahun 2019 Provinsi Kaltim memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp870,12 miliar yang tersebar untuk 841 desa di 81 kecamatan dan 7 kabupaten di Provinsi Kaltim meningkat sebesar 18,92% dibanding tahun sebelumnya (Tabel II.5). Peningkatan alokasi dana desa tahun 2019 diiringi dengan perbaikan dari kinerja penggunaannya, usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Permendes PDPT No. 16/2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2019.

Tabel II.6 Transfer Dana Desa Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan Alokasi Tahun 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Desa 2018	Realisasi 2018				Saldo		Alokasi Dana Desa 2019	
		Tahap III							
		Pempus-Pemda (RKUN-RKUD)		Pemda-Pemdes (RKUD-RKD)					
		Rp Juta	Rp Juta	%*	Rp Juta	%**	Rp Juta	%	Rp Juta
Kab. Paser	106,475.89	42,590.35	40.00	37,975.72	89.17	11,043.20	10.37	122,624.62	15.17
Kab. Kutai Kartanegara	159,897.07	63,958.83	40.00	62,753.09	98.11	1,525.25	0.95	185,361.77	15.93
Kab. Berau	90,992.73	36,397.09	40.00	35,951.66	98.78	1,070.65	1.18	109,901.42	20.78
Kab. Kutai Barat	148,195.19	59,278.08	40.00	59,290.65	100.02	-	-	173,097.83	16.80
Kab. Kutai Timur	141,179.64	56,471.85	40.00	54,097.85	95.80	3,947.25	2.80	171,877.60	21.74
Kab. Penajam Paser Utara	28,609.38	11,443.75	40.00	11,443.75	100.00	-	-	34,774.86	21.55
Kab. Mahakam Ulu	56,364.02	22,545.61	40.00	22,545.81	100.00	-	-	72,481.48	28.60
TOTAL	731,713.91	292,685.56	40.00	284,058.53	97.05	17,586.35	2.40	870,119.58	18.92

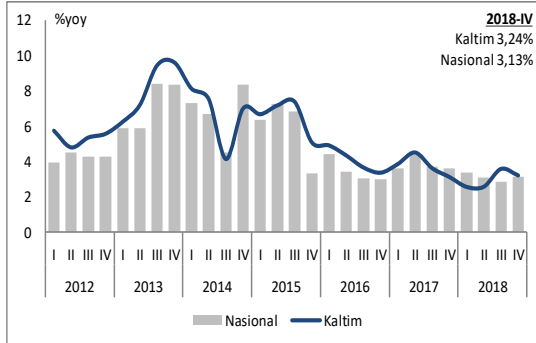
Sumber: DPMPD Prov Kaltim

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

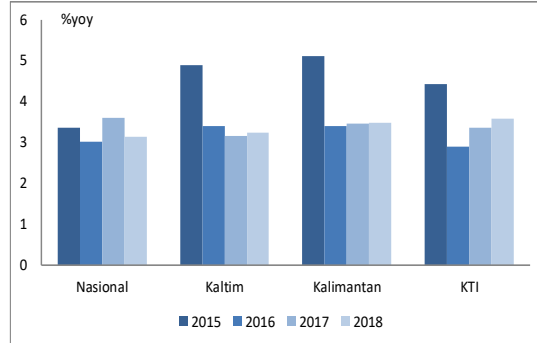
Inflasi Kalimantan Timur triwulan IV 2018 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan besaran yang relatif terkendali, sesuai dengan sasaran inflasi Nasional tahun 2018.

3.1 Gambaran Umum

Tekanan inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 3,61% (yoy). Tekanan inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mengalami peningkatan dari 2,88% (yoy) di triwulan III 2018 menjadi 3,13% (yoy) (Grafik III.1). Secara regional, inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 3,47% (yoy) dan inflasi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 3,58% (yoy) (Grafik III.2). Tekanan inflasi Kaltim triwulan IV 2018 termasuk kedalam 8 provinsi dengan inflasi terendah dari 18 Provinsi di wilayah KTI bersama Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (Grafik III.3).

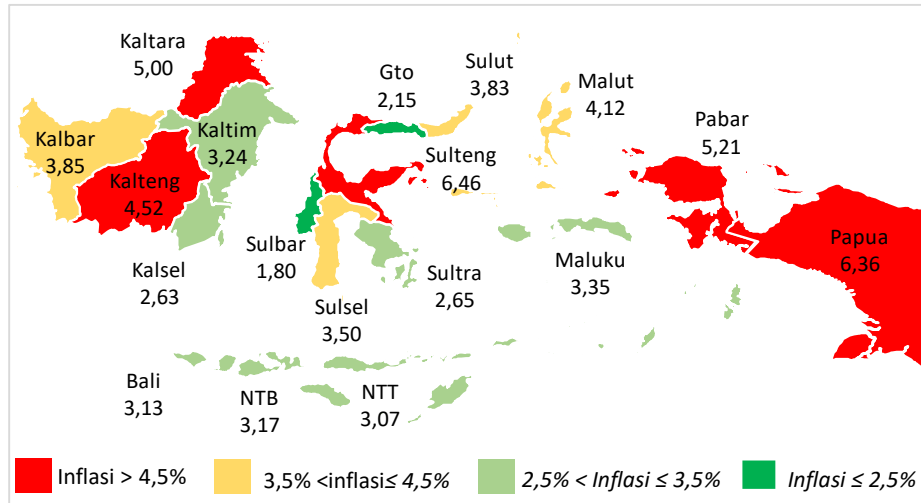


Sumber: BPS, diolah
Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional



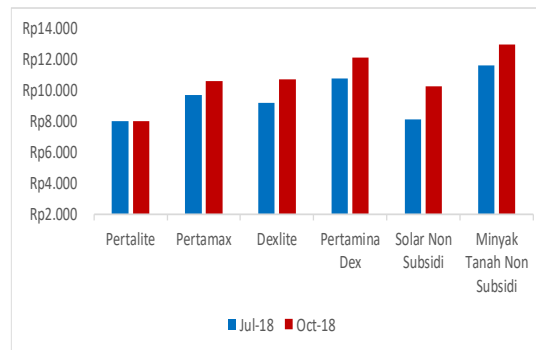
Sumber: BPS, diolah
Grafik III.2 Perbandingan Inflasi di Kalimantan

Gambar III.1 Sebaran Inflasi Kawasan Timur Indonesia Triwulan IV 2018 Berdasarkan Provinsi (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

Tekanan inflasi Kaltim triwulan IV 2018 utamanya dipengaruhi oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami penurunan di triwulan IV 2018 mencapai 4,28% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 5,44% (yoy). Adapun hal tersebut utamanya disebabkan oleh tarif angkutan udara yang mengalami deflasi pada bulan Oktober 2018 sebesar -4,04% (yoy) dan memiliki andil sebesar -0,10% terhadap tekanan inflasi Kaltim di bulan tersebut. Deflasi tarif angkutan udara terjadi dikarenakan adanya normalisasi permintaan angkutan udara dan *base effect* kenaikan tarif batas bawah pesawat terbang yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada akhir Agustus 2018. Namun penurunan tekanan inflasi pada kelompok tersebut tertahan oleh meningkatnya inflasi bensin dikarenakan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamina Series, Dex Series, serta Solar dan Minyak Tanah non subsidi pada bulan Oktober 2018. Adapun kenaikan harga BBM di Kaltim terjadi pada BBM jenis Pertamina, Dexlite, Pertamina Dex, Solar dan Minyak Tanah Non Subsidi dengan kenaikan tertinggi berada pada BBM jenis Solar Non Subsidi yang meningkat sebesar 25,77% dibandingkan harga pada bulan Juli 2018 (Grafik III.3).



Sumber: Pertamina, diolah

Grafik III.3 Kenaikan Harga BBM Kaltim per Okt 2018

Sepanjang tahun 2018, inflasi Kaltim tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi Kaltim tahun 2018 tercatat sebesar 3,24% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi Kaltim tahun 2017 sebesar 3,15% (yoy), dimana hal tersebut utamanya disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan setelah pada tahun 2017 mengalami deflasi. Lebih lanjut, peningkatan tekanan inflasi bahan makanan Kaltim 2018 umumnya didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras yang mengalami inflasi sebesar 12,06% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,16% (yoy) terhadap pembentukan inflasi Kaltim. Secara umum kenaikan harga daging ayam ras yang terjadi di Kaltim disebabkan oleh peningkatan harga pokok penjualan (HPP) dikarenakan adanya kenaikan biaya pakan, kenaikan harga DOC (*Day Old Chicken*), serta larangan pemerintah untuk menggunakan obat ternak AGP (*Antibiotic Growth Promoters*). Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan Kaltim di tahun 2018 tercatat sebesar 4,28% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 4,12% (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,07% (yoy) terhadap pembentukan inflasi Kaltim di tahun 2018. Selain tingginya permintaan masyarakat, peningkatan inflasi tarif angkutan udara juga didorong oleh naiknya komponen biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh maskapai penerbangan. Biaya bahan bakar dan sewa pesawat memberikan kontribusi lebih dari 40% terhadap total biaya operasional yang dikeluarkan maskapai penerbangan (Boks III.1).

Tekanan inflasi Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan kembali mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya pada rentang 3,40%-3,60% (yoy). Pada Januari 2019, Kaltim tercatat mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2018 sebesar 0,54% (mtm). Risiko inflasi Kaltim triwulan I 2019 utamanya bersumber dari kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh beberapa komoditas pangan yang mulai

mengalami peningkatan harga semenjak Januari 2019 seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah mulai masuknya periode tanam beberapa komoditas pangan. Hal tersebut tercermin dari hargapangan.id, dimana terlihat bahwa tujuh dari sepuluh komoditas pangan penyumbang inflasi yang dipantau mengalami kenaikan di bulan Januari 2019 jika dibandingkan dengan rata-rata 3 bulan kebelakang (Tabel III.1).

Tabel III.1 Harga Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi Kaltim

No	Komoditas	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Average Oct-Dec 2018	Jan-19	Growth Avg'18-Jan'19
I	Beras	Rp 12,800	Rp 12,850	Rp 12,850	Rp 12,833	Rp 12,900	0.52%
II	Daging Ayam	Rp 33,000	Rp 31,400	Rp 34,300	Rp 32,900	Rp 36,050	9.57%
III	Daging Sapi	Rp 122,950	Rp 122,650	Rp 123,100	Rp 122,900	Rp 123,900	0.81%
IV	Telur Ayam	Rp 22,550	Rp 22,950	Rp 25,350	Rp 23,617	Rp 25,000	5.86%
V	Bawang Merah	Rp 22,450	Rp 24,400	Rp 31,450	Rp 26,100	Rp 36,000	37.93%
VI	Bawang Putih	Rp 23,550	Rp 24,550	Rp 22,600	Rp 23,567	Rp 21,900	-7.07%
VII	Cabai Merah	Rp 28,450	Rp 32,000	Rp 34,800	Rp 31,750	Rp 33,550	5.67%
VIII	Cabai Rawit	Rp 37,200	Rp 37,600	Rp 42,050	Rp 38,950	Rp 39,000	0.13%
IX	Minyak Goreng	Rp 16,500	Rp 16,400	Rp 16,600	Rp 16,500	Rp 16,500	0.00%
X	Gula Pasir	Rp 13,550	Rp 13,600	Rp 13,500	Rp 13,550	Rp 13,450	-0.74%



peningkatan harga komoditas pangan



penurunan harga komoditas pangan

Sumber: hargapangan.id, diolah

Selain itu, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan turut berpotensi menaikkan tekanan inflasi Kaltim yang bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara dikarenakan kebijakan beberapa maskapai udara untuk mengkompensasi kerugian dikarenakan adanya peningkatan biaya operasional yang didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dunia dan tren penguatan USD terhadap rupiah di sepanjang tahun 2018.

3.2 Inflasi Bulanan (mtm)

Rata-rata inflasi bulanan Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi bulanan triwulan III 2018. Rata-rata inflasi bulanan Kaltim triwulan IV 2018 tercatat 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi bulanan triwulan III 2018 sebesar 0,27% (mtm). Penurunan rata-rata inflasi bulanan Kaltim triwulan IV 2018 dipengaruhi oleh menurunnya inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok sandang; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga di triwulan IV 2018. (Tabel III.2). Penurunan terbesar rata-rata inflasi bulanan Kaltim selama triwulan IV 2018 terdapat pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa

keuangan yang mengalami deflasi cukup dalam pada bulan Oktober 2018 sebesar -2,03% (mtm) yang disebabkan oleh deflasi tarif angkutan udara sebesar -16,14% (mtm) pada bulan tersebut. Namun penurunan yang lebih dalam tertahan oleh kelompok bahan makanan yang kembali mengalami inflasi pada bulan Desember 2018 sebesar 0,71% (mtm) setelah pada bulan-bulan sebelumnya mengalami deflasi. Adapun daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras menjadi tiga komoditas kontributor utama penyumbang inflasi Kaltim Desember 2018 dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 7,34% (mtm), 13,95% (mtm), dan 6,41% (mtm).

Tabel III.2 Perbandingan Rata-Rata Inflasi Bulanan Kaltim Triwulan III dan IV 2018 (mtm)

No	Kelompok Barang	Triwulan III-2018				Triwulan IV-2018				
		Jul	Agt	Sep	Rata-Rata	Oct	Nov	Dec	Rata-Rata	
	U M U M / T O T A L	0,92	0,15	-0,26	0,27	-0,16	-0,06	0,54	0,11	↘
1	Bahan Makanan	0,94	-0,79	-2,33	-0,73	-0,02	-1,75	0,71	-0,35	↗
2	Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau	0,24	0,18	0,27	0,23	0,66	0,05	0,17	0,29	↗
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BB	0,45	0,11	0,81	0,46	0,19	0,05	0,05	0,10	↘
4	Sandang	-0,06	0,66	0,17	0,26	0,39	0,22	0,05	0,22	↘
5	Kesehatan	0,31	0,03	0,11	0,15	0,15	-0,17	0,64	0,21	↗
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	2,12	0,45	0,74	1,10	0,06	0,28	-0,06	0,09	↘
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,38	1,07	-0,74	0,90	-2,03	1,34	1,84	0,38	↘

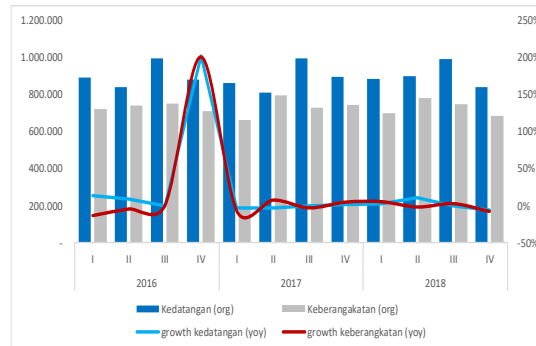
Sumber: BPS, diolah

Oktober 2018

Pada bulan Oktober 2018 Kaltim tercatat mengalami deflasi sebesar -0,16% (mtm), tidak sedalam deflasi September 2018 sebesar -0,26% (mtm). Deflasi Kaltim pada bulan Oktober 2018 tersebut berbeda arah dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm) setelah pada bulan September 2018 mengalami deflasi sebesar -0,18% (mtm). Tertahannya laju deflasi Kaltim yang lebih dalam di bulan Oktober 2018 disebabkan oleh naiknya tekanan pada kelompok makanan & minuman, rokok, dan tembakau; kelompok sandang; dan kelompok kesehatan. Di kelompok makanan & minuman, rokok, dan tembakau tercatat rokok kretek filter mengalami kenaikan 3,30% (mtm) dengan memberikan andil sebesar 0,07% (mtm) terhadap tingkat inflasi Oktober 2018 sehingga menjadi kontributor utama dalam kenaikan tingkat inflasi pada kelompok tersebut. Naiknya harga rokok kretek merupakan dampak dari penyesuaian kebijakan cukai rokok yang dilakukan Pemerintah pada awal tahun 2018. Pelaku usaha menyikapi kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian harga rokok secara bertahap. Lebih lanjut, deflasi kelompok bahan makanan pada bulan Oktober 2018 tercatat tidak sedalam bulan sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi dan memberikan andil cukup signifikan pada inflasi, seperti daging ayam ras, bayam dan sawi hijau.

Deflasi yang terjadi pada Oktober 2018 dipengaruhi oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi yang lebih dalam sebesar -2,03% (mtm)

di bulan Oktober 2018 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,74% (mtm). Hal tersebut disebabkan oleh deflasi tarif angkutan udara sebesar -16,14% (mtm) dan memberikan andil sebesar -0,42% (mtm) pada inflasi Kaltim (Grafik III.4).



Sumber: Angkasa Pura

Grafik III.4 Arus Penumpang Bandara Sepinggang Balikpapan

November 2018

Pada November 2018, Kaltim mengalami deflasi sebesar -0,06% (mtm), tidak sedalam bulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,16% (mtm). Di sisi lain, inflasi nasional November 2018 tercatat sebesar 0,27% (mtm) atau mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,28% (mtm). Tertahannya laju deflasi Kaltim yang lebih dalam di bulan November 2018 disebabkan oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami inflasi sebesar 1,34% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi yang cukup dalam sebesar -2,03% (mtm). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok tersebut pada umumnya didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara sebesar 9,72% (mtm) dan memberikan andil 0,21% terhadap pembentukan inflasi bulanan Kaltim. Lebih lanjut, kenaikan tarif angkutan udara tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan *seat* menjelang akhir tahun baik untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Selain itu, bensin juga menjadi salah satu komoditas yang mendorong peningkatan tekanan inflasi Kaltim pada kelompok tersebut, dimana bensin tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,45% (mtm) dan memberikan andil sebesar 0,01% (mtm) terhadap inflasi Kaltim.

Di sisi lain, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar -1,75% (mtm), lebih dalam dibandingkan bulan Oktober 2018 yang tercatat sebesar -0,02% (mtm). Komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan layang benggol masing-masing mengalami deflasi sebesar -10,57% (mtm), -3,94% (mtm) dan -3,06% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar -0,17% (mtm), -0,03% (mtm), dan -0,03% (mtm) terhadap inflasi Kaltim. Pasokan yang melimpah ditengah stabilnya permintaan masyarakat menjadi pendorong utama deflasi bahan makanan

Kaltim pada bulan November 2018. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltim dalam rapat terbatas dengan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim disebutkan bahwa pasokan daging ayam ras di Kaltim pada periode November 2018 mencapai 14,514 ton dimana kebutuhan masyarakat akan daging ayam ras hanya sebesar 5,010 ton sehingga terdapat surplus pasokan dan menjadi pendorong utama terjadinya deflasi komoditas daging ayam ras. Sejalan dengan hal tersebut, laman hargapangan.id mencatatkan harga daging ayam ras di Kaltim mengalami penurunan dari Rp33.000 menjadi Rp31.400 pada periode tersebut.

Desember 2018

Pada bulan Desember 2018, Kaltim tercatat mengalami inflasi sebesar 0,54% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,06% (mtm). Tekanan inflasi Kaltim tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,62% (mtm) yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mtm). Kenaikan inflasi Kaltim didorong oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok bahan makanan. Inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan tersebut disebabkan oleh komoditas angkutan udara yang mencatatkan inflasi sebesar 13,47% (mtm) dan memberikan andil 0,32% (mtm) pada inflasi bulanan Kaltim. Inflasi angkutan udara tersebut masih disebabkan oleh tingginya permintaan *seat* menjelang Hari Raya Natal, liburan sekolah serta akhir tahun. Selain itu, beroperasinya Bandara APT Pranoto di kota Samarinda dengan rute penerbangan domestik ke wilayah lain di Indonesia belum dapat mengurangi permintaan *outbound* melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang di kota Balikpapan. Berdasarkan *focus group discussion* yang dilakukan oleh TPID Provinsi Kaltim dengan maskapai penerbangan diperoleh informasi bahwa sejak Minggu II Desember 2018, harga tiket pesawat *outbound* Balikpapan telah menyentuh tarif batas atasnya.

Selain itu peningkatan tekanan inflasi Kaltim juga berasal dari kelompok bahan makanan yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -1,75% (mtm). Inflasi bahan makanan tersebut disebabkan oleh komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,34% (mtm), 13,95% (mtm), dan 6,41% dengan andil masing-masing sebesar 0,10% (mtm), 0,05% (mtm), dan 0,05% (mtm). Daging ayam ras merupakan komoditas yang selalu mengalami peningkatan harga di periode-periode HBKN sejalan dengan tingginya konsumsi masyarakat untuk komoditas ini. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas bawang merah

pada Desember 2018 disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi pengiriman dari daerah sentra produksi dikarenakan bawang merah yang dipasarkan di Kaltim sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Adapun pasokan bawang merah dari Sulawesi Selatan mengalami penurunan dikarenakan distribusi bawang merah lebih dioptimalkan ke wilayah berpenduduk Nasrani seperti Sulawesi Utara dan Maluku seiring dengan perayaan Hari Raya Natal. Namun peningkatan tekanan inflasi Kaltim lebih lanjut mampu diredam oleh deflasi yang terjadi pada komoditas layang/benggol dan kacang panjang masing-masing sebesar -6,66% (mtm) dan -11,76% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar -0,05% (mtm) dan -0,03% (mtm) terhadap tingkat inflasi bulanan Kaltim. Secara ringkas, komoditas-komoditas penyumbang inflasi bulanan Kaltim selama triwulan IV 2018 adalah sebagai berikut (Tabel III.3).

Tabel III.3 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan Kaltim Triwulan IV 2018 (mtm)

Oktober 2018			November 2018			Desember 2018		
Komoditas	mtm	andil	Komoditas	mtm	andil	Komoditas	mtm	andil
Rokok Kretek Filter	3,30	0,07	Angkutan Udara	9,72	0,21	Angkutan Udara	13,47	0,32
Bensin	1,15	0,04	Bawang Merah	5,71	0,02	Daging Ayam Ras	7,34	0,10
Daging Ayam Ras	2,31	0,03	Bensin	0,45	0,01	Bawang Merah	13,95	0,05
Papan	3,11	0,02	Sabun Detergen Bubuk/Cair	2,68	0,01	Telur Ayam Ras	6,41	0,05
Bayam	15,70	0,02	Rokok Putih	0,93	0,01	Kangkung	11,97	0,03
Sawi Hijau	13,91	0,02	Minyak Goreng	0,95	0,01	Apel	5,71	0,02
Soto	2,47	0,02	Rokok Kretek Filter	0,33	0,01	Beras	0,35	0,01
Bandeng/Bolu	6,72	0,02	Bimbingan Belajar	1,54	0,01	Shampo	2,49	0,01
Ketimun	18,07	0,01	Laptop/Notebook	2,48	0,01	Pasta Gigi	2,63	0,01
Kacang Panjang	3,64	0,01	Rokok Kretek	0,65	0,01	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,69	0,01

Sumber: BPS, diolah (estimasi analis Bank Indonesia)

Januari 2019

Pada Januari 2019 Kaltim mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Desember 2018 yang tercatat sebesar 0,54% (mtm). Tekanan inflasi Kaltim tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,32% (mtm). Peningkatan tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 2,87% (mtm) di bulan Januari 2019 lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2018 yang tercatat sebesar -1,09% (mtm). Adapun peningkatan tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras, ikan layang/benggol, dan bawang merah yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 6,71% (mtm), 9,89% (mtm) dan 15,48% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar 0,10% (mtm), 0,07% (mtm) dan 0,05% (mtm). Lebih lanjut peningkatan harga daging ayam ras sejalan dengan peningkatan harga jagung pipilan domestik (pakan ayam) di wilayah Blitar (sentra produksi daging ayam ras Indonesia) sebesar 17,40% (mtm). Selain itu, kenaikan harga bawang merah pada bulan Januari 2019 sejalan dengan harga bawang merah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 4,0% (mtm). Hal tersebut memberi pengaruh cukup besar terhadap kenaikan harga

bawang merah Kaltim dimana lebih dari 50% pasokan bawang merah di Kaltim berasal dari Sulsel.

Di sisi lain, tekanan inflasi Kaltim tersebut mampu tertahan oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang bersumber dari deflasi angkutan udara sebesar -4,23% (mtm) dan memberikan andil -0,12% (mtm) terhadap inflasi bulanan Kaltim. Deflasi angkutan udara disebabkan oleh normalisasi permintaan angkutan udara masyarakat paska HBKN. Selain itu, deflasi juga terjadi pada komoditas bensin sebesar 1,22% (mtm) dan memberikan andil sebesar -0,04% (mtm) terhadap inflasi bulanan Kaltim, dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan penurunan harga BBM non subsidi dikarenakan adanya penurunan harga rata-rata minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar.

3.3 Inflasi Tahunan (yoy)

Secara tahunan (yoy), inflasi Kaltim triwulan IV 2018 lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan pada triwulan sebelumnya. Inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,24% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2018 sebesar 3,61% (yoy). Penurunan tersebut disumbang oleh kelompok bahan makanan diikuti oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (Tabel III.4).

Pada triwulan IV 2018, kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 3,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,53% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,63% terhadap inflasi tahunan Kaltim. Berdasarkan komoditasnya, layang/benggol menjadi komoditas utama penyumbang menurunnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan tersebut dimana layang/benggol tercatat mengalami deflasi sebesar -22.59% (yoy) dan memberikan andil sebesar -0,22% (yoy) terhadap inflasi tahunan Kaltim. Selain itu, tekanan inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan turut mengalami penurunan dari 5,44% (yoy) di triwulan III 2018 menjadi 4,28% (yoy) di triwulan IV 2018 dan memberikan andil sebesar 0,76% (yoy) terhadap inflasi tahunan Kaltim. Berdasarkan sub-kelompoknya, tarif angkutan udara menjadi sumber utama penurunan inflasi pada kelompok tersebut, dimana tercatat inflasi tarif angkutan udara di triwulan IV 2018 sebesar 2,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 13,99% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,07% (yoy) terhadap inflasi tahunan Kaltim. Hal tersebut disebabkan oleh normalisasi permintaan angkutan udara, setelah pada triwulan sebelumnya terjadi kenaikan dikarenakan banyaknya pelaku usaha tambang yang mencoba meningkatkan produksinya

dengan menambah banyak *manpower* dari luar Kaltim di triwulan III 2018, setelah pada semester I 2018 banyak pelaku usaha tambang belum memenuhi target produksinya.

Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi yang cukup tinggi terjadi pada kelompok makanan & minuman, rokok, dan tembakau dimana tercatat pada triwulan IV 2018 mengalami inflasi sebesar 2,93% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 2,47% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,59% (yoy) terhadap pembentukan inflasi Kaltim. Berdasarkan sub-kelompoknya, rokok kretek filter menjadi sumber utama kenaikan inflasi pada kelompok tersebut dimana tercatat di triwulan IV 2018 mengalami inflasi sebesar 7,30% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 dan memiliki andil sebesar 0,16% (yoy), dimana hal tersebut merupakan dampak dari kenaikan cukai rokok yang dilakukan secara bertahap di tahun 2018. Lebih lanjut, kenaikan juga terjadi pada kelompok kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 3,24% (yoy) di triwulan IV 2018 atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 2,94% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,17% (yoy) inflasi tahunan Kaltim.

Tabel III.4 Inflasi Tahunan Kaltim (yoy)

No	Kelompok Barang	Inflasi YOY												Andil	
		2016				2017				2018				2018	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	III	IV
	U M U M / T O T A L	4,94	4,37	3,69	3,39	3,89	4,54	3,65	3,15	2,59	2,60	3,61	3,24	3,61	3,24
1	Bahan Makanan	8,00	5,60	2,51	1,50	0,61	1,38	1,10	-0,24	2,34	5,46	4,53	3,31	0,87	0,63
2	Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau	8,00	8,31	7,00	5,31	4,17	2,86	3,30	3,11	2,68	3,19	2,47	2,93	0,50	0,59
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BB	1,70	1,46	1,77	2,18	4,01	6,09	6,11	5,51	3,97	2,08	2,81	2,64	0,73	0,69
4	Sandang	2,07	2,61	2,70	2,63	2,12	2,01	2,18	2,77	3,48	2,59	2,72	2,78	0,14	0,14
5	Kesehatan	4,93	5,31	4,83	5,10	4,85	3,81	3,34	2,74	2,43	3,49	2,94	3,24	0,16	0,17
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3,82	3,79	3,42	2,71	2,41	2,40	2,43	2,24	2,28	2,17	3,81	3,97	0,25	0,26
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	4,35	3,58	4,52	5,29	8,14	9,82	4,51	4,12	0,57	-0,63	5,44	4,28	0,95	0,76

Sumber: BPS, diolah

Tukang bukan mandor merupakan komoditas utama penyumbang inflasi tahunan Kaltim triwulan IV 2018. Tukang bukan mandor mengalami inflasi sebesar 10,45% (yoy) di triwulan IV 2018 dengan andil sebesar 0,25% (yoy) terhadap inflasi tahunan Kaltim. Secara umum, tingkat inflasi tukang bukan mandor di triwulan IV 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan III 2018 sebesar 11,73% (yoy) dan memberikan andil 0,33% terhadap inflasi tahunan Kaltim di triwulan tersebut. Hal tersebut sejalan jika melihat pertumbuhan PDRB lapangan usaha konstruksi yang juga mengalami peningkatan di triwulan IV 2018. Berlanjutnya tekanan inflasi tukang bukan mandor di triwulan IV 2018 disebabkan oleh percepatan pembangunan proyek-proyek seiring dengan realisasi penyerapan belanja pemerintah daerah di akhir tahun. Selain itu, tekanan inflasi juga didorong oleh kenaikan tingkat inflasi bensin yang tercatat sebesar 6,56% (yoy) dan memiliki andil sebesar 0,20% (yoy) terhadap inflasi tahunan Kaltim. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamina, Dexlite, Pertamina Dex, solar non subsidi serta

minyak tanah non subsidi per Oktober 2018 dari posisi terakhir di bulan Juli 2018 dengan rata-rata kenaikan harga sebesar 12,60%.

Di sisi lain, deflasi pada beberapa komoditas menjadi penahan laju inflasi Kaltim triwulan IV 2018. Tercatat layang/benggol mengalami deflasi sebesar -22,59% (yoy) dan memberikan andil sebesar -0,22% (yoy). Selain itu, tongkol/ambu-ambu dan selar/tude turut mengalami deflasi masing-masing sebesar -9,86% (yoy) dan -15,98% (yoy) dengan andil masing-masing sebesar -0,04% (yoy) dan -0,03% (yoy), dimana penurunan tekanan inflasi pada komoditas perikanan tersebut disebabkan oleh melimpahnya stok di pasaran seiring dengan cuaca yang kondusif untuk aktivitas nelayan di akhir tahun 2018 ditengah permintaan masyarakat yang relative stagnan (Tabel III.5).

Tabel III.5 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan III 2018 (yoy)

Andil Inflasi			Andil Deflasi		
Komoditas	yoy	andil	Komoditas	yoy	andil
Tukang Bukan Mandor	10,45	0,25	Layang/Benggol	-22,59	-0,22
Bensin	6,56	0,20	Tongkol/Ambu-ambu	-9,86	-0,04
Tarip Pulsa Ponsel	6,74	0,17	Selar/Tude	-15,98	-0,03
Daging Ayam Ras	12,06	0,16	Kacang Panjang	-8,33	-0,02
Rokok Kretek Filter	7,30	0,16	Daging Sapi	-5,00	-0,02
Mobil	5,64	0,12	Gula Pasir	-3,29	-0,02
Sepeda Motor	6,28	0,09	Sawi Hijau	-8,06	-0,01
Bawang Merah	23,81	0,09	Kol Putih/Kubis	-15,21	-0,01
Rokok Kretek	10,19	0,08	Angkutan Antar Kota	-4,10	-0,01
Angkutan Udara	2,68	0,07	Bayam	-6,18	-0,01

Sumber: BPS, diolah (estimasi analis Bank Indonesia)

3.4 Inflasi Menurut Kota IHK

Penurunan tingkat inflasi kota Balikpapan menjadi salah faktor penurunan inflasi Kaltim triwulan IV 2018. Inflasi kota Balikpapan tercatat 3,13% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,94% (yoy) (Tabel III.6). Penurunan tingkat inflasi kota Balikpapan triwulan IV 2018 utamanya disebabkan oleh menurunnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok bahan makanan; dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi sebesar 5,87% (yoy) di triwulan IV 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,00% (yoy) yang bersumber dari meredanya tekanan inflasi tarif angkutan udara di triwulan IV 2018. Tercatat tarif angkutan udara mengalami inflasi sebesar 21,68% (yoy) di triwulan IV 2018 atau lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan III 2018 sebesar 29,58% (yoy), dimana hal tersebut disebabkan oleh normalisasi permintaan angkutan udara di triwulan IV 2018 setelah meningkatnya permintaan di triwulan sebelumnya dikarenakan banyak pelaku usaha tambang yang

menambah *manpower* dari luar Kaltim untuk meningkatkan produksi di semester II 2018. Pada kelompok bahan makanan, kacang panjang tercatat mengalami deflasi sebesar -14.83% (yoy) dengan andil sebesar -0,05% (yoy) terhadap inflasi tahunan Balikpapan. Adapun deflasi tersebut disebabkan oleh panen yang berlangsung sepanjang triwulan IV 2018 sehingga pasokan kacang panjang di Balikpapan melimpah. Namun penurunan yang lebih dalam dapat tertahan oleh inflasi kangkung yang tercatat menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di kelompok bahan makanan dengan tingkat inflasi sebesar 15,50% (yoy) dan mempunyai andil sebesar 0,08% (yoy) terhadap inflasi Balikpapan. Kenaikan harga kangkung tersebut utamanya disebabkan oleh minimnya panen kangkung di triwulan IV 2018, sehingga pasokan kangkung di Balikpapan menjadi terbatas.

Sementara itu, inflasi tahunan kota Samarinda pada triwulan IV 2018 juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi kota Samarinda tercatat 3,32% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih rendah jika dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 3,35% (yoy). Meredanya tekanan inflasi di kota Samarinda dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan di triwulan IV 2018. Lebih lanjut, tekanan inflasi kelompok bahan makanan di triwulan IV 2018 tercatat sebesar 5,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 5,67% (yoy). Penurunan tekanan inflasi bahan makanan di Samarinda disebabkan oleh deflasi yang terjadi pada komoditas layang/benggol sebesar -24,26% (yoy) dan memberikan andil sebesar -0,25% (yoy) terhadap tingkat inflasi di Samarinda. Selain layang/benggol, komoditas tongkol/ambu-ambu turut mengalami deflasi sebesar -5,12% (yoy) dengan andil sebesar -0,02% (yoy) terhadap inflasi di Samarinda. Adapun deflasi yang terjadi pada komoditas bahan makanan tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan seiring dengan cuaca yang kondusif di akhir triwulan IV 2018 sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan.

Tabel III.6 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy)

Wilayah	Bobot Kota TD 2012		2016				2017				2018			
	Nasional	Kaltim	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kaltim	2,53	100,00	4,94	4,37	3,69	3,39	3,89	4,54	3,65	3,15	2,59	2,60	3,61	3,24
Samarinda	1,43	56,52	5,09	4,24	3,53	2,83	3,27	4,30	4,31	3,69	2,85	2,63	3,35	3,32
Balikpapan	1,10	43,48	4,75	4,55	3,90	4,13	4,69	4,86	2,79	2,45	2,24	2,55	3,94	3,13

Sumber: BPS, diolah

Pada Januari 2019 tekanan inflasi kota Balikpapan tercatat lebih rendah dibandingkan Desember 2018. Inflasi kota Balikpapan tercatat sebesar 0,50% (mtm) di bulan Januari 2019, lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2018 sebesar 0,86% (mtm). Penurunan tekanan inflasi kota Balikpapan tersebut utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar -1,56% (mtm) di Januari 2019. Adapun deflasi pada kelompok tersebut bersumber dari penurunan tarif angkutan udara sebesar -6,74% (mtm) dan memiliki andil sebesar 0,28% (mtm) terhadap inflasi bulanan Balikpapan. Deflasi tarif angkutan tersebut disebabkan oleh berakhirnya momen liburan HBKN dan tahun baru yang menyebabkan terjadinya normalisasi permintaan angkutan udara. Selain penurunan tarif angkutan udara, meredanya tekanan inflasi pada kelompok tersebut juga turut disebabkan oleh deflasi bensin sebesar -1,20% (mtm) dan memiliki andil -0,04% (mtm) terhadap inflasi Balikpapan seiring dengan kebijakan penurunan harga BBM non subsidi di Januari 2019.

Pada Januari 2019, tekanan inflasi di kota Samarinda tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2018. Tekanan inflasi di kota Samarinda pada bulan Januari 2019 tercatat sebesar 0,60% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Desember 2018 yang tercatat sebesar 0,30% (mtm). Peningkatan tekanan inflasi kota Samarinda didorong oleh naiknya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan yang bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras dan bawang merah yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,66% (mtm) dan 17,65% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar 0,12% (mtm) dan 0,11% (mtm) terhadap inflasi bulanan kota Samarinda. Kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh meningkatnya harga pakan yang bersumber dari peningkatan harga jagung pipilan di Januari 2019. Namun tekanan inflasi kota Samarinda bulan Januari 2019 tertahan oleh deflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang bersumber dari deflasi bensin sebesar -1,23% (mtm) dan memiliki andil -0,04% (mtm) terhadap pembentukan inflasi Kaltim.

3.5 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam rangka menghadapi HBKN di akhir triwulan IV 2018, berbagai upaya telah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kaltim. Ketersediaan pasokan menjadi fokus utama TPID Provinsi Kaltim dalam upayanya untuk mengendalikan inflasi Kaltim. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah TPID Kabupaten Paser bersama dengan Bulog membuka gerai pangan murah di sekitar Sungai Kandilo untuk menjaga pasokan bahan makanan terjaga di masyarakat. Selain itu, TPID Kota Samarinda juga mengadakan *High Level Meeting* (HLM) yang membahas upaya antisipasi pengendalian inflasi akhir tahun dengan cara

meningkatkan koordinasi, dan melakukan sidak pasar. TPID Kota Samarinda juga senantiasa melakukan sidak guna memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan di masyarakat terjaga dengan baik. Adapun sidak sendiri berlokasi di Pasar Tradisional Segiri, Lottemart, dan Bulog. Selain itu, TPID Kota Samarinda memantau ketersediaan BBM di beberapa SPBU Samarinda guna mengantisipasi kelangkaan BBM saat HKBN. Dalam level yang lebih tinggi, TPID Provinsi Kaltim juga melakukan sidak di Pasar Tradisional Segiri dan Lottemart, dimana dalam sidak tersebut tercatat bahwa pasokan bahan makanan terpantau relatif aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat menghadapi HKBN.

TPID di Provinsi Kaltim senantiasa berinovasi dalam upaya pengendalian harga pangan dengan mencoba melakukan pengadaptasian teknologi pada mekanisme pemantauan harga pasar. Terkait dengan hal tersebut, TPID Provinsi Kaltim melakukan evaluasi *Pilot Project* PIHPS Kaltim bersama perwakilan kabupaten/kota sebelum dilakukan *grand launching*. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengantisipasi *error* yang kemungkinan terjadi saat aplikasi tersebut mulai dapat dipergunakan oleh masyarakat luas. Setelah melalui rangkaian kegiatan, pada 18 Desember 2018 telah dilaksanakan *grand launching* aplikasi Lamin Etam (Laman Informasi Ekonomi Komoditas Kaltim) yang merupakan nama dari aplikasi PIHPS Provinsi Kaltim. Adapun acara *grand launching* tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltim bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan Asisten II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Lamin Etam tersebut memantau 26 komoditas harga penyumbang inflasi di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim dan bisa diakses secara langsung di laminetam.id ataupun melalui aplikasi android.

TPID di Provinsi Kaltim juga melakukan inisiasi perdagangan antar daerah guna menjaga volatilitas harga bahan makanan di Kaltim. TPID Kota Samarinda melakukan rangkaian kegiatan pembahasan persiapan kerjasama perdagangan antar daerah dengan Kab. Bantaeng, Kab. Enrekang, dan Kota Makassar bersama dengan OPD Kota Samarinda. Setelah rangkaian kegiatan tersebut, pada 12 Desember 2018 telah dilakukan penandatanganan MoU kerjasama antar daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Makassar. Adapun MoU tersebut secara resmi dihadiri oleh Walikota Samarinda dan Wakil Bupati Bantaeng bersama jajaran pemerintahan terkait. Diharapkan dengan adanya MoU tersebut, kebutuhan pangan di Samarinda mampu terpenuhi dengan baik mengingat 80% dari kebutuhan pangan yang ada di kota Samarinda berasal dari luar Kalimantan, terlebih untuk komoditas sayur mayur banyak yang berasal dari Kab. Enrekang.

Tabel III.7 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan IV 2018

NO	TPID	TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN	PIMPINAN KEGIATAN
1	Kabupaten Paser	Ruang Rapat Bag. Perekonomian Paser	11 September 2018	Rapat Teknis	Rapat teknis rutin melakukan evaluasi dan perencanaan strategis ke depan	Sekda Kabupaten
2	Kabupaten Paser	Jalan Provinsi	11 September 2018	Operasi Pasar	Bulog melakukan operasi pasar di jalan protokol Kab. Paser	Bulog
3	Provinsi Kalimantan Timur	Ruang Rapat Taka Lt.3, Kantor Gubernur	17 September 2018	Rapat Koordinasi	Rapat evaluasi PIHPS Kaltim bersama kab/kota	Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kaltim
4	Kota Samarinda	Ruang Rapat Wakil Walikota	19 September 2018	HLM	Rapat pembahasan rencana Kerjasama Antar Daerah dengan Kab. Bantaeng (Sulse) serta tindak lanjut PD. PAU sebagai distributor daging ayam di Kota Samarinda	Walikota Samarinda
5	Provinsi Kalimantan Timur	Ruang Rapat Derawan, BI Kaltim	25 September 2018	Rapat Koordinasi	Rapat evaluasi Sistem PIHPS Kaltim bersama kab/kota dan vendor penyedia program dan aplikasi PIHPS	Kepala Tim Pengembangan Ekonomi BI Kaltim
6	Kabupaten Paser	Jalan Provinsi	10 Oktober 2018	Pasar Bulog	Bulog membuka gerai di murah di pinggir sungai kandilo untuk memudahkan masyarakat	Bulog
7	Kabupaten Paser	Jakarta	19 Oktober 2018	Rakorpusda Jawa dan Kalimantan	Untuk mengkoordinasikan program kerja tahun 2019	TPJ
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	Jakarta	19 Oktober 2018	Rakorpusda Jawa dan Kalimantan	Untuk mengkoordinasikan program kerja tahun 2019	TPJ
9	Kota Balikpapan	Jakarta	19 Oktober 2018	Rakorpusda Jawa dan Kalimantan	Untuk mengkoordinasikan program kerja tahun 2019	TPJ
10	Kabupaten Paser	Jalan Provinsi	22 Oktober 2018	Rapat Teknis	Tindaklanjuti capacity building untuk kerjasama G to G	Asisten Ekonomi
11	Provinsi Kalimantan Timur	Ruang Rapat Taka Lt.3, Kantor Gubernur	9 November 2018	Rapat Koordinasi	Persiapan Grand Launching PIHPS Kaltim dan penyampaian laporan kegiatan/program unggulan di tiap kabupaten/kota	Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kaltim
12	Kota Samarinda	Rumah Jabatan Walikota Samarinda	21 November 2018	HLM	Fokus membahas upaya antisipasi pengendalian inflasi akhir tahun dengan cara meningkatkan koordinasi, sidak pasar, dan merealisasikan kerja sama perdagangan antar daerah dengan Kab Bantaeng, Kab Enreng, dan Kota Makassar.	Walikota Samarinda
13	Kota Samarinda	Ruang Rapat Pemkot	26 November 2018	Rapat Koordinasi	Persiapan penandatanganan MoU kerjasama dengan Kab Bantaeng, Kan Enreng, dan Kota Makassar bersama OPD Kota Samarinda	Asisten II Pemkot Samarinda
14	Provinsi Kalimantan Timur	Ruang rapat Pemprov Kaltim	26 November 2018	Rapat Koordinasi	Rapat terbatas perekonomian Kaltim membahas pertumbuhan di industri CPO, tambak udang, dan MICE Samarinda dan Balikpapan	Wakil Gubernur Kaltim
15	Provinsi Kalimantan Timur	Ruang Rapat Taka Lt.3, Kantor Gubernur	29 November 2018	HLM	Dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru	Wakil Gubernur Kaltim
16	Kota Samarinda	Pasar Segiri, Lottemart, SPBU dan Bulog	4 Desember 2018	Sidak	Persiapan menjelang akhir tahun dan hari raya besar Natal	Walikota Samarinda
17	Kabupaten Mahakam Ulu	Ruang Rapat BP4D Pemkab Mahulu	5 Desember 2018	Rapat Koordinasi	Perencanaan program kerja serta persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru	Assiten III Bidang Umum
18	Kab. Penajam Paser Utara	Penajam	11 Desember 2018	High Level Meeting	High Level Meeting TPID Penajam Paser Utara	Bupati Penajam Paser Utara
19	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ruang rapat Pemkab Kukar	12 Desember 2018	Rapat Koordinasi	Persiapan menghadapi hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru	Assiten Perekonomian dan Pembangunan
20	Kota Samarinda	Balai Kota Makassar	12 Desember 2018	Penandatanganan MoU	Penandatanganan KAD antara Pemko Samarinda dan Pemko Makassar	Walikota Samarinda dan Walikota Makassar
21	Provinsi Kalimantan Timur	Ruang Rapat Taka Lt.3, Kantor Gubernur	13 Desember 2018	FGD	FGD tarif angkutan udara bersama dinas perhubungan dan perwakilan dari berbagai maskapai penerbangan	Gubernur Kalimantan Timur
22	Kota Balikpapan	Balikpapan	14 Desember 2018	Sidak Pasar	Sidak Pasar bersama tim Satgas Pangan	Polres Balikpapan
23	Kab. Paser	Paser	17 Desember 2018	High Level Meeting	High Level Meeting TPID Paser	Bupati Paser
24	Provinsi Kalimantan Timur	Aula Maratua KPw BI Kaltim	18 Desember 2018	Grand Launching	Grand Launching aplikasi Lamin Etam (Laman Informasi Ekonomi Komoditas Kaltim) yang merupakan aplikasi PIHPS Provinsi Kaltim	Gubernur Kalimantan Timur
25	Provinsi Kalimantan Timur	Pasar Segiri dan Lottemart	20 Desember 2018	Sidak	Merupakan tindak lanjut dari HLM TPID Provinsi melaksanakan sidak pasar terhadap bahan pokok menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru	Gubernur Kalimantan Timur
26	Kabupaten Berau	Ruang Rapat Kakaban Setda Kab Berau	20 Desember 2018	Rapat Koordinasi	Kebijakan/kegiatan Pemkab Berau dalam mendukung pengendalian inflasi serta persiapan menyambut Nata dan Tahun Baru	Bupati kabupaten Berau

Sumber: TPID Provinsi Kaltim (diolah)

Selain itu, TPID di Provinsi Kaltim juga terus melakukan berbagai program pengendalian inflasi pada kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang merupakan kelompok dengan andil tertinggi terhadap pembentukan inflasi tahunan Kaltim. Terkait dengan hal tersebut, TPID Provinsi Kaltim telah melakukan FGD yang membahas mengenai kenaikan tarif angkutan udara bersama Dinas Perhubungan dan perwakilan berbagai maskapai penerbangan. Hasil dari FGD tersebut adalah disebutkan bahwa penentuan tarif angkutan udara yang notabene mengalami peningkatan pada semester II 2018 ditentukan oleh pusat dan belum melewati batas atas tarif angkutan udara. Lebih lanjut, dari FGD tersebut juga disebutkan bahwa kenaikan yang terjadi pada semester II 2018 juga ditujukan untuk mengkompensasi kerugian atas tingginya biaya operasional pada semester I 2018 (Tabel III.7).

Di tahun 2019, TPID Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus melakukan pengendalian tingkat inflasi. Salah satu bentuk pengendalian inflasi yang dilakukan yaitu peningkatan kompetensi melalui rencana kegiatan *workshop* dan evaluasi kinerja Petugas Pencacah Data PIHPS Provinsi Kaltim (Lamin Etam) dari setiap Kabupaten/Kota. Selain itu, TPID Kota Balikpapan juga berencana akan melakukan operasi pasar bulanan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas dengan memastikan ketersediaan pasokan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

BOKS II.1

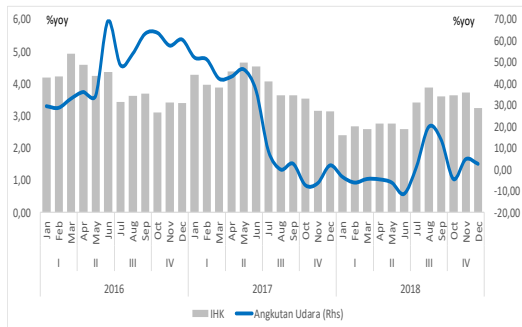
“Kenaikan Tarif Angkutan Udara di Kaltim Tahun 2018”

Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan perubahan IHK dari waktu ke waktu yang menunjukkan pergerakan harga dari barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, inflasi bisa timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) dan dari ekspektasi inflasi.

Cost push inflation merupakan kenaikan harga barang input dan faktor produksi mendahului kenaikan harga *output*. Hal tersebut utamanya dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara *partner* dagang, peningkatan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah (BBM, listrik, air, dll) dan *negative supply shocks* akibat bencana alam sehingga mengganggu distribusi. *Demand pull inflation* merupakan inflasi yang timbul karena meningkatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, namun *supply* barang dan jasa tersebut relatif terbatas. Terakhir, ekspektasi inflasi merupakan determinan inflasi yang dipengaruhi oleh perilaku konsumsi masyarakat menjelang momen tertentu seperti hari besar keagamaan maupun periode liburan.

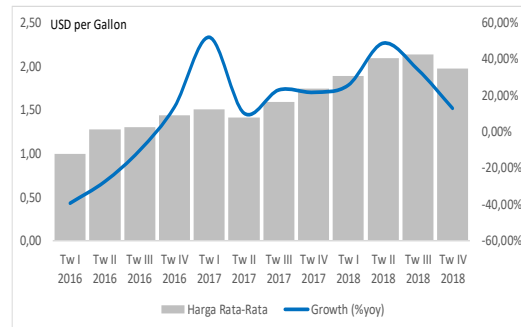
Pada tahun 2018, inflasi Kaltim tercatat sebesar 3,24% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,15% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kelompok pembentuknya, tercatat kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 4,28% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,76% (yoy) di tahun 2018 yang juga merupakan kelompok dengan andil penyumbang inflasi terbesar. Tekanan inflasi pada kelompok tersebut salah satunya bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara di tahun 2018 yang tercatat sebesar 2,68% (yoy) dan memiliki andil sebesar 0,07% (yoy) terhadap pembentukan inflasi Kaltim. Namun secara historikal terlihat bahwa pada umumnya kenaikan tarif angkutan udara di sepanjang tahun 2018 masih lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya, dimana tercatat tekanan inflasi tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar

60,74% (yoy) dengan andil 1,06% (yoy) terhadap pembentukan inflasi tahunan Kaltim di tahun tersebut (Grafik III.5).



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.5 Pergerakan Tekanan Inflasi IHK Kaltim dan Inflasi Angkutan Udara 2016-2018 (%yoy)



Sumber: Index Mundi, diolah

Grafik III.6 Pergerakan Harga Avtur Internasional 2016-2018 (%yoy)

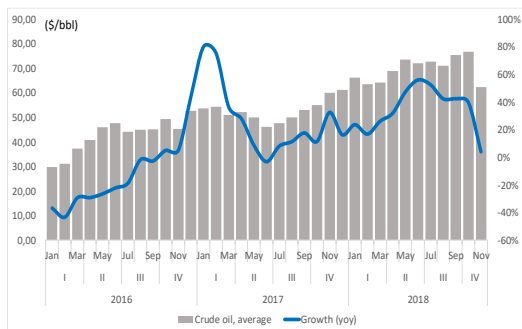
Tabel III.8 Struktur Biaya Maskapai Penerbangan

No	Komponen Biaya	Persentase
1	Biaya Sewa Pesawat	16%
2	Biaya Asuransi	8%
3	Gaji tetap Crew	3%
4	Gaji tetap Teknisi	0%
5	Crew Training	0%
BIAYA LANGSUNG TETAP		28 %
6	Pelumas	0%
7	BBM	25 %
8	Tunjangan Crew	1%
9	Pemeliharaan	20%
10	Jasa Bandara	1%
11	Ground Handling	2%
12	Biaya Catering	7%
BIAYA LANGSUNG VARIABEL		56 %
TOTAL BIAYA LANGSUNG		84 %
13	Biaya umum dan organisasi	3%
14	Biaya pemasaran	4%
BIAYA TIDAK LANGSUNG		7%
TOTAL		91 %
MARGIN 10%		9%
TOTAL BIAYA + MARGIN		100%

Sumber: Kemenhub

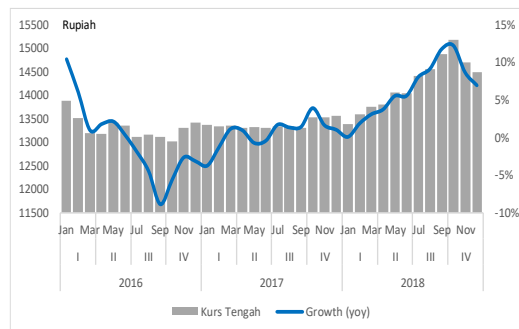
Kenaikan avtur yang terjadi di Indonesia merupakan respon dari kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada tahun 2018 dan tren penguatan USD terhadap rupiah (Grafik III.6). Tercatat pada bulan Oktober 2018, harga minyak dunia mencapai nilai tertingginya dalam tiga tahun terakhir sebesar USD 76,73\$ per barrel dan tumbuh sebesar 40% (yoy) (Grafik III.7). Selain itu pada tahun 2018 juga terjadi penguatan dollar terhadap rupiah, dimana tercatat juga pada bulan Oktober 2018, dollar menguat pada level tertingginya di nilai Rp 15,179 dan mengalami pertumbuhan sebesar 12% (yoy) (Grafik III.8). Hal tersebut menyebabkan beban impor Indonesia semakin tinggi, mengingat kebutuhan BBM dalam

negeri kurang lebih mencapai 1,3 juta barel perhari dan produksi Indonesia hanya sebesar 680 ribu barel per hari.



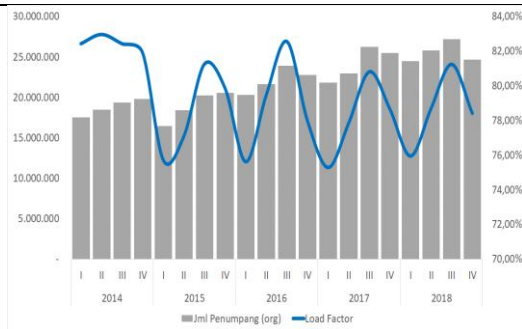
Sumber: World Bank, diolah

Grafik III.7 Pergerakan Rata-Rata Harga Minyak Dunia

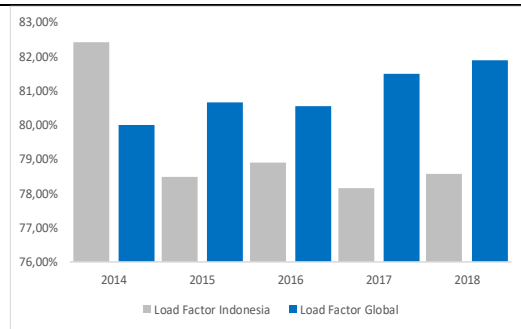


Grafik III.8 Pergerakan Kurs Rupiah terhadap USD

Dalam tatanan nasional, tercatat *load factor* penumpang angkutan udara nasional secara umum mengalami tren penurunan sejak tahun 2014. *Load factor* merupakan perbandingan antara *seat* yang terisi dengan kapasitas *seat* tersedia, sehingga dengan adanya tren penurunan *load factor* penumpang udara bisa disimpulkan bahwa penerimaan yang diterima maskapai kurang maksimal. Lebih lanjut, *load factor* penumpang angkutan udara nasional di triwulan IV 2018 tercatat sebesar 78,41% atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 81,25% (Grafik III.9). Ditinjau secara nasional, *load factor* penumpang Indonesia berada dibawah rata-rata global tahun 2018 yang mencapai 82% dan Indonesia berada di kisaran 78,5% (Grafik III.10). Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas utilisasi angkutan udara di Indonesia masih belum maksimal dan berpotensi untuk menimbulkan inefisiensi dalam biaya operasionalnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan rata-rata global, tarif angkutan udara di Indonesia termasuk kedalam kategori angkutan udara dengan tarif yang relatif murah. Tercatat terdapat beberapa maskapai Indonesia yang berada pada 10 maskapai dengan harga rata-rata kilometer terendah seperti Indonesia Air Asia, Citilink Indonesia, dan Lion Airlines dengan besaran masing-masing sebesar US\$0,08/km, US\$0,10/km, dan US\$0,10/km (Gambar III.2).

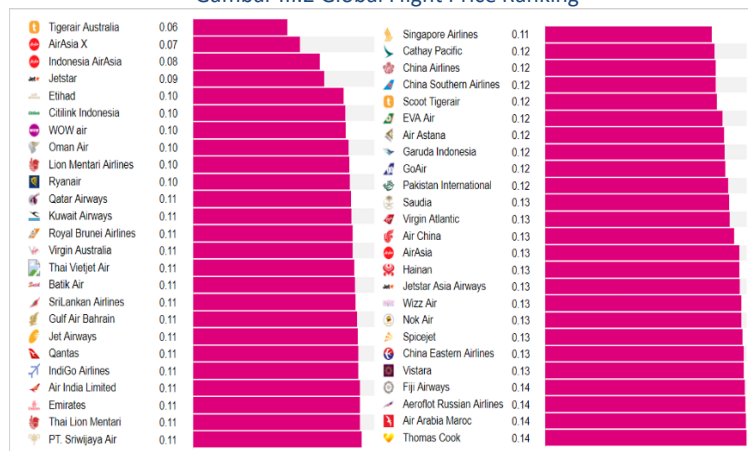


Sumber: Kemenhub melalui TPIP
Grafik III.9 Load Factor Indonesia



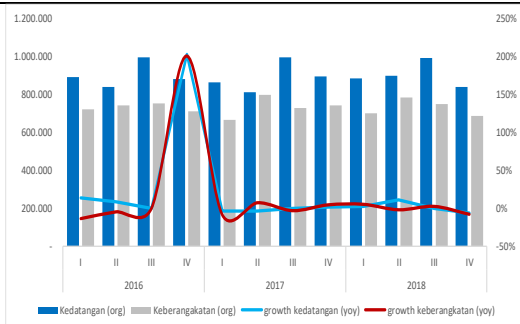
Sumber: Statista-Kemenhub
Grafik III.10 Load Factor Global-Indonesia

Gambar III.2 Global Flight Price Ranking

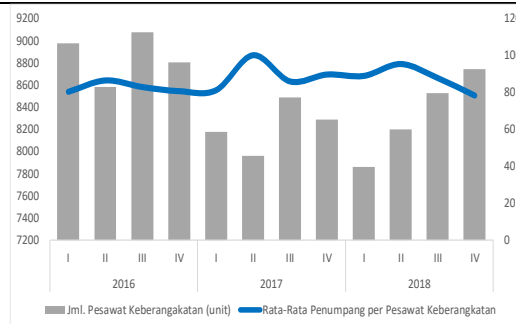


Sumber: rome2rio

Kembali ke Kaltim, terlihat bahwa secara umum di tahun 2018 jumlah kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Sepinggang Balikpapan terpantau relatif stabil dan mencapai puncaknya di triwulan III 2018 dengan jumlah kedatangan sebesar 992,352 orang dan jumlah keberangkatan sebesar 748,141 orang. Dengan mengacu kepada data tersebut, terlihat bahwa kenaikan tekanan tarif angkutan udara yang cukup tinggi di triwulan III 2018 sejalan dengan arus keberangkatan penumpang yang mengalami peningkatan sebesar 2,59% (yoy) dan mencapai 748,141 orang (Grafik III.11). Di sisi lain, apabila ditinjau dari tingkat efisiensi biaya operasional angkutan udara, tercatat maskapai di Balikpapan mengalami penurunan efisiensi dalam biaya operasionalnya yang tercermin dari penurunan rata-rata penumpang per pesawat keberangkatan di tahun 2018 dan mencapai angka 78 di triwulan IV 2018 atau mengalami penurunan sebesar -12,65% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2017 (Grafik III.12). Hal tersebut cukup menimbulkan kerugian bagi maskapai mengingat 16% komponen biaya maskapai berasal dari biaya sewa pesawat.

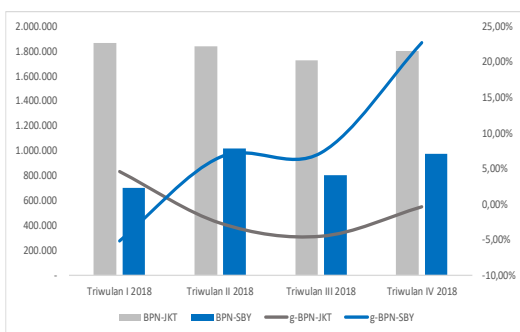


Sumber: Angka Pura, diolah
Grafik III.11 Arus Penumpang di Bandara Sepinggán Balikpapan



Sumber: Angka Pura, diolah
Grafik III.12 Jumlah Pesawat dan Rata-Rata Penumpang per Pesawat Keberangkatan di Bandara Sepinggán Balikpapan

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan oleh TPID Provinsi Kaltim dengan beberapa pelaku maskapai penerbangan serta instansi terkait didapatkan informasi bahwa kenaikan tarif angkutan udara yang dilakukan oleh beberapa maskapai di akhir tahun 2018 didorong oleh kebutuhan maskapai untuk mengkompensasi kerugian-kerugian yang terjadi dalam beberapa bulan sebelumnya dikarenakan kenaikan biaya operasional. Hal ini juga tercermin dari kenaikan tarif yang dilakukan oleh beberapa maskapai untuk beberapa rute padat penumpang di tahun 2018, utamanya maskapai *low cost carrier* rute Balikpapan-Surabaya yang mengalami kenaikan sebesar 22,74% (yoy) di tahun 2018. (Grafik III.13). Lebih lanjut, kedepan TPID Provinsi Kaltim berharap kegiatan usaha penerbangan dapat dilakukan secara seefisien mungkin sehingga kenaikan tarif angkutan udara bisa ditahan tidak tumbuh terlalu tinggi dan masih di kisaran bawah tarif batas atas yang telah ditentukan Peraturan Menteri Perhubungan No 14 Tahun 2016, (Tabel III.9) sehingga tekanan inflasi angkutan udara di Kaltim bisa berada dalam level yang terjaga.



Sumber: SPH Balikpapan
Grafik III.13 Harga Tiket Maskapai Rute BPN-JKT dan BPN-SBY

Tabel III.9 Tarif Batas Atas-Bawah Angkutan Udara Balikpapan

PM 14 Tahun 2016			
Rute		Tarif	
Dari	Ke	Min	Max
BPN	BJM	250.000	832.000
BPN	SUB	473.000	1.577.000
BPN	CGK	567.000	1.891.000
BPN	HLP	566.000	1.886.000

Sumber: Kemenhub

IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang meningkat pada triwulan IV 2018 memberi dampak positif terhadap stabilitas keuangan daerah dengan level risiko yang masih terjaga. Secara sektoral, hampir semua sektor menunjukkan kinerja positif. Sektor rumah tangga mengalami peningkatan kinerja tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang meningkat. Sementara sektor perbankan menunjukkan perbaikan kinerja seiring dengan peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Namun sektor korporasi sedikit mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kinerja komoditas batubara Kaltim.

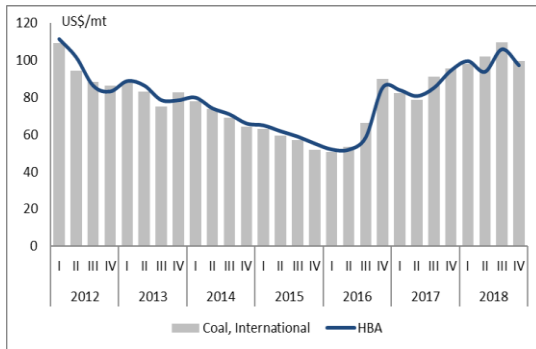
4.1 Asesmen Sektor Korporasi

Kinerja korporasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2018 cenderung mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh perkembangan eksternal. Risiko pelemahan nilai tukar rupiah akibat dari ketidakpastian ekonomi global, terutama kebijakan Amerika Serikat untuk meningkatkan *Fed Funding Rate* (FFR) serta harga komoditas yang mengalami perlambatan cukup memberi tekanan pada kinerja korporasi. Lebih lanjut, intensitas tingkat kerentanan eksternal pada triwulan IV 2018 cenderung meningkat seiring dengan masih tingginya tensi dagang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak terhadap pelemahan nilai tukar di sejumlah negara *emerging market*. Adapun terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi sumber kerentanan kinerja korporasi di Kaltim yaitu sebagai berikut:

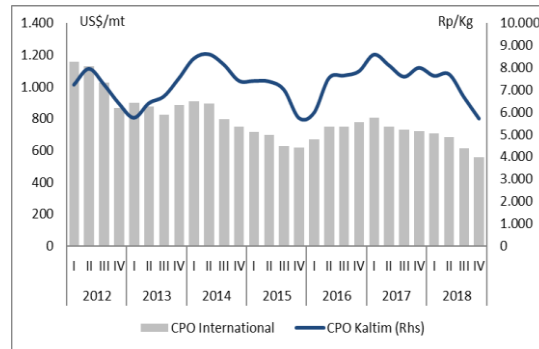
Penurunan harga komoditas utama Kalimantan Timur

Komoditas unggulan Kalimantan Timur adalah batu bara dan CPO yang kinerjanya dipengaruhi oleh harga komoditas utama internasional maupun domestik. Peningkatan harga komoditas internasional akan mendorong kinerja sektor korporasi di Kaltim, dan begitu pula sebaliknya. Pada triwulan IV 2018, risiko eksternal dari komoditas batubara relatif meningkat akibat melambatnya harga internasional dan domestik batubara. Tercatat secara tahunan, harga internasional dan domestik masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 2,98% (yoy) dan 4,42% (yoy) di triwulan IV 2018, cenderung melambat dibandingkan triwulan III 2018 yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 24,45% (yoy) dan 20,53% (yoy) (Grafik IV.1). Adapun perlambatan harga batu bara tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya permintaan batubara dari Tiongkok dikarenakan kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Tiongkok. Sementara itu, risiko eksternal juga bersumber dari penurunan harga internasional dan domestik CPO di triwulan IV 2018. Tercatat secara tahunan, harga internasional dan domestik CPO masing-

masing mengalami kontraksi sebesar -22,76% (yoy) dan -28,32% (yoy) di triwulan IV 2018, turun lebih dalam dibandingkan triwulan III 2018 yang masing masing tercatat kontraksi sebesar -16,33% (yoy) dan -12,00% (yoy). Adapun berlanjutnya kontraksi harga acuan tersebut lebih disebabkan oleh masih dibatasinya penggunaan CPO di Eropa yang menyebabkan pangsa pasar CPO global menjadi terbatas ditengah masih terjaganya pasokan CPO. (Grafik IV.2).



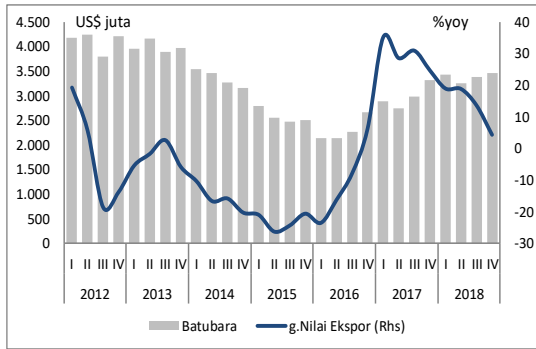
Sumber: Worldbank dan ESDM, diolah
Grafik IV.1 Perkembangan Harga Komoditas Batubara



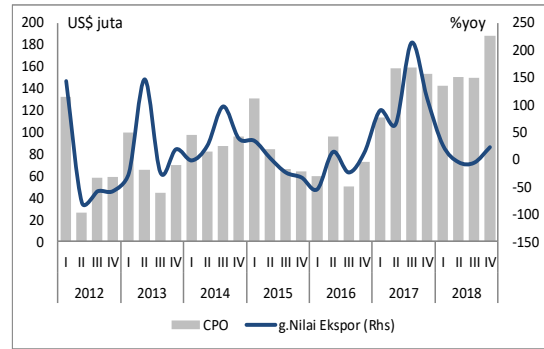
Sumber: Worldbank dan Disbun Kaltim, diolah
Grafik IV.2 Perkembangan Harga Komoditas CPO

Perlambatan pertumbuhan nilai ekspor komoditas utama Kalimantan Timur

Sebagian besar korporasi di Kaltim terpapar risiko yang berasal dari kinerja ekspor Kaltim. Hal ini sejalan dengan dominasi ekspor komoditas batubara dan CPO di perekonomian Kaltim. Peningkatan pertumbuhan nilai ekspor komoditas tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja korporasi Kaltim, demikian juga sebaliknya. Nilai ekspor batubara pada triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 4,29% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,64% (yoy) (Grafik IV.3). Pangsa ekspor komoditas ini mencapai 92,10% dari keseluruhan ekspor Kaltim triwulan IV 2018. Di sisi lain, pertumbuhan nilai ekspor CPO mengalami akselerasi di triwulan IV 2018 mencapai 22,44% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -5,86% (yoy). Adapun akselerasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan CPO dari Tiongkok dikarenakan masih tingginya tensi dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat yang menyebabkan pasokan kedelai dari Amerika Serikat menuju Tiongkok menjadi terbatas sehingga Tiongkok harus mengganti kebutuhan kedelainya dengan CPO. (Grafik IV.4).



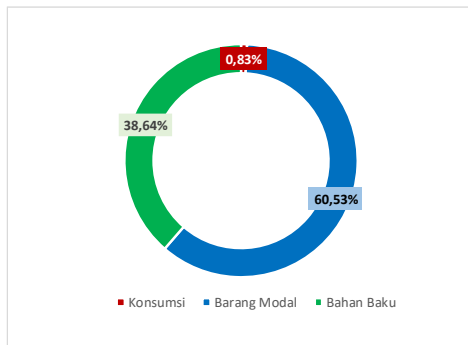
Grafik IV.3 Nilai Ekspor Batubara Kaltim



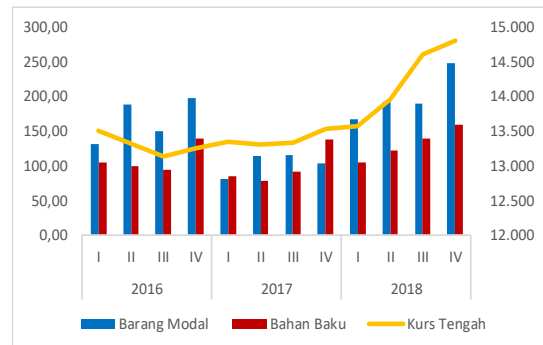
Grafik IV.4 Nilai Ekspor CPO Kaltim

Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

Komposisi impor luar negeri Kaltim adalah impor barang modal dan bahan baku sebagai input untuk proses produksi dengan pangsa masing-masing sebesar 60,53% dan 38,64% (Grafik IV.5). Pergerakan nilai tukar akan berpengaruh pada kebijakan perusahaan untuk melakukan impor, terutama barang modal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan korelasi yang positif antara pergerakan nilai tukar dengan nilai impor komoditas tersebut (Grafik IV.6). Apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka harga bahan modal dan bahan baku menjadi lebih mahal sehingga biaya produksi meningkat dan berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Depresiasi rupiah selain berdampak negatif pada peningkatan biaya produksi, di sisi lain dapat memberikan dampak positif terhadap korporasi yang berorientasi ekspor. Depresiasi menyebabkan meningkatnya daya saing ekspor dengan lebih murah harga jual produk apabila dibandingkan negara lain sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor.



Grafik IV.5 Pangsa Impor Kaltim Triwulan IV 2018



Grafik IV.6 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah, Impor Bahan Baku dan Barang Modal Triwulan IV 2018

4.1.1 Kinerja Keuangan Korporasi⁵

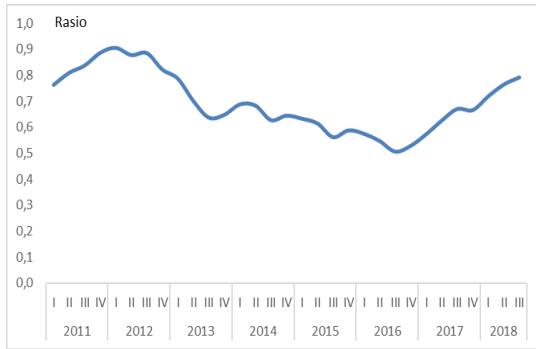
Kinerja sektor korporasi yang didominasi oleh sektor pertambangan cenderung mengalami perlambatan. Hal ini sejalan dengan perlambatan ekspor komoditas pertambangan dan kontraksi kinerja sektor pertambangan sebagai sektor utama ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2018. Pemulihan ekonomi global yang terbatas belum cukup untuk mendorong peningkatan ekspor walaupun sudah terdapat perbaikan harga beberapa komoditas ekspor pertambangan sehingga dapat mendorong peningkatan nilai ekspor. Sementara itu, kenaikan harga komoditas batubara tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya yang disertai dengan perlambatan nilai ekspor sehingga mempengaruhi kinerja keuangan korporasi yang bergerak di bidang usaha batubara. Kinerja korporasi dapat diukur dengan 4 (empat) aspek keuangan yaitu sebagai berikut:

Produktivitas⁶

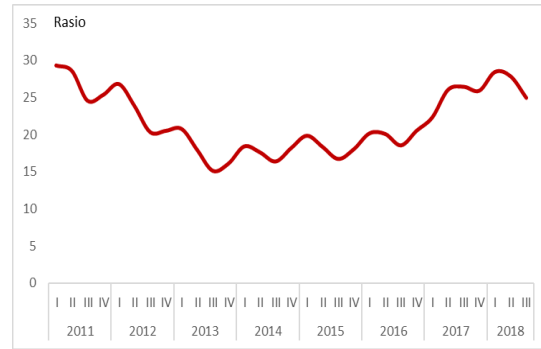
Tingkat efisiensi korporasi batubara sedikit mengalami peningkatan pada triwulan III 2018 dari sisi efisiensi aset. Hal tersebut dapat diukur dari *asset turnover* yang meningkat dari 0,76 pada triwulan sebelumnya menjadi 0,79 pada triwulan III 2018. Sementara, apabila diukur dengan pergerakan *inventory* dengan rasio *inventory turnover*, efisiensi mengalami sedikit penurunan dari 27,91 dari triwulan sebelumnya menjadi 25,00 pada periode pelaporan (Grafik IV.7-8). Rasio *inventory turnover* tersebut mengindikasikan sejauh mana korporasi dapat menjual komoditas pada periode tertentu yang berdampak terhadap pendapatan dan profitabilitas korporasi. Oleh karena itu, pada triwulan III 2018, produktivitas korporasi perlu menjadi perhatian.

⁵Data yang digunakan untuk asesmen kinerja keuangan korporasi ini berdasarkan data Bloomberg Tw-3 2018 terkini.

⁶Produktivitas dapat diukur dengan *Asset Turnover* yang merupakan kemampuan dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset nya untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, produktivitas dapat diukur dengan *Inventory Turnover* yang merupakan berapa kali jumlah stok/barang yang dapat dijual dalam satu periode.



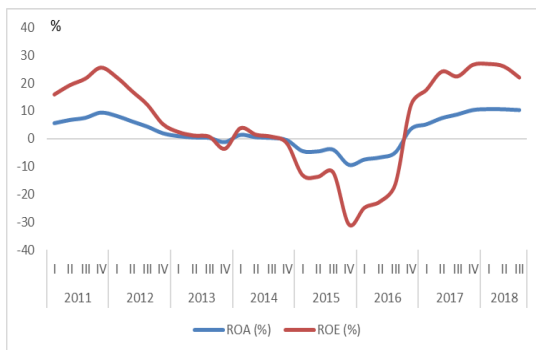
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.7 Tren Asset Turnover



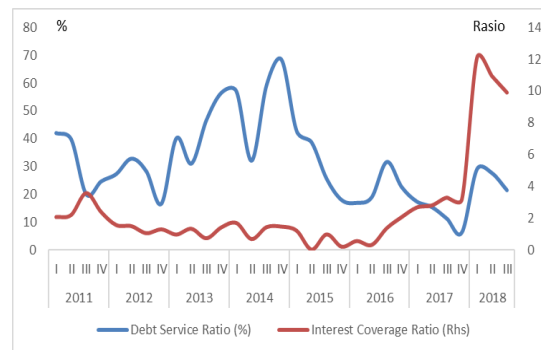
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.8 Tren Inventory Turnover

Profitabilitas

Profitabilitas korporasi batubara yang tercermin dari indikator *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) cenderung mengalami penurunan pada triwulan III 2018 dari triwulan sebelumnya yang masing-masing menurun dari 10,50% dan 26,08% menjadi 10,25% dan 22,09% (Grafik IV.9). Penurunan indikator tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan harga batubara yang lebih rendah dibanding tahun 2017 serta pertumbuhan nilai ekspor batubara yang melambat berdampak negatif terhadap pendapatan korporasi batubara.



Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.9 Tren Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)



Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.10 Debt to Service Ratio dan Solvability Korporasi Sektor Pertambangan

Solvabilitas⁷

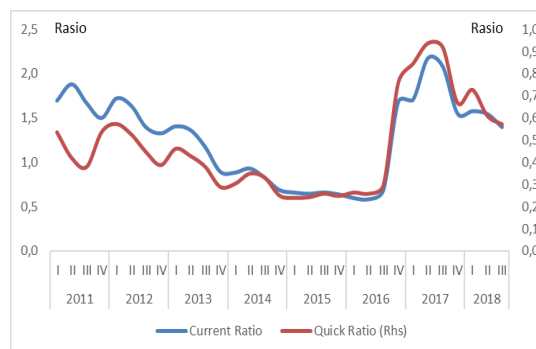
Debt to Service Ratio (DSR) korporasi di subsektor batubara mengalami penurunan. Pada triwulan III 2018, DSR korporasi batubara sebesar 21,37%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 27,55%. Rasio DSR merefleksikan kemampuan korporasi dalam melakukan pembayaran utang atas pendapatan yang diperoleh. Semakin besar rasio DSR maka beban utang korporasi semakin tinggi. Korporasi-korporasi yang sedang melakukan investasi akan

⁷Level DSR dan ICR pada publikasi KEKR ini berbeda dari publikasi KEKR sebelumnya yang dikarenakan penambahan korporasi

memiliki rasio DSR tinggi, namun dalam batas tertentu rasio tersebut diperbolehkan karena diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif. *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi subsektor batu bara juga mengalami penurunan dari 10,93 di triwulan II 2018 ke 9,90 pada triwulan III 2018 (Grafik IV.10). ICR merupakan rasio hutang dan profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemudahan korporasi dalam membayar bunga pinjamannya. Semakin rendah ICR korporasi, maka semakin besar porsi pembayaran bunga hutang tersebut dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, solvabilitas korporasi batubara pada triwulan III 2018 membaik dan masih dalam batas wajar dalam rangka meningkatkan produktivitas di tengah tren penurunan pertumbuhan harga batu bara dan juga nilai ekspor.

Likuiditas

Likuiditas korporasi batubara sedikit mengalami penurunan berdasarkan indikator likuiditas *current ratio* dan *quick ratio*⁸ yang masing-masing menurun dari 1,55 dan 0,61 pada triwulan II 2018 menjadi 1,40 dan 0,57 pada triwulan III 2018 (Grafik IV.11). Berdasarkan asesmen likuiditas, penurunan likuiditas ini dapat disebabkan oleh penurunan nilai kinerja ekspor batubara yang berdampak terhadap penurunan profitabilitas korporasi sehingga likuiditas korporasi mengalami penurunan.



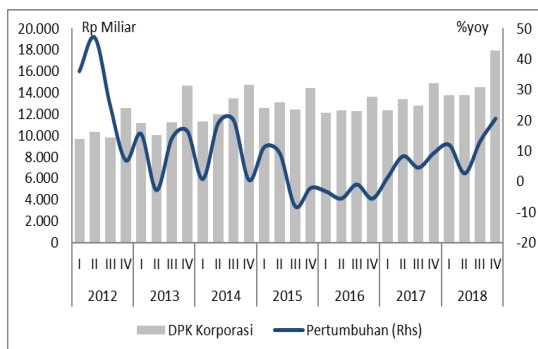
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.11 Current Ratio dan Quick Ratio Korporasi Sektor Pertambangan

4.1.2 Eksposur Sektor Korporasi pada Sektor Perbankan

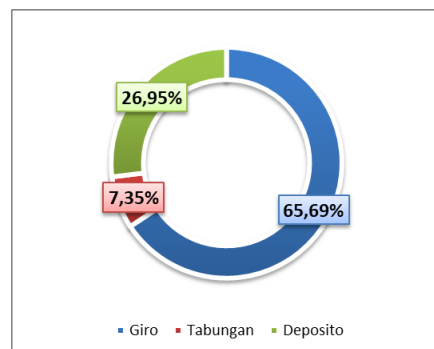
Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang bersumber dari korporasi Kaltim triwulan IV 2018 mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan beberapa triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, DPK korporasi tercatat sebesar Rp 17,97 triliun, meningkat dari Rp14,5

⁸Rasio *current ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran obligasi jangka pendek dengan aset likuid pada neraca perusahaan, sementara rasio *quick ratio* mengukur likuiditas jangka pendek korporasi tanpa memasukkan aset inventori korporasi

triliun pada triwulan III 2018. Pertumbuhan DPK juga mengalami kenaikan dari 13,21% (yoy) menjadi 20,65% (yoy) pada periode triwulan IV 2018 (Grafik IV.12). Peningkatan pertumbuhan DPK korporasi bersumber dari jenis simpanan deposito yang mengalami peningkatan dari -3,09% pada triwulan III 2018 menjadi 31,17% (yoy) pada triwulan IV 2018. Peningkatan pertumbuhan deposito korporasi disinyalir sebagai dampak adanya peningkatan tingkat suku bunga deposito pada periode laporan. Berdasarkan jenisnya, giro masih memiliki pangsa terbesar dalam DPK korporasi Kaltim sebesar 65,69%. Sementara deposito dan tabungan masing-masing memiliki pangsa sebesar 26,95% dan 7,35% (Grafik IV.13).



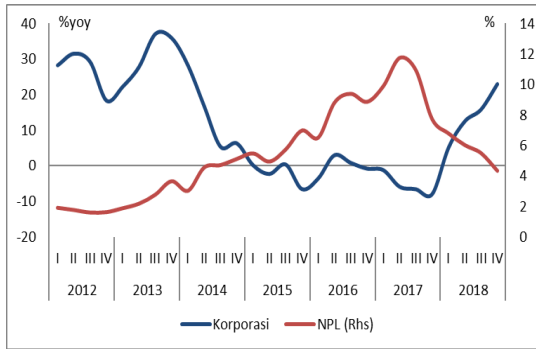
Grafik IV.12 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim



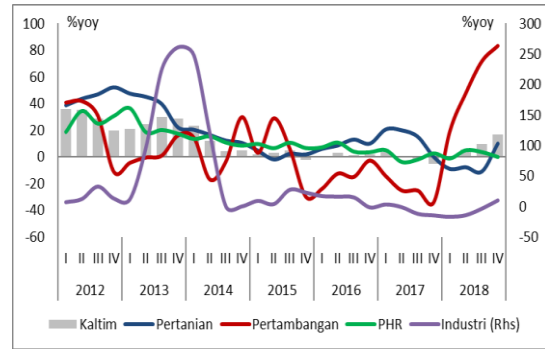
Grafik IV.13 Komposisi DPK Korporasi Kaltim

Penyaluran kredit korporasi Kaltim di triwulan IV 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit kepada debitur korporasi pada triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 22,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,81% (yoy) (Grafik IV.14). Pertumbuhan ini didorong oleh korporasi sektor pertambangan yang tumbuh signifikan sebesar 83,55% (yoy).

Risiko kredit yang terlihat dari *Non Performing Loan (NPL)* semakin menunjukkan perbaikan dan berada di bawah *threshold 5%* pada triwulan IV 2018. NPL sektor korporasi mengalami penurunan dari 5,49% di triwulan III 2018 menjadi 4,33% di triwulan IV 2018 (Grafik IV.15). Lapangan usaha dengan NPL tertinggi masih pada sektor pertambangan, dimana terjadi peningkatan dari 11,41% menjadi 12,33%. Peningkatan NPL ditengarai oleh menurunnya kinerja korporasi pertambangan yang dikarenakan oleh peningkatan harga batubara triwulan IV 2018 yang tidak setinggi pada tahun lalu dengan triwulan yang sama.



Grafik IV.14 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim

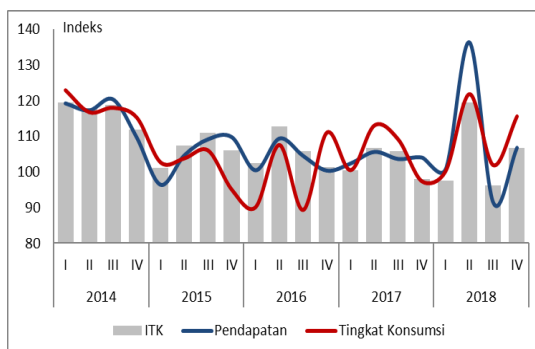


Grafik IV.15 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha

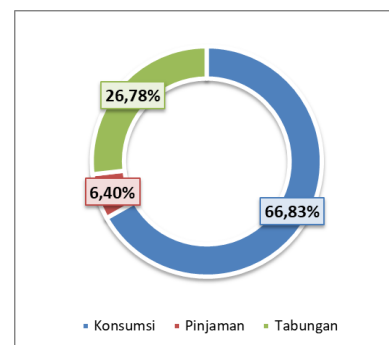
4.2 Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.2.1 Kinerja Rumah Tangga

Kondisi ekonomi dan optimisme konsumen mengalami peningkatan pada triwulan IV 2018. Hal tersebut ditandai dengan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang meningkat dari 96,26 pada triwulan sebelumnya menjadi 106,79 pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.16). Peningkatan ITK pada periode pelaporan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga dan volume konsumsi rumah tangga dengan masing-masing indeks mengalami peningkatan dari 91,29 dan 101,81 pada triwulan sebelumnya menjadi 106,68 dan 115,47 pada triwulan IV 2018. Sejalan dengan peningkatan ITK, proporsi konsumsi menjadi komponen proporsi belanja rumah tangga terbesar dengan persentase sebesar 68,83% pada triwulan IV 2018 seiring dengan perilaku musiman konsumen yang lebih banyak melakukan konsumsi di akhir tahun. (Grafik IV.17).



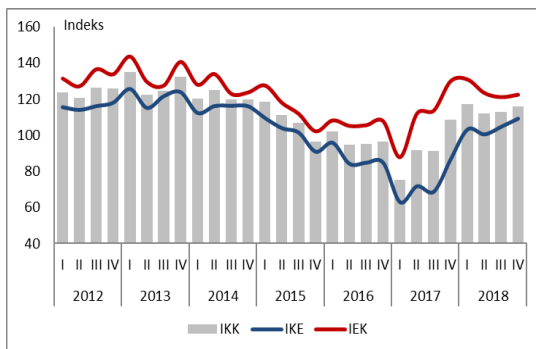
Sumber: BPS, diolah
Grafik IV.16 Indeks Tendensi Konsumen



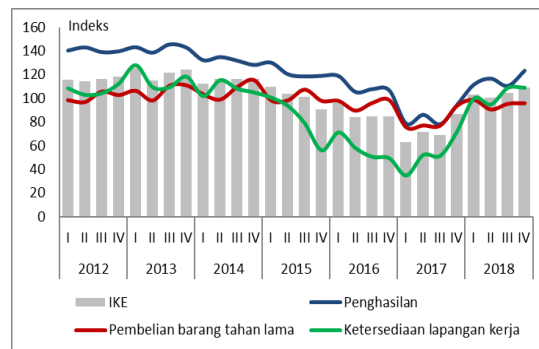
Grafik IV.17 Proporsi Belanja Rumah Tangga

Kinerja sektor rumah tangga yang positif juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, dimana terjadi peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 112,94 pada

triwulan III 2018 menjadi 115,86 pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.18). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya kedua komponen pembentuk indeks tersebut, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekpektasi Konsumen (IEK). Lebih lanjut, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) meningkat secara dominan didorong oleh peningkatan sub komponen penghasilan yang meningkat dari 110,17 pada triwulan III 2018 menjadi 123,00 pada triwulan IV 2018. Sementara sub komponen pembelian barang tahan lama dan ketersediaan lapangan kerja meningkat tipis masing-masing dari 95,33 dan 108,50 pada triwulan III 2018 menjadi 95,33 dan 108,67 pada triwulan IV 2018. (Grafik IV.19)



Grafik IV.18 Indeks Keyakinan Konsumen

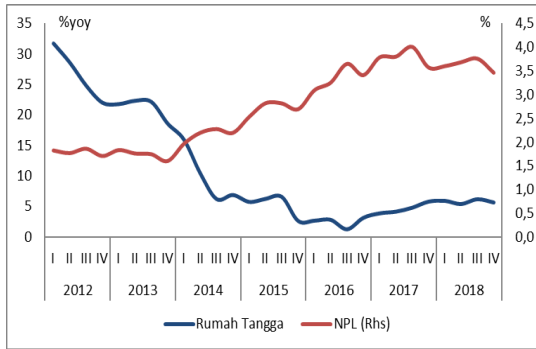


Grafik IV.19 Indeks Kondisi Ekonomi

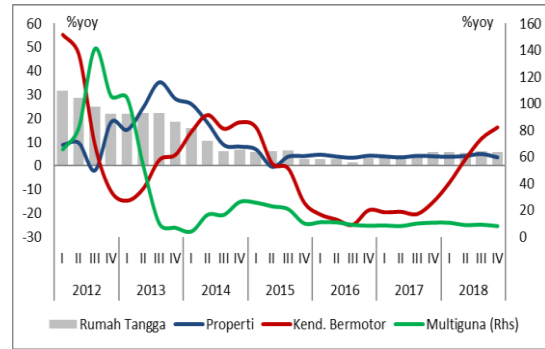
4.2.2 Eksposur Sektor Rumah Tangga pada Sektor Perbankan

Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada debitur Rumah Tangga (RT) mengalami perlambatan pada triwulan IV 2018. Laju pertumbuhan di triwulan IV 2018 tercatat sebesar 5,67% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,21% (Grafik IV.20). Perlambatan laju pertumbuhan kredit RT Kaltim triwulan IV 2018 lebih disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit properti dan multiguna yang masing-masing melambat dari 5,05% (yoy) menjadi 3,64% (yoy) dan 9,03% (yoy) menjadi 7,95% (yoy) (Grafik IV.21).

Perlambatan laju pertumbuhan kredit RT Kaltim triwulan IV 2018 diiringi dengan risiko kredit yang mulai mengalami penurunan. Pada triwulan IV 2018, NPL kredit RT Kaltim sedikit menurun dari 3,76% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,46% (Grafik IV.20). Penurunan risiko kredit disebabkan oleh penurunan risiko kredit properti, kendaraan bermotor dan multiguna yang masing-masing turun dari 7,89%; 2,54%; dan 1,37% menjadi 7,38%; 1,98%; dan 1,31%. Berdasarkan hasil kegiatan *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim dengan sektor perbankan, perbaikan NPL ini dikarenakan usaha bank untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah.

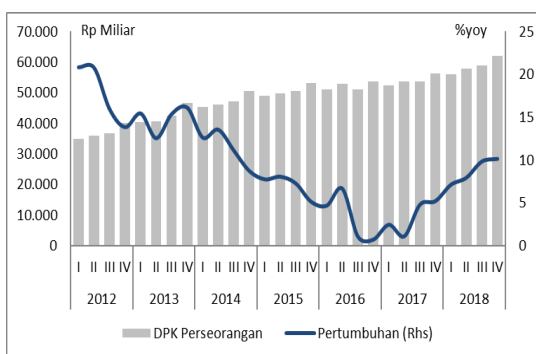


Grafik IV.20 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim

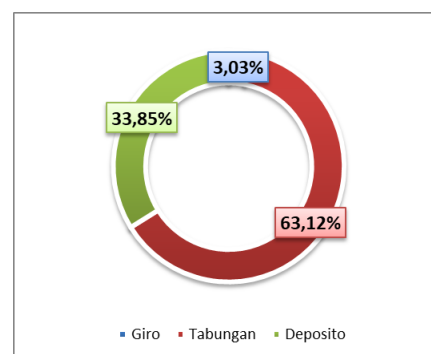


Grafik IV.21 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenisnya

Kinerja DPK perbankan yang bersumber dari perseorangan (rumah tangga) Kaltim masih mengalami peningkatan pada triwulan IV 2018. Pertumbuhan DPK rumah tangga meningkat dari 9,79% (yoy) di triwulan III 2018 menjadi 10,10% (yoy) pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.22). Peningkatan ini didorong DPK dalam bentuk deposito yang meningkat signifikan dari 4,465 (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 9,97% (yoy) pada triwulan IV 2018. Sementara DPK dalam bentuk giro dan tabungan masing-masing mengalami penurunan dari 14,72% (yoy) dan 12,70% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 5,50% (yoy) dan 10,40% (yoy) pada triwulan IV 2018. Berdasarkan jenis DPK, tabungan masih mendominasi DPK perseorangan Kaltim dengan pangsa sebesar 63,12%. Sementara itu, DPK perseorangan Kaltim disimpan dalam bentuk deposito dan giro yang memiliki pangsa masing-masing sebesar 33,85% dan 3,03% (Grafik IV.23). Gambaran ini konsisten dengan perilaku rumah tangga Kaltim yang cenderung untuk menabung sebagian penghasilan tambahan seperti bonus di akhir tahun dalam bentuk *saving*.



Grafik IV.22 Perkembangan DPK RT Kaltim



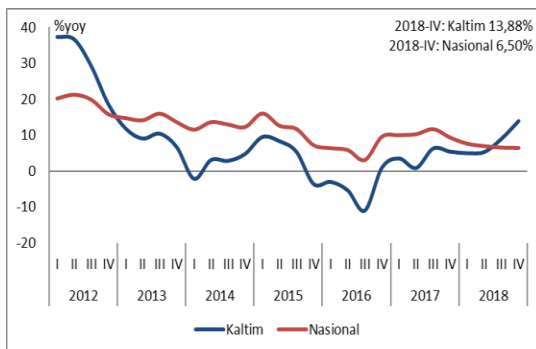
Grafik IV.23 Komposisi DPK RT Kaltim

4.3 Asesmen Sektor Perbankan

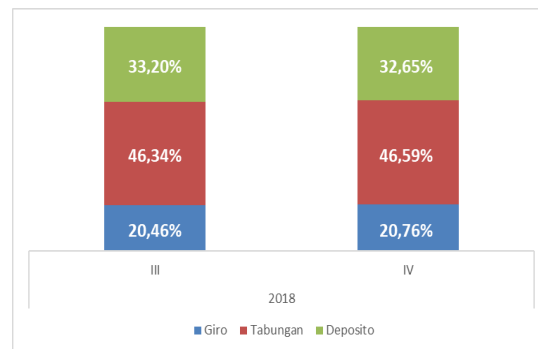
Pada triwulan IV 2018, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim, intermediasi perbankan mengalami peningkatan dengan meningkatnya pertumbuhan DPK yang diiringi oleh pertumbuhan kredit. Peningkatan intermediasi perbankan tersebut juga diiringi dengan perbaikan risiko kredit perbankan yang tercatat turun pada triwulan IV 2018 dan berada pada level yang aman. Meskipun demikian, perlu diwaspadai risiko kredit yang bersumber dari sektor pertambangan. Peningkatan harga batubara yang lebih rendah apabila dibandingkan tahun lalu menyebabkan *repayment capacity* pelaku usaha/korporasi pertambangan berkurang sehingga berdampak terhadap risiko kredit sektor pertambangan.

4.3.1 Asesmen Kondisi Intermediasi Perbankan

Kinerja DPK Kaltim di triwulan IV 2018 mengalami pertumbuhan positif. Pada periode laporan, DPK tumbuh sebesar 13,88% (yoy), meningkat dari 8,94% (yoy) di triwulan sebelumnya (Grafik IV.24). Arah pertumbuhan DPK Kaltim pada periode laporan ini berbeda dengan arah pertumbuhan DPK nasional yang cenderung melambat dari triwulan sebelumnya dimana pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 6,50%. Berdasarkan jenis simpanan, peningkatan kinerja DPK disebabkan oleh peningkatan pangsa DPK dalam bentuk tabungan dari 46,34% pada triwulan III 2018 menjadi 46,59% pada triwulan IV 2018 dan Giro dari 20,46% pada triwulan III 2018 menjadi 20,76% pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.25).

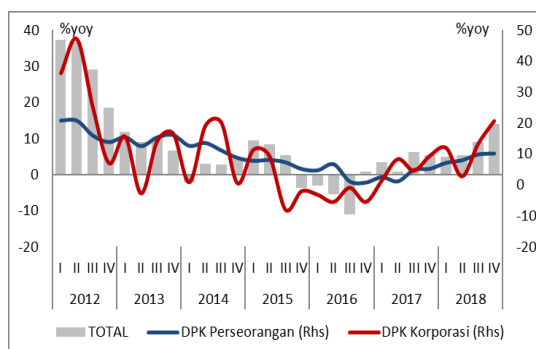


Grafik IV.24 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional



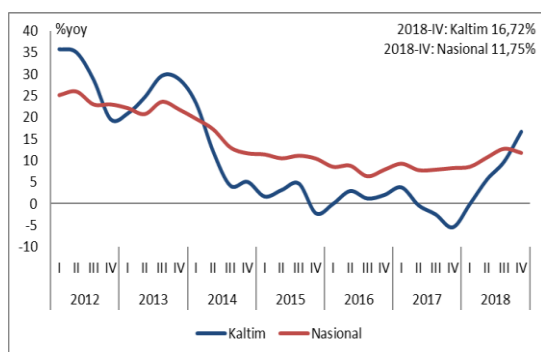
Grafik IV.25 Komposisi DPK Kaltim

Sementara berdasarkan golongannya, peningkatan DPK secara dominan didorong oleh pertumbuhan positif DPK korporasi yang tumbuh dari 13,21% (yoy) dari triwulan sebelumnya menjadi 20,65% (yoy) pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.26). Hal ini dikarenakan peningkatan deposito korporasi sebesar 31,17% (yoy) pada triwulan IV 2018 seiring dengan peningkatan suku bunga deposito perbankan pada periode laporan.

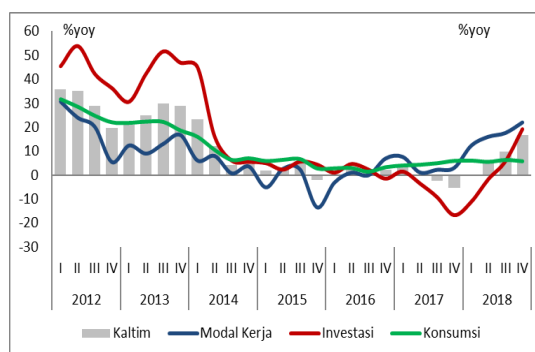


Grafik IV.26 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Debitur

Pertumbuhan penyaluran kredit menunjukkan tren positif yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim pada triwulan IV 2018. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya optimisme pelaku ekonomi terhadap kondisi ekonomi Kaltim ke depan. Pertumbuhan kredit tumbuh positif pada triwulan IV 2018 sebesar 16,72% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 9,80% (yoy). Tren pertumbuhan kredit Kaltim pada periode pelaporan ini berbeda arah dengan pertumbuhan kredit nasional yang tumbuh sebesar 11,75% (yoy) (Grafik IV.27). Kinerja kredit Kaltim yang tumbuh positif pada triwulan IV 2018 ini dipengaruhi oleh kredit investasi dan modal kerja yang mendominasi penyaluran kredit Kaltim dengan peningkatan masing-masing sebesar 5,65% (yoy) dan 17,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 19,12% (yoy) dan 21,99% (yoy) pada periode pelaporan (Grafik IV.28-29).

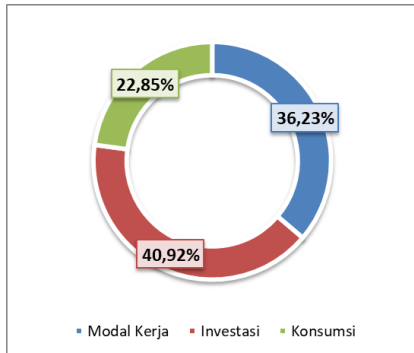


Grafik IV.27 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional

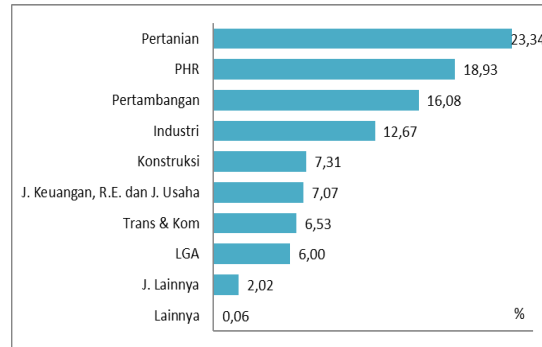


Grafik IV.28 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan sektornya, kontribusi penyaluran kredit Kaltim terbesar masih kepada sektor pertanian. Pada triwulan IV 2018, pangsa penyaluran kredit ke sektor pertanian sebesar 23,34% dari total kredit. Sektor lain yang juga memiliki pangsa tinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18,93%, dan pertambangan sebesar 16,08% (Grafik IV.30).

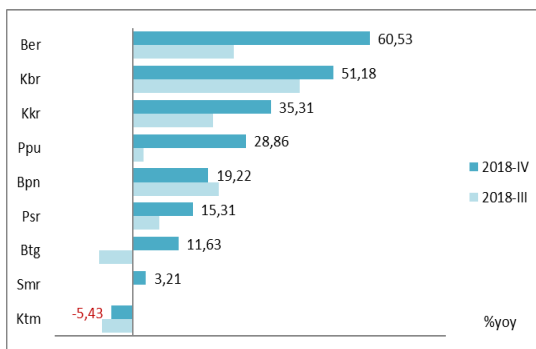


Grafik IV.29 Komposisi Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaan

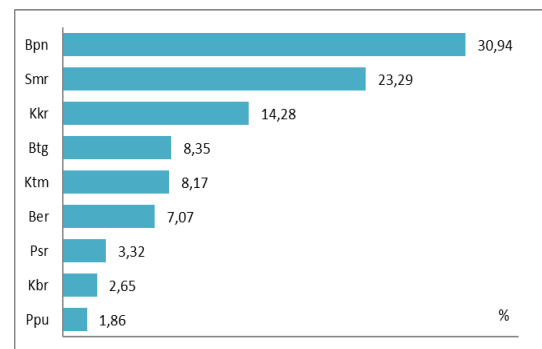


Grafik IV.30 Komposisi Kredit Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara spasial, kinerja pertumbuhan kredit yang positif juga didukung oleh sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Kaltim, kecuali Kutai Timur. Kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan kredit tertinggi adalah Kab. Berau sebesar 60,53% (yoy) dan diikuti oleh Kab. Kutai Barat sebesar 51,18% (yoy) (Grafik IV.31). Sementara itu, penyaluran kredit masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda, kedua wilayah tersebut menyumbang pangsa sebesar 54,23 % terhadap total kredit di Kaltim (Grafik IV.32). Kondisi ini sejalan dengan keadaan kedua kota tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi daerah. Tingginya penyaluran kredit di Kota Balikpapan didorong oleh banyaknya perusahaan besar asing ataupun nasional yang memiliki kantor cabang di Kota Balikpapan. Adapun penyaluran kredit di Kota Samarinda didominasi oleh sektor perdagangan.



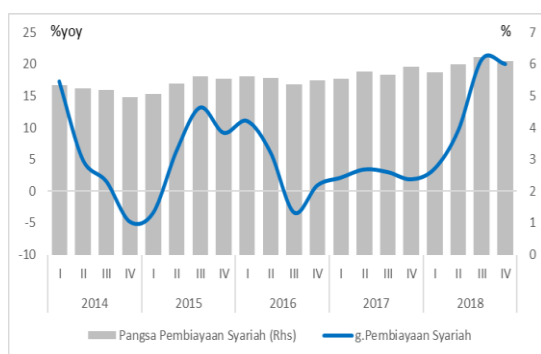
Grafik IV.31 Perkembangan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



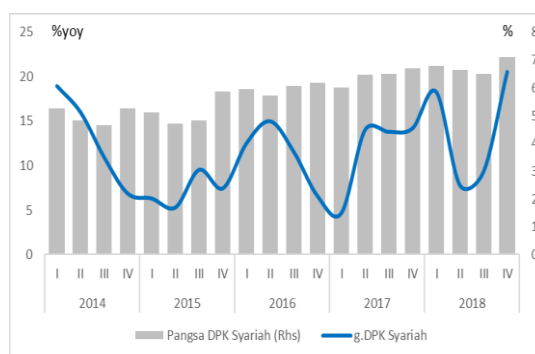
Grafik IV.32 Komposisi Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

4.3.1.1 Asesmen Intermediasi Perbankan Syariah

Meskipun intermediasi perbankan Kaltim secara umum meningkat, intermediasi perbankan syariah dari sisi penyaluran pembiayaan pada triwulan IV 2018 relatif melambat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pembiayaan syariah yang sedikit melambat dari 20,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 20,02% (yoy) pada triwulan IV 2018 disertai dengan penurunan pangsa pembiayaan syariah dari 6,22% pada triwulan sebelumnya menjadi 6,08% pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.33). Meskipun demikian, intermediasi perbankan syariah dari sisi penghimpunan DPK tumbuh cukup pesat dari 9,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 20,54% (yoy) pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.34). Pertumbuhan yang positif ini diikuti dengan peningkatan pangsa DPK syariah dari 6,51% pada triwulan sebelumnya menjadi 7,09% pada triwulan IV 2018.



Grafik IV.33 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim

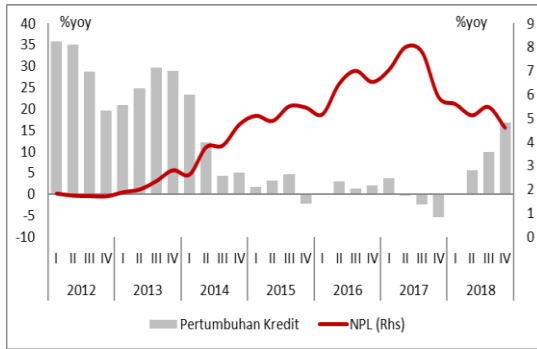


Grafik IV.34 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim

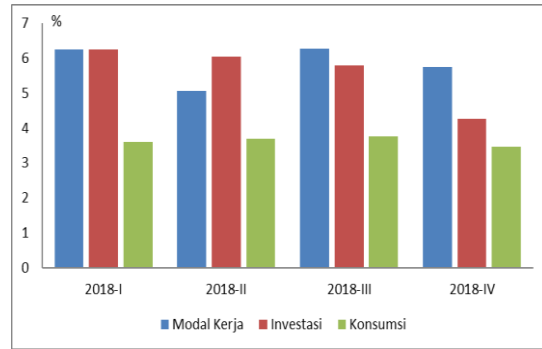
4.3.2 Asesmen Risiko Perbankan

Risiko Kredit

Risiko kredit perbankan pada triwulan IV 2018 turun dengan level yang cukup baik di bawah threshold 5%. Intermediasi perbankan yang membaik baik dari sisi pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan DPK perbankan di Kaltim pada triwulan IV 2018 disertai oleh perbaikan risiko kredit dengan penurunan NPL dari 5,49% menjadi 4,61% (Grafik IV.35). Perbaikan risiko kredit ini didukung oleh menurunnya ketiga komponen risiko kredit berdasarkan jenis penggunaan, dimana risiko Kredit Modal Kerja (KMK) dengan NPL 6,26% pada triwulan lalu turun menjadi 5,75% pada triwulan IV 2018, Kredit Investasi (KI) dengan NPL 5,78% pada triwulan lalu turun menjadi 4,25% pada triwulan IV 2018 dan Kredit Konsumsi (KI) dengan NPL 3,76% pada triwulan lalu turun menjadi 5,75% pada triwulan IV 2018 (Grafik IV.36).

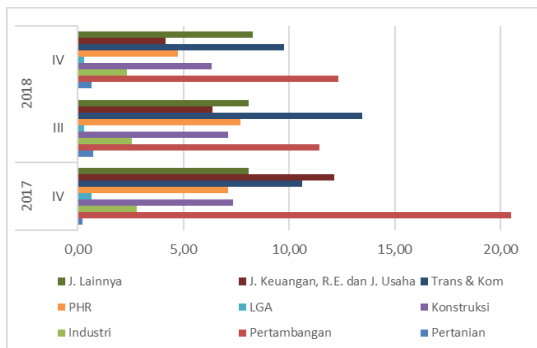


Grafik IV.35 Perkembangan Risiko Kredit

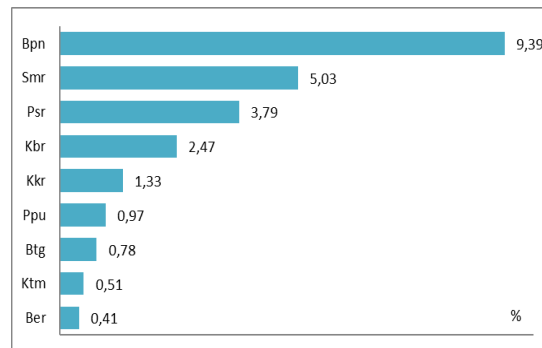


Grafik IV.36 Risiko Kredit per Jenis Penggunaan

Berdasarkan sektor utama ekonomi Kaltim, pada triwulan IV 2018, risiko kredit sektor pertambangan mengalami peningkatan dengan NPL sebesar 12,33% yang meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 11,41%. Selain sektor pertambangan, sektor utama ekonomi yang masih di atas *threshold* 5% adalah sektor transportasi dan komunikasi (9,75%), dan sektor konstruksi (6,33%). Risiko kredit yang rendah berada pada sektor Listrik, Gas, dan Air (LGA), dan pertanian dengan NPL dibawah 1% (Grafik IV.37). Secara spasial, Kota Balikpapan memiliki risiko kredit tertinggi di triwulan IV 2018 dengan NPL sebesar 9,33%. Selain itu, kota yang memiliki angka NPL di atas *treshold* 5% adalah Kota Samarinda dengan NPL sebesar 9,39% (Grafik IV.38).



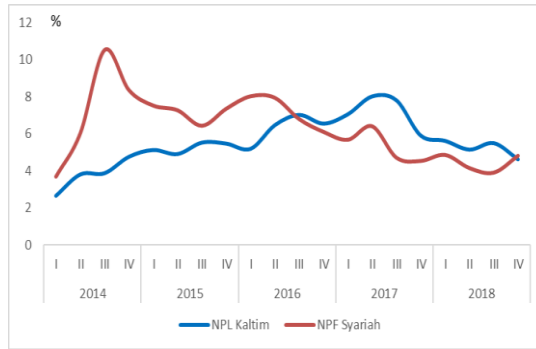
Grafik IV.37 Risiko Kredit per Sektor Ekonomi



Grafik IV.38 Risiko Kredit Spasial

4.1.1.1 Asesmen Risiko Perbankan Syariah

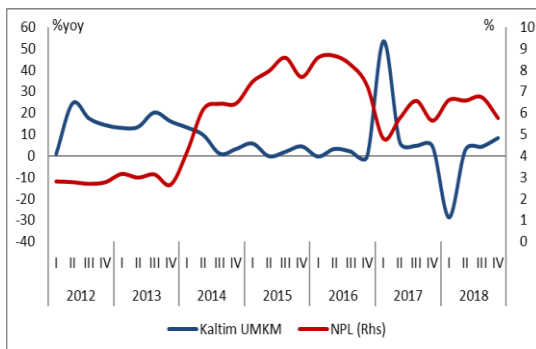
Risiko pembiayaan perbankan syariah meningkat dan lebih tinggi dari risiko perbankan konvensional pada triwulan IV 2018. Risiko pembiayaan syariah yang tercermin dari nilai *Non Performing Financing* (NPF) tercatat sebesar 4,82% pada triwulan IV 2018, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,91%. Meskipun masih di bawah *treshold* 5%, nilai NPF tersebut mulai berada pada level lebih tinggi dari perbankan konvensional yang tercatat sebesar 4,61%. (Grafik IV.39).



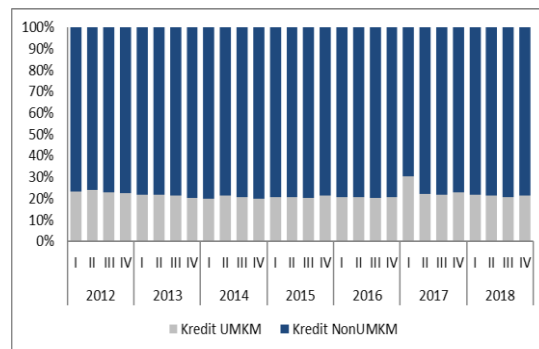
Grafik IV.39 Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Syariah

4.4 Asesmen Sektor UMKM

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit umum, kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kaltim masih menunjukkan pertumbuhan positif. Kredit UMKM Kaltim triwulan IV 2018 tumbuh sebesar 8,23% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,14% (yoy) (Grafik IV.40). Kredit UMKM memiliki pangsa sebesar 21,19% dari total kredit Kaltim pada triwulan IV 2018, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang memiliki pangsa 20,55%. Namun demikian, pergerakan pangsa kredit UMKM di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Grafik IV.41). lebih lanjut, rasio penyaluran kredit UMKM tersebut masih berada diatas level minimum rasio kredit UMKM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan rasio kredit UMKM terhadap total portofolio kredit perbankan sebesar 20% pada tahun 2018.



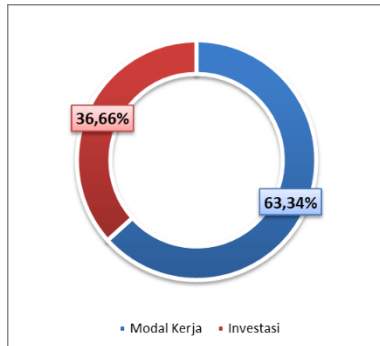
Grafik IV.40 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim



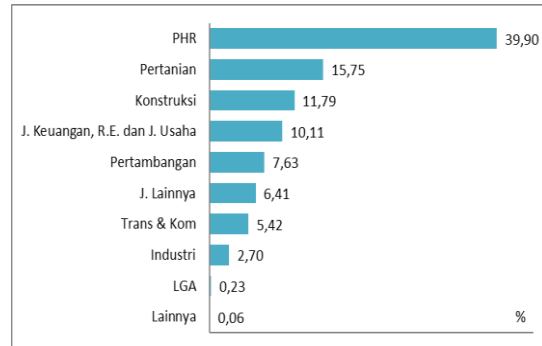
Grafik IV.41 Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltim

Pada triwulan IV 2018, risiko kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari NPL kredit UMKM Kaltim yang mengalami penurunan dari 6,73% pada triwulan sebelumnya menjadi 5,75% pada triwulan IV 2018. Berdasarkan lapangan usaha, NPL kredit

UMKM tertinggi dialami oleh sektor listrik, gas, dan air sebesar 27,06%, dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 13,51% meskipun sudah menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 14,42%.



Grafik IV.42 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik IV.43 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM di Kaltim pada triwulan IV 2018 masih didominasi oleh jenis kredit modal kerja. Kredit modal kerja menyumbang pangsa 63,34% terhadap total kredit UMKM Kaltim. Adapun kredit investasi UMKM di triwulan IV 2018 memiliki pangsa 36,66% (Grafik IV.42). Jenis usaha UMKM yang tidak *capital intensive* menjadikan pembiayaan lebih besar untuk operasionalisasi UMKM ataupun pembelian bahan baku. Selain itu, umumnya kredit investasi mensyaratkan usaha telah berjalan 1-2 tahun sehingga sulit didapatkan oleh pengusaha baru. Berdasarkan lapangan usahanya, sebesar 39,90% dari kredit UMKM Kaltim disalurkan untuk sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR). Sektor yang memiliki pangsa terbesar kedua adalah pertanian dengan pangsa sebesar 15,75% (Grafik IV.43).

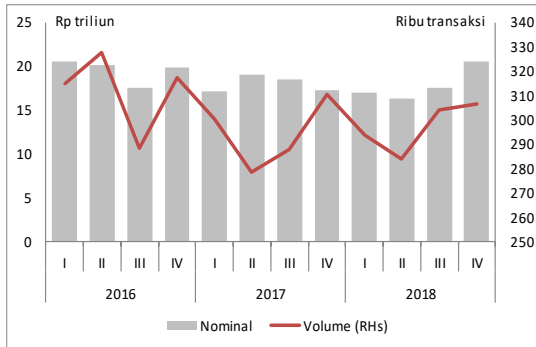
V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan IV 2018 aliran uang di Kalimantan Timur mencatatkan transaksi net outflow sebesar Rp5,06 triliun atau turun 11,75% (yoy), sedangkan transaksi non tunai mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sesuai dengan pola seasonal-nya. Sementara itu, elektronifikasi transaksi keuangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai terus mengalami perkembangan positif.

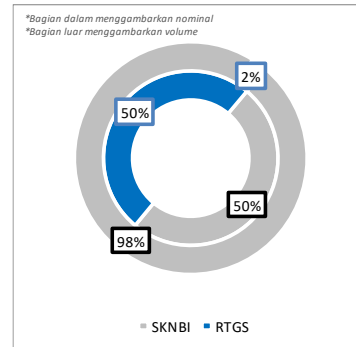
5.1 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Transaksi secara non tunai dapat dilakukan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sarana transfer dana non tunai secara ritel dengan nominal transaksi sampai dengan Rp 500 juta, sedangkan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi yang bernilai besar, yaitu di atas Rp 100 juta. Untuk transaksi di Kalimantan Timur, penyelenggaraan kliring dilakukan di 2 (dua) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Samarinda dan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

Secara nominal, transaksi non tunai Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mengalami kenaikan apabila dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, jumlah transaksi non tunai Kalimantan Timur mencapai Rp 20,46 triliun dengan volume sebesar 299,8 ribu transaksi. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III 2018 yang mencapai Rp 17,57 triliun dengan volume sebesar 297,49 ribu transaksi (Grafik V.1). Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi non tunai Kalimantan Timur triwulan IV 2018 tumbuh positif sebesar 18,29% (yoy). Berdasarkan jenis instrumennya, transaksi non tunai Kalimantan Timur triwulan IV 2018 didominasi oleh transaksi yang menggunakan SKNBI senilai Rp10,2 triliun. Berdasarkan volume, transaksi yang menggunakan SKNBI mendominasi sebesar 98% atau sebanyak 299,8 ribu transaksi pada triwulan IV 2018 (Grafik V.2).

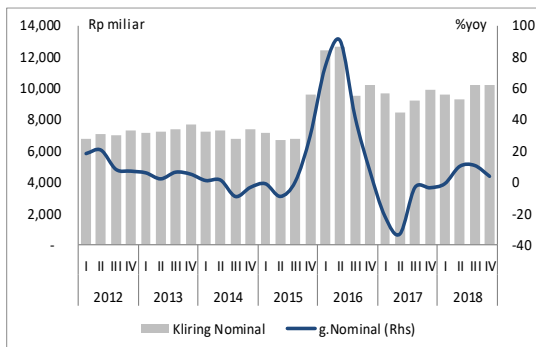


Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Non Tunai Kalimantan Timur

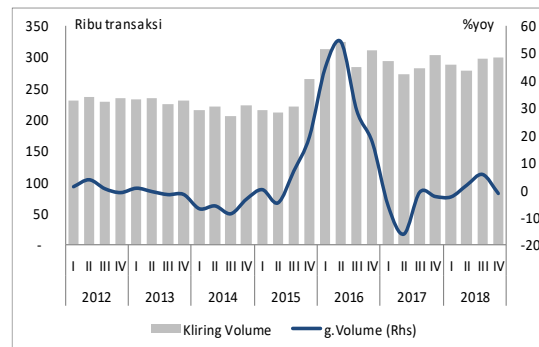


Grafik V.2 Transaksi Non Tunai Kalimantan Timur Triwulan IV 2018 Berdasarkan Instrumennya

Pada triwulan IV 2018, jumlah transaksi yang menggunakan SKNBI mengalami peningkatan. Nominal transaksi SKNBI triwulan IV 2018 tercatat tumbuh dengan nominal sebesar Rp10,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 dengan nominal sebesar Rp10,16 triliun (Grafik V.3). Peningkatan juga terjadi secara volume transaksi, dimana transaksi via SKNBI di wilayah Kalimantan Timur triwulan IV 2018 mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 299,8 ribu transaksi, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 sebanyak 297,5 ribu transaksi (Grafik V.4).



Grafik V.3 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kalimantan Timur



Grafik V.4 Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kalimantan Timur

Selanjutnya, transaksi RTGS Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan selama triwulan IV 2018, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Transaksi RTGS Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mengalami kenaikan dengan nominal sebesar Rp10,25 triliun, meningkat signifikan sebesar 37,61% (yoy), dibandingkan triwulan III 2018 dengan nominal sebesar Rp7,41 triliun atau berkontraksi -19,8% (yoy). Di sisi lain, volume transaksi RTGS Kalimantan Timur triwulan IV 2018 tercatat sebesar 6,7 ribu transaksi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya atau tumbuh sebesar 2,18% (yoy).

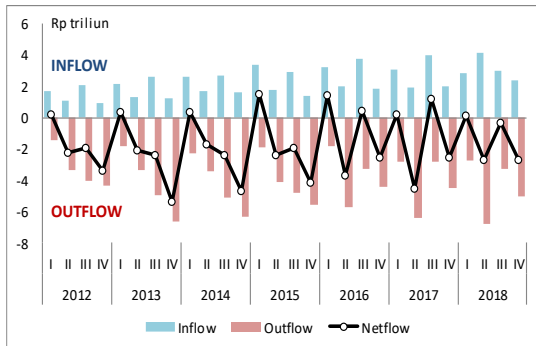
Sementara itu, perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat terus didorong melalui pembentukan Layanan Keuangan Digital (LKD). Perkembangan jumlah agen LKD di Kalimantan Timur terus meningkat pada triwulan IV 2018. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), LKD didefinisikan sebagai kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile/web* dalam rangka keuangan inklusif. Jumlah agen LKD yang ada di wilayah Kalimantan Timur tercatat sebanyak 5.435 agen pada triwulan IV 2018, atau tumbuh 23,88% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 4.137 agen. Selain terjadi peningkatan agen LKD, juga terdapat pertumbuhan positif jumlah uang elektronik yang beredar di wilayah Kalimantan Timur, yakni tercatat 33.596 unit atau tumbuh signifikan 56,39% (qtq) dibandingkan triwulan III 2018 sebanyak 21.482 unit.

5.2 Perkembangan Aliran Uang Kartal

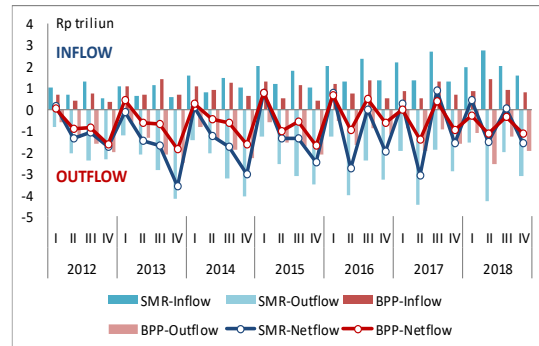
Beberapa indikator untuk melihat aktivitas perkembangan uang kartal atau transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia yaitu aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*), aliran uang masuk ke Bank Indonesia dari perbankan (*inflow*), pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE), serta temuan uang palsu di wilayah. Pada triwulan IV 2018, Kalimantan Timur mengalami *net outflow*. Sesuai pola *seasonal*-nya, jumlah transaksi tunai⁹ di wilayah Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. Secara nominal, nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) di wilayah Kalimantan Timur mencapai Rp5,06 triliun pada triwulan IV 2018 atau turun 11,75% (yoy). Sementara itu, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) sebesar Rp2,36 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 18,62% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik V.5). Dengan demikian, pada triwulan IV 2018 transaksi tunai di Kalimantan Timur berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp2,7 triliun. *Outflow* ini sejalan dengan belanja masyarakat yang meningkat dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). *Outflow* ini juga didukung oleh bandara APT Pranoto Samarinda yang mulai melayani penerbangan ke luar wilayah Kalimantan Timur. Secara spasial, penurunan jumlah arus kas di triwulan IV 2018 terjadi di wilayah kerja Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Indonesia Balikpapan. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengalami

⁹ Total transaksi inflow dan outflow di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dan Bank Indonesia Balikpapan

penurunan aliran masuk bersih (*net outflow*) sebesar Rp1.574 triliun, sementara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mengalami *net outflow* sebesar Rp1.128 triliun (Grafik V.6).

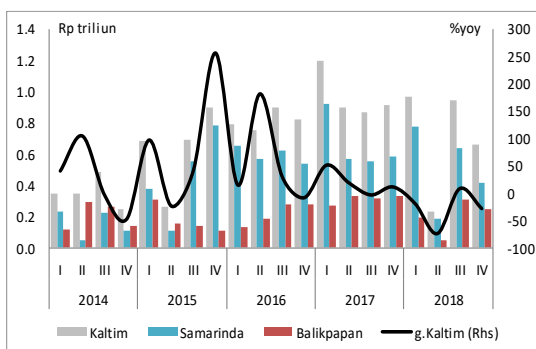


Grafik V.5 Pengedaran Uang Kartal Kalimantan Timur

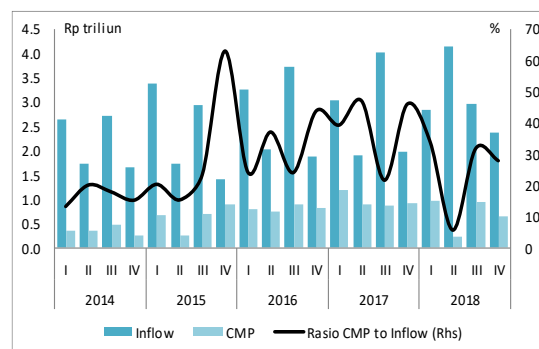


Grafik V.6 Uang Kartal Kalimantan Timur – Spasial

Dalam rangka memelihara serta meningkatkan kualitas Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat atau *Clean Money Policy (CMP)*, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan IV 2018, penarikan UTLE yang dilakukan Bank Indonesia di wilayah Kalimantan Timur tercatat -28,12% (yoy) mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,49% (yoy) (Grafik V.7). Selanjutnya, rasio penarikan UTLE terhadap *inflow* pada triwulan IV 2018 tercatat 27,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 31,75% (yoy) (Grafik V.8).



Grafik V.7 Penarikan Uang Tidak Layak Edar Kalimantan Timur



Grafik V.8 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap *Inflow* Kalimantan Timur

Dalam rangka menjamin ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di masyarakat, Bank Indonesia terus berupaya untuk mengedarkan Rupiah ke seluruh wilayah Kalimantan Timur dalam jumlah dan pecahan yang sesuai dan kualitas uang yang layak edar. Salah satu upaya dalam rangka perluasan keterjangkauan ULE, Bank Indonesia terus mengoptimalkan Kas

Titipan. Terdapat sebanyak 4 (empat) Kas Titipan Bank Indonesia di Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 yang lokasi di Sangatta (Kabupaten Kutai Timur), Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Sendawar (Kabupaten Kutai Barat) dan Tana Paser (Kabupaten Paser). Selama periode laporan, jumlah nominal *dropping* ULE ke 4 (empat) Kas Titipan dimaksud mencapai Rp1,67 triliun, turun sedikit dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1,66 triliun. Sejalan dengan itu, total *inflow* UTLE dari Kas Titipan pada triwulan IV 2018 sebesar Rp36,4 miliar, lebih rendah dibandingkan *inflow* UTLE pada triwulan sebelumnya sebesar Rp58,86 miliar.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas uang layak edar, Bank Indonesia melakukan kas keliling secara rutin hingga ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan Timur. Kas keliling dilakukan untuk melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil dan ULE. Pada triwulan IV 2018, Bank Indonesia di Kalimantan Timur melakukan kas keliling di dalam kota yaitu di Kota Samarinda dan di Kota Balikpapan, serta ke luar kota yaitu di Kota Bontang, Kota Bangun, Muara Wahau, Mahakam Ulu, hingga Sangkulirang. Jumlah uang yang diedarkan melalui kegiatan kas keliling sebesar Rp19,37 miliar, turun 13,9% (qtq) dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp 22,5 miliar.

Selanjutnya, jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Uang palsu yang ditemukan oleh masyarakat atau perbankan di Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan IV 2018 mencapai 281 bilyet, naik dibandingkan triwulan III 2018 sebanyak 248 bilyet. Pada periode laporan terdapat 233 lembar temuan uang palsu yang didominasi uang pecahan Rp100.000,00. Secara spasial, jumlah uang palsu yang ditemukan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur tercatat 157 bilyet dan 124 bilyet oleh Bank Indonesia Balikpapan. Selanjutnya, peningkatan temuan uang palsu ini antara lain sebagai dampak kegiatan edukasi yang dilakukan Bank Indonesia terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada mahasiswa dan siswa/i sekolah di Kalimantan Timur. Melalui sosialisasi dimaksud, masyarakat semakin memahami keaslian uang rupiah dan segera melaporkan kepada Bank Indonesia atau kepolisian jika menemukan uang yang diragukan keasliannya.

5.3 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Keuangan

Bank Indonesia terus berupaya untuk memperluas elektronifikasi transaksi keuangan yang diimplementasikan pada program bantuan sosial non tunai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta perbankan terus mendorong penggunaan transaksi non tunai, baik pada transaksi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, dan juga pada transaksi yang dapat dilakukan sehari-hari di masyarakat. Tantangan dalam perluasan elektronifikasi di daerah adalah sarana dan infrastruktur yang terbatas, awareness dan budaya masyarakat yang terbiasa melakukan transaksi secara tunai, serta belum terbitnya regulasi yang mengikat di kabupaten/kota tertentu.

Bantuan Sosial Non Tunai

Program pemerintah untuk mendukung peningkatan elektronifikasi transaksi dan keuangan inklusif di bidang sosial adalah melalui program bantuan sosial non tunai, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sedangkan program BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan yang selama ini dilakukan melalui program Raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Melalui program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Selanjutnya, program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan e-warong atau agen bank yang melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Lebih lanjut lagi, penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem non tunai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, kemudahan mengontrol, memantau, serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan.

Penyaluran BPNT di Kalimantan Timur dimulai pada bulan Juli 2018. Adapun penyaluran BPNT di wilayah Kalimantan Timur baru dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota yakni di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bank yang ditunjuk sebagai Bank Penyalur bansos non tunai di Provinsi Kalimantan Timur untuk wilayah-wilayah tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk dan PT Bank Nasional Indonesia, (Persero) Tbk. BRI menyalurkan bansos di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan BNI menyalurkan bansos di Kota Bontang. Bank

Indonesia terus melakukan asistensi serta *monitoring* terhadap implementasi program BPNT pada Triwulan IV 2018. Penyaluran PKH Kalimantan Timur pada Triwulan IV 2018 tercatat Rp6,32M dengan penyerapan Rp4,72M atau 74,3% dari total pentransferan ke *wallet* KPM, sedangkan penyaluran BPNT yakni sebesar Rp19,14M dengan penyerapan sebesar 96,08%. Adapun data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk BPNT adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Untuk BPNT di Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Bank Penyalur	Jumlah KPM
1	Kota Samarinda	BRI	18,225
2	Kota Balikpapan	BRI	10,047
3	Kota Bontang	BNI	5,478
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	29,859
TOTAL			63,609

Sumber: Kepmensos 185 / 2018

Berdasarkan *monitoring* yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Penyaluran PKH dan BPNT berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi penerimanya. Meskipun terdapat KPM yang tidak tepat sasaran (5%), proses validasi dan *updating* data terus dilakukan Pendamping agar ke depannya seluruh penerima adalah warga yang sesungguhnya layak untuk menerima bantuan. Jumlah bantuan yang diterima telah sesuai dengan yang seharusnya serta pemanfaatannya juga sesuai dengan ketentuan dari Kemensos. Selain itu, dengan adanya bansos non tunai ini, keuangan inklusif berhasil ditingkatkan, terbukti dari penambahan masyarakat kurang mampu yang mendapatkan akses ke perbankan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kendala dalam implementasi BPNT antara lain proses verifikasi data KPM yang membutuhkan proses yang cukup panjang karena proses verifikasi dilakukan langsung di lapangan serta keterbatasan infrastruktur jaringan untuk mendukung proses elektronifikasi transaksi, terutama di daerah perbatasan/terpencil.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS dapat digunakan antara lain untuk melakukan pembelian buku pelajaran dan peralatan sekolah, pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan pembelajaran/pratikum, pembiayaan listrik, telepon dan internet, serta pembiayaan perawatan sekolah. Sasaran dana BOS adalah jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA/Kejuruan.

Bank Indonesia bersama Kementerian Pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan melaksanakan *pilot project* BOS Non Tunai sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi non tunai di lingkungan sekolah. Pelaksanaan *pilot project* ini juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan MoU BI dengan Kemendikbud No.18/9/NK/GBI/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Peningkatan Edukasi Kebanksentralan, Perluasan Akses Keuangan, dan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan. Pelaksanaan *pilot project* BOS Non Tunai di Kota Samarinda dilakukan di 12 (dua belas) sekolah menggunakan aplikasi SiBOS. Pengembangan aplikasi SiBOS merupakan kerjasama antara PT BPD Kalimantan Timur dan Kaltara dengan BPDNet/Asbanda yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud untuk membangun sistem interkoneksi antara Kemendikbud dengan BPD, sehingga transaksi yang dilakukan oleh sekolah melalui aplikasi SiBOS akan secara *real time* termonitor oleh Kemendikbud. Berdasarkan pelaksanaan *pilot project*, persentase transaksi yang menggunakan aplikasi SiBOS pada saat *pilot project* masih di bawah target (40%) dikarenakan belum adanya fitur transfer antar bank. Untuk itu, PT BPD Kalimantan Timur dan Kaltara telah menyesuaikan aplikasi agar fitur transfer antar bank tersedia. Kendala-kendala terkait implementasi *pilot project* ini yakni dana BOS yang sering terlambat cair, pelaporan yang rumit, pergantian kepala sekolah/bendahara yang menyebabkan administrasi terganggu, serta banyak pembelian kecil seperti pembayaran konsumsi dan fotokopi yang nominalnya sedikit sehingga dilakukan secara tunai.

Selanjutnya, PT BPD Kalimantan Timur & Kalimantan Utara telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk aplikasi SiBOS serta perluasan program ke sekolah-sekolah lainnya di Kalimantan Timur oleh Kemendikbud. Oleh karenanya, pada tanggal 9 November 2018 telah dilakukan peresmian perluasan BOS Non Tunai di Kalimantan Timur dan sosialisasi aplikasi BOS Non Tunai kepada kepala Dinas Pendidikan se-Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada tahun 2019 akan dilakukan perluasan program ini. Untuk Kota Samarinda, perluasan akan dilakukan pada 50% sekolah di masing-masing jenjang (SD, SMP, SMA/K). Selanjutnya, akan ditunjuk 12 (dua belas) sekolah yang akan mengimplementasikan BOS Non Tunai untuk Kota/Kabupaten lainnya yang dilakukan berdasarkan penunjukkan dari Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Dengan kartu berlogo GPN, masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran dalam negeri di kanal pembayaran bank

yang berbeda. Manfaat GPN antara lain kemudahan bertransaksi dengan fitur dan layanan yang terstandardisasi, kanal pembayaran yang tersedia dapat memproses seluruh kartu, serta penyimpanan data informasi transaksi yang lebih terjaga.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan akseptansi masyarakat terhadap kartu berlogo GPN, Bank Indonesia melakukan Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2018 di halaman GOR Segiri Samarinda. Kegiatan ini diikuti oleh 19 bank dengan penukaran kartu sebanyak 2.764 buah kartu. Selanjutnya, jumlah kartu yang ditukarkan di kantor cabang bank pada tanggal 22-26 Oktober 2018 adalah sebanyak 4.348 kartu. Oleh karena itu, total kartu berlogo GPN yang ditukarkan adalah sebanyak 7.112 kartu atau mencapai 107% dari target penukaran sebanyak 6.650 kartu. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap GPN, Bank Indonesia juga melakukan rangkaian sosialisasi, antara lain melalui *talkshow* di stasiun radio dan televisi, serta melakukan *press conference* kepada wartawan media cetak dan elektronik di Kalimantan Timur.

VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mengalami perbaikan yang tercermin dari naiknya beberapa indikator ketenagakerjaan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan Kaltim yang tercermin perkembangan nilai tukar petani masih mengalami penurunan.

6.1 Ketenagakerjaan

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, kondisi ketenagakerjaan Kaltim tahun 2018 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja Kaltim tahun 2018 tercatat sebanyak 1,73 juta jiwa, mengalami kenaikan sebesar 4,69% (yoy) atau terjadi penambahan sebesar 77,63 ribu jiwa dibandingkan jumlah angkatan kerja tahun 2017 yang tercatat sebanyak 1,54 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat sebesar 5,04% (yoy) atau bertambah sebanyak 77,61 ribu jiwa dibandingkan tahun 2017 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 tercatat 64,99% atau naik dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 63,75%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 tercatat 6,60% atau sebanyak 114,31 ribu jiwa, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 6,91% (Tabel VI.1).

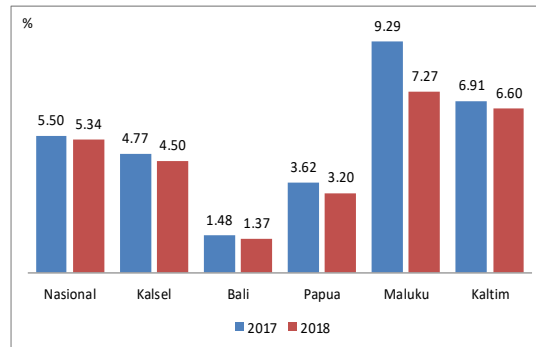
Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltim

Kondisi Ketenagakerjaan	2017	2018	Pertumbuhan	
			Orang	%
Jumlah Penduduk 15+	2,595,992	2,665,909	69,917	2.69
Jumlah Angkatan Kerja	1,654,964	1,732,598	77,634	4.69
Jumlah Bekerja	1,540,675	1,618,285	77,610	5.04
Jumlah Penganggur	114,289	114,313	24	0.02
Bukan Angkatan Kerja	941,028	933,311	(7,717)	-0.82
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63.75	64.99	↑	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.91	6.60	↓	

Sumber : BPS, diolah

Dibandingkan capaian nasional dan beberapa provinsi di wilayah KTI, TPT Kaltim tahun 2018 tergolong tinggi. TPT nasional tahun 2018 tercatat mengalami penurunan dari 5,50% menjadi 5,34%. Di wilayah KTI, TPT Maluku masih merupakan yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. TPT Maluku tahun 2018 tercatat 7,27% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 9,29%. Di sisi lain, Bali masih merupakan

provinsi yang memiliki TPT terendah di wilayah KTI maupun secara nasional yaitu sebesar 1,37% pada tahun 2018 (Grafik IV.1). Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, TPT Kaltim 2018 merupakan yang tertinggi kedua di wilayah KTI dan menjadi urutan keenam tertinggi secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Kaltim relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.1 Perbandingan TPT Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga kerja Kaltim tahun 2018 masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMTA. Jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat SMTA pada tahun 2018 mencapai 622,51 ribu jiwa atau mengalami kenaikan 4,95% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pekerja dengan tingkat pendidikan SD menduduki urutan kedua dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 457,71 ribu jiwa atau naik sebesar 3,21% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 443,49 ribu jiwa. Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidikan SMTP tercatat 262,36 ribu jiwa pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan tingkatan pendidikan yang lain yaitu sebesar 10,72% (yoy) dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 236,96 ribu jiwa (Tabel IV.2).

Tabel VI.2 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	2017	2018	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
<SD	443,488	457,711	14,223	3.21	28.28
SMTP	236,959	262,358	25,399	10.72	16.21
SMTA	593,161	622,507	29,346	4.95	38.47
Diploma keatas	267,067	275,709	8,642	3.24	17.04
Total	1,540,675	1,618,285	77,610	5.04	100.00

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan status usahanya, jumlah tenaga kerja sebagai buruh/karyawan mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2018. Tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan tahun 2018 tercatat sebanyak 906,88 ribu jiwa, meningkat dibandingkan

periode sebelumnya yang tercatat sebesar 867,68 ribu jiwa atau meningkat 4,52% (yoy). Peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar kedua terdapat pada tenaga kerja dengan status berusaha sendiri yang mencapai 317,19 ribu jiwa pada tahun 2018 atau naik 7,35% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 295,47 ribu jiwa. Berdasarkan pangsa, status usaha tenaga kerja Kaltim tahun 2018 paling banyak sebagai buruh/karyawan dengan pangsa sebesar 56,04%, disusul oleh tenaga kerja yang berusaha sendiri sebesar 19,60% dan tenaga kerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 9,15% (Tabel VI.3).

Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Status Usaha Provinsi Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Usaha	2017	2018	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Berusaha Sendiri	295,473	317,197	21,724	7.35	19.60
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	144,909	148,012	3,103	2.14	9.15
Berusaha dibantu buruh tetap	56,132	62,669	6,537	11.65	3.87
Buruh/Karyawan	867,684	906,878	39,194	4.52	56.04
Pekerja bebas di pertanian	23,214	19,848	(3,366)	-14.50	1.23
Pekerja bebas di non pertanian	36,726	40,961	4,235	11.53	2.53
Pekerja keluarga/tak dibayar	116,537	122,720	6,183	5.31	7.58
Total	1,540,675	1,618,285	77,610	5.04	100.00

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan lapangan usahanya, sektor perdagangan menyerap tenaga kerja paling banyak di Kaltim pada tahun 2018. Jumlah tenaga kerja Kaltim yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel tercatat sebanyak 434,87 ribu jiwa atau naik sebesar 11,89% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 388,63 ribu jiwa. Di susul lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan tercatat sebanyak 347,90 ribu jiwa atau naik sebesar 5,92%. Berdasarkan pangsa, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kaltim dengan pangsa sebesar 26,87% yaitu lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel disusul oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 21,50% dan lapangan usaha jasa kemasyarakatan sebesar 19,65%.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2018 tercatat pada lapangan usaha listrik, gas dan air yakni meningkat sebesar 128,86% (yoy) disusul lapangan usaha industri pengolahan meningkat sebesar 20,26% (yoy) dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 15,16% (yoy). Karakteristik sektor pertambangan yang bersifat *capital intensive* atau padat modal karena kegiatan operasional sehari-hari lebih banyak mengandalkan mesin atau alat berat. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang terendah

pada tahun 2018 pada lapangan usaha angkutan, pergudangan dan komunikasi sebesar -0,20% (yoy) disusul dengan lapangan jasa kemasyarakatan sebesar -10,87% (yoy) (Tabel VI.4).

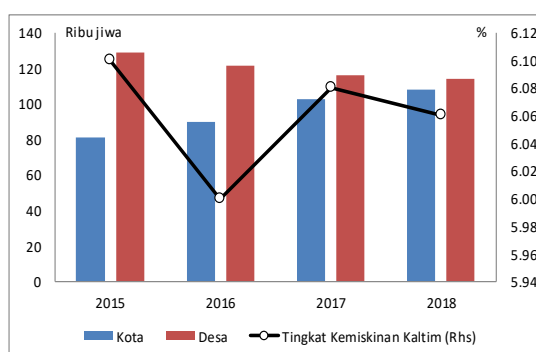
Tabel VI.4 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	2017	2018	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	328,448	347,901	19,453	5.92	21.50
Pertambangan dan penggalian	125,663	144,717	19,054	15.16	8.94
Industri Pengolahan	96,378	115,908	19,530	20.26	7.16
Listrik, gas dan air	6,601	15,107	8,506	128.86	0.93
Bangunan	83,247	84,908	1,661	2.00	5.25
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	388,637	434,865	46,228	11.89	26.87
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	88,373	88,195	(178)	-0.20	5.45
Keuangan, asuransi, sewa dan jasa perusahaan	66,583	68,728	2,145	3.22	4.25
Jasa kemasyarakatan	356,745	317,956	(38,789)	-10.87	19.65
Total	1,540,675	1,618,285	77,610	5.04	100.00

Sumber : BPS, diolah

6.2 Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin di Kaltim tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah perkotaan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, dari 102,39 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 108,34 ribu jiwa atau naik 5,81% (yoy). Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan dari 116,28 ribu jiwa di tahun 2017 menjadi 114,05 ribu jiwa pada tahun 2018 atau turun -1,92% (yoy) (Grafik VI.2). Sementara itu, tingkat kemiskinan Kaltim tahun 2018 mengalami penurunan dari 6,08% pada tahun 2017 menjadi 6,06%.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.2 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur

Garis kemiskinan Kaltim mengalami peningkatan dari Rp561.868/kapita/bulan menjadi 598.200/kapita/bulan pada tahun 2018. Garis kemiskinan merupakan harga yang

dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilokalori/kapita/hari dan kebutuhan nonpangan esensial, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Garis kemiskinan di sebuah wilayah menunjukkan standar biaya hidup di daerah tersebut. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan sebesar 6,52% (yoy) di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang meningkat sebesar 6,33% (yoy) (Tabel VI.5). Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan menjadi andil terbesar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Tabel VI.5 Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur

Kaltim	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				Pertumbuhan (%)		
	Rp/Kapita/Bulan				%		
	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Kota	504,551	535,137	564,801	601,619	6.06	5.54	6.52
Desa	476,614	510,041	554,497	589,588	7.01	8.72	6.33
TOTAL	494,207	526,686	561,868	598,200	6.57	6.68	6.47

Sumber : BPS, diolah

Secara spasial, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pada tahun 2018, terdapat 56,56 ribu jiwa penduduk miskin di Kukar sehingga menyumbang pangsa sebesar 25,84% total penduduk miskin Kaltim. Daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua adalah Kota Samarinda dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 39,23 ribu penduduk dengan pangsa 17,92% dari total penduduk miskin Kaltim, disusul Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebanyak 33,02 ribu jiwa dengan pangsa 15,09%. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah yakni sebanyak 3,25 ribu jiwa atau 1,48% dari total penduduk miskin Kaltim tahun 2018 (Tabel VI.6).

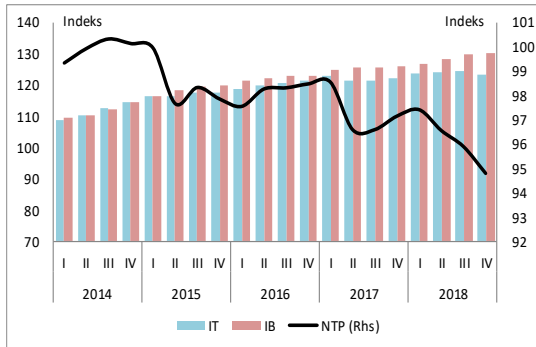
Tabel VI.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	%
Samarinda	36.65	39.25	38.95	40.01	39.23	17.92%
Balikpapan	15.02	17.89	17.55	17.86	17.01	7.77%
Bontang	8.21	8.02	8.60	8.75	8.10	3.70%
Berau	9.77	11.21	11.47	11.86	11.33	5.18%
Kutai Timur	28.30	29.57	30.17	31.95	33.02	15.09%
Kutai Kartanegara	52.53	56.99	55.82	56.57	56.56	25.84%
Kutai Barat	12.92	12.12	12.65	12.80	13.49	6.16%
Paser	20.34	22.82	23.17	25.30	25.14	11.49%
PPU	11.58	12.17	11.66	12.00	11.76	5.37%
Mahakam Ulu	-	2.83	2.88	3.07	3.25	1.48%
Total	195.32	212.87	212.92	220.17	218.89	100.00%

Sumber : BPS, diolah

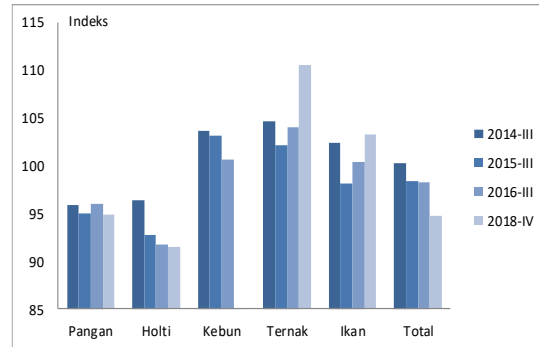
Tingkat kesejahteraan Kaltim yang diukur dari sisi Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Pertanian (NTP) Kaltim pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 94,81 atau lebih rendah dari pada triwulan sebelumnya yang tercatat 95,91 (Grafik VI.3). Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks yang diterima petani (IT) sebesar 123,12 atau masih lebih rendah dibandingkan indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 130,01.

Berdasarkan jenisnya, hanya NTP pada sektor perikanan dan peternakan yang mengalami surplus. Penurunan NTP Kaltim triwulan IV 2018 terjadi hampir di seluruh sub-lapangan usaha pertanian kecuali peternakan sebesar 110,50 dan perikanan sebesar 103,36 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya NTP pada sektor tanaman pangan mengindikasikan masih rendahnya efisiensi sektor pertanian terutama dari sisi distribusi yang memiliki rantai panjang dan akses masuk pasar yang terbatas bagi produsen. Di sisi lain peningkatan NTP pada sektor peternakan banyak dipengaruhi oleh kuatnya posisi produsen sebagai pemasok dalam distribusi komoditas hasil peternakan, sementara pada saat yang sama demand di Kaltim cukup tinggi. (Grafik VI.4).



Sumber: BPS, diolah

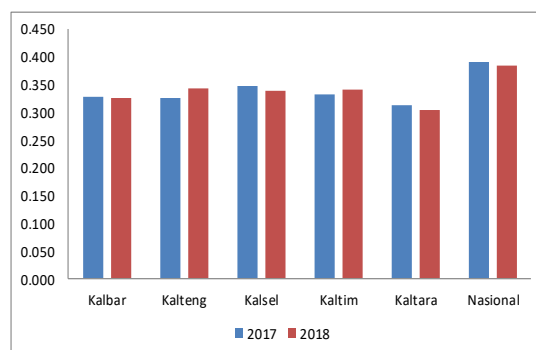
Grafik VI.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim Berdasarkan Komponen

Derajat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kaltim tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio gini mengalami peningkatan dari 0,333 di tahun 2017 menjadi 0,342 pada tahun 2018. Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, Kaltim menempati peringkat dengan rasio gini tertinggi setelah Kalimantan Tengah (Kalteng). Tercatat rasio gini Kalteng pada tahun 2018 sebesar 0,344 (Grafik VI.5). Adapun rasio gini Kaltim masih berada dibawah rasio gini nasional sebesar 0,384 pada tahun 2018. Rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di sebuah wilayah. Sebuah wilayah dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan ketika angka rasio gini mendekati 1. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka perbedaan pendapatan antara golongan berpendapatan tertinggi dan terendah semakin kecil.

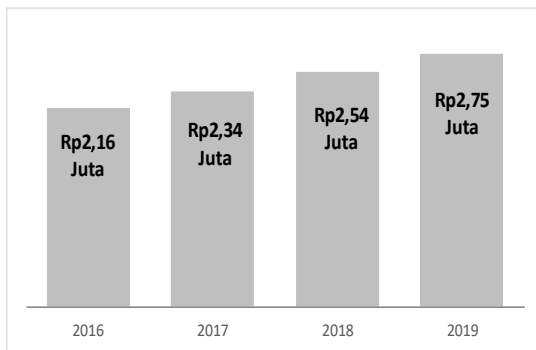


Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.5 Gini Rasio Kalimantan

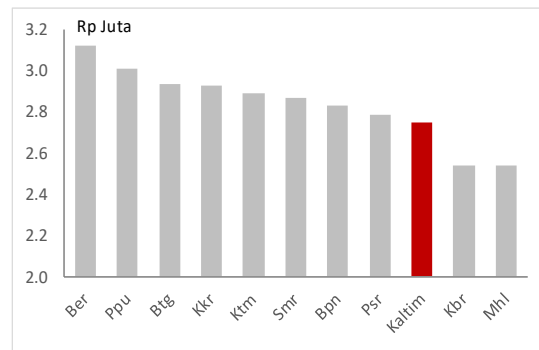
Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sesuai Keputusan Gubernur No. 561/K.713/2017 tanggal 27 Oktober 2017 menetapkan UMP Kaltim tahun 2018 sebesar Rp2,54 juta atau naik 8,7% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp2,33 juta. Penetapan

UMP Kaltim tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 1 November 2017. Disisi lain, UMP tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 1 November 2018 dengan Keputusan Gubernur No.561/K.535/2018 perihal UMP Kaltim tahun 2019 menjadi sebesar Rp2,74 juta atau naik 8% (Grafik VI.6). Secara spasial, Kabupaten Berau memiliki UMK tertinggi tahun 2019 sebesar Rp3,12 juta, disusul oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3,01 juta dan Kota Bontang sebesar Rp2,93 juta (Grafik VI.7).



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.6 Upah Minimum Provinsi Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.7 Upah Minimum Kaltim Berdasarkan Kabupaten/Kota

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Peningkatan kinerja lapangan usaha utama dan pendukungnya diperkirakan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019. Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif dengan kecenderungan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan II 2019 – Lapangan Usaha

Ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 didorong oleh naiknya kinerja seluruh lapangan usaha utama Kaltim, terutama pertambangan. Produksi pertambangan nonmigas di triwulan II 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang didukung oleh peningkatan produksi seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, tingginya curah hujan akibat anomali cuaca berdampak pada terganggunya aktivitas pertambangan nonmigas Kaltim yang didominasi oleh pertambangan terbuka (*open pit*). Lebih lanjut, level harga komoditas batubara yang masih tinggi turut mendukung kinerja lapangan usaha pertambangan.

Sementara itu, kinerja lapangan usaha konstruksi dan perdagangan diperkirakan juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019. Penyelesaian proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema *multi years contract* (MYC) seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda dan jembatan Mahakam IV menjadi salah satu pendorong kinerja lapangan usaha ini. Lebih lanjut, pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan yang telah selesai lelang pada akhir tahun 2018 diperkirakan turut mendukung kinerja lapangan usaha ini. Pada lapangan usaha perdagangan, aktivitas pemilihan umum presiden dan legislatif diperkirakan akan mendorong kinerja lapangan usaha ini di triwulan II 2019. Lebih lanjut, periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) yang jatuh pada triwulan II 2019 juga akan mendorong permintaan masyarakat sesuai dengan pola *seasonal*-nya.

Kinerja lapangan usaha pertanian diperkirakan juga mengalami peningkatan pada triwulan II 2019, terutama pada sub-lapangan usaha perkebunan. Berdasarkan pola *seasonal*-nya, musim panen tanaman kelapa sawit umumnya mulai dilakukan di triwulan II. Kondisi ini sejalan dengan kinerja lapangan usaha industri pengolahan triwulan II 2019 yang diperkirakan

mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan industri pengolahan triwulan II 2019 dipengaruhi oleh naiknya kinerja industri nonmigas, khususnya industri CPO. Peningkatan permintaan CPO dari Tiongkok yang dipengaruhi oleh isu *trade war* antara Tiongkok dan Amerika menjadi *upside risk* bagi industri CPO Kaltim. Tercatat pada tahun 2018, ekspor CPO Kaltim ke Tiongkok tumbuh 190,9% (yoy). Lebih lanjut, kinerja industri LNG diperkirakan tetap positif dengan potensi peningkatan permintaan dari Tiongkok seiring dengan kebijakan *green economy* yang diberlakukan oleh Pemerintah Tiongkok.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan II 2019 – Pengeluaran

Peningkatan lapangan usaha utama Kaltim triwulan II 2019 tercermin pada kinerja ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran. Kinerja ekspor luar negeri Kaltim diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan II 2019 sejalan dengan naiknya produksi lapangan usaha utama. Peningkatan permintaan batubara triwulan II 2019 diperkirakan bersumber dari India pasca tidak beroperasinya salah satu pembangkit listrik swasta terbesar di India pada periode Januari-April 2018. Lebih lanjut, sejak Desember 2018 batubara Indonesia berhasil melakukan penetrasian ke pasar Eropa. Pelabuhan Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) menerima 3 kargo batubara Indonesia dengan kalori 5.000-5.100 Kc GAR yang dikirim dari Samarinda, Kaltim. Sementara itu, peningkatan permintaan juga diperkirakan datang dari Tiongkok pasca deselerasi yang terjadi selama Imlek (*Lunar New Year*).

Sementara itu, kinerja konsumsi swasta diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan II 2019. Masuknya periode HBKN di triwulan II 2019 diperkirakan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga. Kondisi ini terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Kaltim yang menyatakan adanya peningkatan ekspektasi masyarakat 6 bulan yang akan datang. Di sisi lain, konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRRT) diperkirakan tetap tumbuh positif pada triwulan II 2019 yang dipengaruhi oleh aktivitas pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2019. Kinerja konsumsi pemerintah triwulan II 2019 diperkirakan juga mengalami peningkatan sesuai dengan pola *seasonal*-nya. Namun demikian, sikap pelaku usaha yang cenderung *wait and see* dalam melakukan investasi selama tahun politik diperkirakan akan berdampak pada melambatnya pembentukan domestik tetap bruto (PMTB). Berdasarkan hasil asesmen terhadap indikator-indikator makroekonomi di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,35-3,75% (yoy).

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2019

Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltim 2019 tetap tumbuh pada level positif dengan kecenderungan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim 2019 terutama didorong oleh naiknya aktivitas pada lapangan usaha konstruksi yang dipengaruhi oleh dimulainya pengerjaan konstruksi peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan. Lebih lanjut, penyelesaian proyek infrastruktur MYC pemerintah diperkirakan turut mendukung kinerja lapangan usaha ini. Kinerja pertanian Kaltim 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang dipengaruhi oleh kinerja sub lapangan usaha perkebunan. Optimalisasi kebijakan B20 yang terus dilakukan oleh pemerintah menjadi *upside risk* bagi kinerja lapangan usaha pertanian Kaltim 2019. Lebih lanjut, trade war yang berlangsung antara Pemerintah Amerika dan Tiongkok berpotensi meningkatkan permintaan CPO dari Tiongkok sebagai komoditas substitusi untuk kedelai (*soybean*). Kinerja industri LNG tahun 2019 diperkirakan juga mengalami akselerasi yang didukung oleh naiknya input bahan baku seiring dengan rencana penambahan lebih dari 100 sumur baru di salah satu blok migas terbesar di Kaltim. Perkembangan ini diyakini akan mendorong kinerja industri pengolahan Kaltim tahun 2019. Sementara itu, perbaikan ekonomi Kaltim 2018 dan aktivitas pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 diperkirakan akan mendorong kinerja lapangan usaha tersier Kaltim tahun 2019.

Tabel VII.1 Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kalimantan Timur¹⁰

Negara	Realisasi*					World Economic Outlook		
						Oct-18	Jan-19	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
World	3.6	3.4	3.2	3.8	3.7	3.7	3.5 ↘	3.6
Euro	1.3	2.1	1.8	2.3	1.8	1.9	1.6 ↘	1.7
Jepang	0.4	1.4	0.9	1.7	0.9	0.9	1.1 ↗	0.5
Tiongkok	7.3	6.9	6.7	6.9	6.6	6.2	6.2 →	6.2
India	7.4	8.2	7.1	6.7	7.3	7.4	7.5 ↗	7.7
ASEAN-5	4.6	4.8	5.0	5.3	5.2	5.2	5.1 ↘	5.2



proyeksi meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya



proyeksi tidak berubah dibandingkan dengan periode sebelumnya



proyeksi menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya

Sumber : IMF dan Consensus Forecast, diolah

¹⁰IMF menggunakan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam untuk mewakili ASEAN. Sementara itu, Consensus Forecast menggunakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam

Sementara itu, lapangan usaha pertambangan diperkirakan tetap tumbuh positif walaupun tidak sekuat tahun sebelumnya. Kuota produksi batubara Indonesia tahun 2019 ditetapkan sebesar 480 juta mt atau lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2018 yang mencapai 528 juta mt. Selain itu, terdapat rencana pemotongan kuota produksi oleh pemerintah bagi peka usaha pertambangan batubara jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga menjadi downside risk bagi kinerja lapangan usaha ini. Pemotongan kuota produksi IUP dilakukan karena tidak tercapainya target penjualan batubara domestik (DMO) sebesar 25% pada tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018. Namun demikian, peningkatan permintaan batubara dari India yang dipengaruhi oleh rendahnya pasokan batubara domestik India menjadi *upside risk* bagi lapangan usaha pertambangan Kaltim. Salah satu pembangkit listrik swasta terbesar di India menyatakan bahwa permintaan batubara India akan mengalami peningkatan sebesar 40-50 juta mt pada tahun 2019 atau meningkat 10% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh naiknya industri pasir besi (*sponge iron*). Peningkatan ini juga terkonfirmasi dari peningkatan proyeksi pertumbuhan India tahun 2019. Berdasarkan data World Economic Outlook periode Februari 2019 yang dirilis oleh International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan tumbuh 7,5% (yoy) atau lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 7,4% (yoy) (Tabel VII.1). Berdasarkan hasil *liaison* dengan beberapa kontak yang bergerak pada lapangan usaha pertambangan nonmigas, terdapat peningkatan investasi yang dilakukan oleh kontraktor untuk melakukan peremajaan alat-alat berat. Hal ini terkonfirmasi dari meningkatnya investasi di lapangan usaha pertambangan yang bersumber dari penanaman modal langsung dalam negeri dan perbankan tahun 2018. Peningkatan investasi di tahun 2018 diyakini dapat mendorong produktivitas kinerja pada lapangan usaha pertambangan nonmigas tahun 2019. Pada pertambangan migas, pemerintah menetapkan target *lifting* tahun 2019 salah satu blok migas terbesar Kaltim lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan target ini didukung oleh investasi berupa penambahan sumur lebih dari 100 titik yang akan dilakukan oleh operator selama tahun 2019. Peningkatan *lifting* migas tahun 2019 pada akhirnya akan mendorong kinerja industri pengolahan migas Kaltim yang saat ini berproduksi dengan kapasitas utilisasi yang belum optimal.

Tabel VII.2 Outlook Harga Komoditas Ekspor Utama Kalimantan Timur

Komoditas		Realisasi*				World Bank			
						Apr-18		Oct-18	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
Coal	<i>Coal Australia</i>	-17.1	-16.0	12.2	33.9	-4.0	-11.8	22.0 ↗	-7.4 ↗
LNG	<i>Japan LNG</i>	0.5	-31.8	-32.6	16.7	2.3	1.7	16.2 ↗	-3.0 ↘
Crude Oil	<i>Oil Brent, Dubai, WTI (Average)</i>	-7.5	-47.3	-15.6	23.3	23.1	0.0	36.4 ↗	2.8 ↗
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>	-4.1	-31.9	14.2	1.6	6.3	2.2	-12.2 ↘	3.9 ↗
Wood	<i>Logs Malaysia</i>	-7.7	-12.8	11.5	-3.3	1.7	1.9	1.7 →	1.9 ↘
IHEx		-9.5	-17.6	15.9	35.6	-0.2	-6.9	13.5 ↗	-4.5 ↗

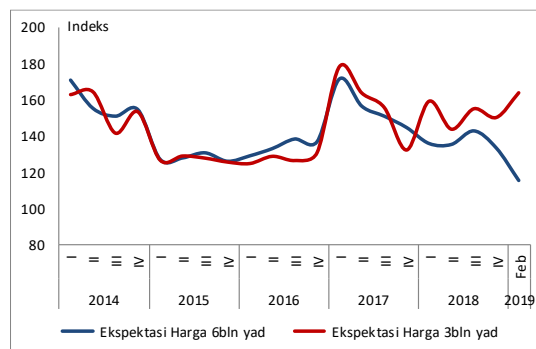
Sumber : Worldbank, diolah

Dari sisi harga, indeks Harga Ekspor (IHEx) Kaltim tahun 2019 diperkirakan mengalami kontraksi walaupun tidak sedalam perkiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi harga yang diperoleh dari Worldbank dalam *Commodity Markets Outlook* bulan Oktober 2018, IHEx Kaltim diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -4,5% (yoy) pada tahun 2019, tidak sedalam perkiraan sebelumnya yang terkontraksi -6,9% (yoy). Revisi pertumbuhan IHEx Kaltim tahun 2019 didorong oleh perbaikan perkiraan harga batubara, minyak mentah dan crude palm oil (CPO). Berdasarkan asesmen sampai dengan triwulan I 2019 dan beberapa indikator makro serta perkembangan ekonomi global terkini, ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,55-2,95% (yoy).

7.2 Prospek Inflasi Kaltim

Inflasi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi Kaltim triwulan II 2019 diperkirakan bersumber dari normalisasi harga komoditas kelompok bahan makanan. Kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya diyakini mampu mendorong produksi komoditas pangan di wilayah Kaltim dan sentra produksi lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan peningkatan produktivitas pertanian melalui peningkatan alat mesin pertanian, penggunaan bibit unggul, optimalisasi metode tanam dan peningkatan jumlah irigasi. Kelancaran distribusi pangan juga terus dijaga melalui perbaikan infrastruktur, optimalisasi satgas pangan dan kerjasama antar daerah. Di sisi lain, risiko peningkatan inflasi kelompok bahan makanan bersumber dari naiknya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada triwulan II 2019. Namun demikian, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim telah berkomitmen untuk terus melakukan program-program pengendalian inflasi, khususnya menjaga kestabilan harga komoditas pangan.

Di sisi lain, kelompok inflasi lainnya diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan II 2019. Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode HBKN (Ramadhan dan Lebaran) sesuai dengan pola *seasonal*-nya. Lebih lanjut aktivitas pemilihan umum dan legislatif yang dilakukan serempak pada tahun 2019 diperkirakan turut mendorong risiko tekanan pada kelompok ini. Peningkatan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga terkonfirmasi dari hasil SK Bank Indonesia Provinsi Kaltim periode Februari 2019 yang menunjukkan bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap kondisi harga-harga komoditas pada 3 bulan kedepan mengalami peningkatan (Grafik VII.1).



Grafik VII.1 Ekspektasi Harga 3 dan 6 bulan ke depan

Peningkatan tekanan inflasi Kaltim triwulan II 2019 juga terjadi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Naiknya tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan terhadap angkutan udara yang diperkirakan selama periode HBKN. Lebih lanjut, beroperasinya Bandara Samarinda Baru – APT Pranoto turut mendukung peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Namun demikian, penyesuaian harga avtur yang dilakukan pemerintah di awal tahun 2019 diperkirakan menjadi salah satu penahan risiko inflasi pada kelompok ini. Berdasarkan asesmen terhadap risiko-risiko selama triwulan II 2019, inflasi Kaltim diperkirakan berada pada kisaran 3,07%-3,47% (yoy).

Secara tahunan, tekanan inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan optimisme masyarakat di tengah kondisi ekonomi Kaltim yang terus mengalami perbaikan menjadi upside risk bagi pembentukan inflasi Kaltim tahun 2019. Di kelompok bahan makanan, inflasi Kaltim diperkirakan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang dipengaruhi potensi gangguan cuaca El Nino¹¹ dengan

¹¹ Berdasarkan perkiraan Badan Klimatologi Amerika Serikat (NOAA IRI/CPC) dan Badan Klimatologi Australia (BOM)

intensitas rendah pada awal tahun 2019 yang berpotensi mengganggu produksi tanaman pangan akibat kemarau berkepanjangan. Lebih lanjut, panjangnya rantai distribusi dan mekanisme pasar yang belum optimal pada komoditas pangan turut berisiko mendorong peningkatan harga komoditas kelompok ini. Selain itu, risiko peningkatan inflasi Kaltim tahun 2019 juga bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Tren peningkatan harga minyak mentah dunia yang masih terus berlanjut di tahun 2019 diperkirakan menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong tekanan harga energi nasional di tahun 2019. Namun demikian, terjaganya stabilitas inflasi Kaltim juga didukung oleh terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat pasca tercapainya target inflasi dalam beberapa tahun terakhir serta upaya pengendalian inflasi daerah yang secara intensif terus dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui TPID. Berdasarkan asesmen tersebut, inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,04%-3,44% (yoy), masih berada didalam target inflasi nasional sebesar 3,50±1% (yoy).

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Clean Money Policy

Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan memusnahkannya serta menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor-Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Ekspektasi Konsumen

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1-100.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to month (mtm)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)

Kegiatan pemusnahan uang bagi uang yang sudah tidak layak edar.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Purchasing Managers Index (PMI)

Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.

Year on year (yoy)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.